



SUKARNO

*Indonesia
menggugat!*

INDONESIA
MENGGUGAT

DEPARTEMEN PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Indonesia Menggugat

Soekarno



PARA TERDAKWA DI DEPAN LANDRAAD BANDUNG,
TANGGAL 18 AGUSTUS 1930

Dimoeka dari kiri kekanan : Maskoen, Soepriadinita, Bung Karno, dan Gatot Mangkoepradja. Dibelakang mereka pembela-pembelanya; Mr. Sastromoeljono dan Mr. Sartono

INDONESIA MENGGUGAT

Sukarno

Imperialisme dan Kapitalisme
Imperialisme di Indonesia
Pergerakan di Indonesia
Partai Nasional Indonesia

Imperialisme Tua Dan Modern

Soekarno

I

Dan bukan saja di dalam dua macam itu imperialisme bisa kita bagikan, –imperialisme juga bisa kita bagikan dalam imperialisme-tua dan imperialisme-modern. Bukankah besar bedanya imperialisme-tua bangsa Portugis dan Spanyol atau East India Company Inggris atau *Oost Indische Compagnie* Belanda dalam abad ke-16, 17 dan 18— dengan imperialisme-modern yang kita lihat dalam abad ke-19 atau 20, imperialisme-modern yang mulai menjalar ke mana-mana sesudah kapitalisme-modern bertakhta kerajaan di benua Eropa dan di benua Amerika Utara?

Imperialisme-modern, –imperialisme-modern yang kini merajalela di seluruh benua dan kepulauan Asia dan yang kini kami musuhi itu, –imperialisme-modern itu adalah anak kapitalisme-modern. Imperialisme-modern pun sudah mempunyai perpustakaan, –tetapi belum begitu terkenal di dalam arti-artinya dan rahasia-rahasianya sebagai soal kapitalisme. Imperialisme-modern itu, oleh karenanya, Tuan-tuan Hakin, mau kami dalilkan artinya agak lebar sedikit dari buku-buku satu dua. Kami tidak akan mendalilkan buku Sternberg “*Der-Imperialismus*” yang walau sangat menarik hati dan tinggi ilmu toh roda “kering” untuk mendengarkannya, –kami mendalilkan Mr. Pieter Jalles Troelstra, pemimpin Belanda yang baru wafat, yang menulis: [i]

“Yang saya artikan dengan imperialisme ialah kejadian, bahwa kapital besar sesuatu negeri yang sebagian besar dikuasai bank-bank, mempergunakan politik luar negeri dari negeri itu untuk kepentingannya sendiri.

Perkembangan ekonomi yang cepat dalam abad kesembilanbelas itu, menimbulkan suatu persaingan hebat di lapangan pertanian dan industri.

Salah satu akibat persaingan ini, ialah bahwa pada penghabisan abad itu, politik proteksi (melindungi negara sendiri) dengan cepat menjadi pegangan.

Lahirlah industri besar yang modern, tenaga produksi industri besar itu diangkat diperbesar, tapi kemungkinan-kemungkinan untuk

menjualkan di negeri sendiri terbatas dan timbullah kemustian mencari pasar di luar batas negeri sendiri.

Caranya industri besar mengatur kesukaran ini dengan tidak mengurangi untungnya ialah: meninggikan harga di pasar dalam negeri yang dilindungi dan menjalankan taktik dumping di luar negeri (yakni menjual barang-barang dengan harga yang lebih murah dari harga biasa di situ).

Politik “perlindungan yang agresif” ini saja sudah membikin tambah panasnya perhubungan internasional. Di samping itu dengan cepat bertambah subur bank-bank yang besar, kapitalnya tambah besar dan industri dan perdagangan dalam negeri tidak cukup lagi untuk menanamkan kapital itu.

Akibatnya mengalirlah kapital itu keluar, istimewa ke negeri-negeri yang belum maju ekonominya dan miskin akan modal. (Misalnya aliran kapital Prancis dan Inggris ke Rusia dan kapital Belanda ke Timur).

Aliran kapital keluar ini tidak hanya berupa uang saja. Negeri-negeri yang mengeluarkan kapital itu juga mengirimkan mesin-mesin, mendirikan pabrik-pabrik, membikin jalan-jalan kereta-api dan pelabuhan-pelabuhan, dll.

Dalam banyak hal bagi penanam modal lebih menguntungkan memasukkan uangnya dalam onderneming-onderneming di negeri-negeri yang terkebelakang ekonominya, di mana tenaga buruh murah dan keuntungan tidak dibatasi oleh undang perburuhan dsb.”

Begitulah keterangan Mr. Pieter Jalles Troelstra. Marilah kita sekarang mendengarkan seorang sosialis lain, yakni H. N. Brailsford, pengarang Inggris yang termashur itu.[ii]

“Di dalam zaman sekarang, yang dinamakan kekayaan itu ialah pertama-tama kesempatan menanamkan modal dengan untung luar biasa. Penaklukan dalam pengertian yang lama sudah tidak berlaku lagi... Memburu konsesi-konsesi di luar negeri dan membuka kekayaan-kekayaan terpendam dari negara-negara yang lemah dan kerajaan-kerajaan yang setengah mati, makin menjadi suatu pekerjaan resmi, suatu peristiwa nasional.

Dalam fase ini bagi kaum berkuasa jadi lebih penting dan menarik hati mengalirkan modal keluar negeri dari mengeksport barang-barang.

Imperialisme adalah semata-mata pengalihan politik dari kecenderungan yang bertambah besar dari modal, yang bertimbun-timbun di negeri-negeri yang lebih maju industrinya, untuk diperusahakan ke negeri-negeri yang kurang maju dan kurang penduduk”.

Bukankah dengan dua contoh ini nyata dengan sejelas-jelasnya, bahwa sangkaan imperialisme itu kaum amtenar, atau bangsa kulit putih, atau pemerintah, atau “*gezag*” apada umumnya, adalah salah sama sekali? Tapi marilah kita mendengarkan satu kali lagi uraian seorang sosialis lain, yakni Otto Bauer^[iii] yang termashur itu, yang melihat di dalam imperialisme-modern itu, suatu politik meluaskan daerah, suatu *expansiepolitiek*^[iv] yang

“Senantiasa mengusahakan tercapainya maksud menjamin supaya kapital mendapat lapangan menanam dan pasar-pasar penjualan. Di dalam perekonomian negeri kapitalis setiap waktu sebagian dari modal uang perusahaan ditarik dari peredaran kapital pabrik... Jadinya, setiap waktu sebagian dari modal perusahaan dibekukan, setiap waktu menjadi “*bero*” (Jawa, maksudnya tanah kosong yang tidak dimanfaatkan).

Apabila banyak modal uang dibekukan, apabila pecahan-pecahan kapital yang lepas ini hanya lambat mengalirnya kembali ke perusahaan-perusahaan produksi, maka yang pertama-tama berkurang ialah permintaan kepada alat-alat produksi dan tenaga-tenaga kerja. Ini berarti segera merosotnya harga-harga dan keuntungan-keuntungan dalam industri alat-alat produksi, bertambah beratnya perjuangan serikat sekerja, turunnya upah-upah kaum buruh. Tapi kedua peristiwa itu berpengaruh pula atas industri-industri, yang membikin barang-barang keperluan sehari-hari. Permintaan kepada barang-barang yang langsung dibutuhkan untuk memenuhi keperluan orang, berkurang, pertama oleh karena kaum kapitalis yang mendapat enghasilannya dari industri-industri alat produksi, lebih sedikit mendapat untung, dan kedua karena bertambah besarnya pengangguran dan turunnya upah-upah, mengurangi tenaga pembeli golongan buruh. Oleh karena itu, juga

dalam perusahaan-perusahaan barang-barang keperluan hidup, harga-harga, keuntungan-keuntungan, upah-upah buruh merosot pula; demikianlah penarikan sebagian besar dari modal uang dari peredaran kapital dalam industri umum, berakibat merosotnya harga-harga, keuntungan-keuntungan, upah-upah, serta bertambah banyaknya pengangguran. Maka pengetahuan ini buat maksud kita penting sekali, sebab sekaranglah baru bisa kita mengerti maksud-maksud politik kapitalis untuk menguasai (negeri lain). Politik ini bergiat mencari lapangan untuk menanamkan kapital dan pasar-pasar buat penjualan barang-barang. Sekarang mengertilah kita bahwa ini bukan soal-soal yang berdiri sendiri-sendiri, tapi, pada hakekatnya adalah satu soal saja”.

[i] *Gedenkschriften* III, hal. 258.

[ii] *De Oorlog van Staal en Goud*, salinan van Revestein, hal. 22, 51, 68.

[iii] *Nationalitätenfrage*, hal. 461. dst.

[iv] *Expansie*, meluaskan daerah.

II

Apabila banyak modal uang dibekukan, apabila pecahan-pecahan kapital yang lepas ini hanya lambat mengalirnya kembali ke perusahaan-perusahaan produksi, maka yang pertama-tama berkurang ialah permintaan kepada alat-alat produksi dan tenaga-tenaga kerja. Ini berarti segera merosotnya harga-harga dan keuntungan-keuntungan dalam industri alat-alat produksi, bertambah beratnya perjuangan serikat sekerja, turunnya upah-upah kaum buruh. Tapi kedua peristiwa itu berpengaruh pula atas industri-industri, yang membikin barang-barang keperluan sehari-hari. Permintaan kepada barang-barang yang langsung dibutuhkan untuk memenuhi keperluan orang, berkurang, pertama oleh karena kaum kapitalis yang mendapat enghasilannya dari industri-industri alat produksi, lebih sedikit mendapat untung, dan kedua karena bertambah besarnya pengangguran dan turunnya upah-upah, mengurangi tenaga pembeli golongan buruh. Oleh karena itu, juga dalam perusahaan-perusahaan barang-barang keperluan hidup, harga-harga, keuntungan-keuntungan, upah-upah buruh merosot pula; demikianlah penarikan sebagian besar dari modal uang dari peredaran kapital dalam industri umum, berakibat merosotnya harga-harga, keuntungan-keuntungan, upah-upah, serta bertambah banyaknya pengangguran. Maka pengetahuan ini buat maksud kita penting sekali, sebab sekaranglah baru bisa kita mengerti maksud-maksud politik kapitalis untuk menguasai (negeri lain). Politik ini bergiat mencari lapangan untuk menanamkan kapital dan pasar-pasar buat penjualan barang-barang. Sekarang mengertilah kita bahwa ini bukan soal-soal yang berdiri sendiri-sendiri, tapi, pada hakekatnya adalah satu soal saja”.

Sekianlah dalil-dalil kami tentang arti kata imperialisme, dari pena orang-orang sosialis. Marilah kita sekarang mendengarkan keterangan orang yang bukan sosialis, yakni keterangan Dr. J. S. Bartstra di dalam bukunya “*Geschiedenis van het moderne imperialisme*[1]”, di mana nanti akan tampak juga kebenaran perkataan kami, bahwa imperialisme itu bukan pemerintahan, bukan sesuatu anggota pemerintah, bukan sesuatu bangsa asing,—tetapi suatu kehausan, suatu nafsu, suatu sistem menguasai atau

mempengaruhi ekonomi bangsa lain atau negeri lain. Berkata Dr. Bartstra:

“Perkataan “imperialisme” pertama sekali dipakai di Inggris kira-kira tahun 1880. Yang dimaksud orang dengan perkataan itu, ialah usaha untuk mengeratkan kembali perhubungan dengan Inggris dari daerah-daerah jajahan yang memerintah sendiri[2] dan pertaliannya dengan negeri induknya sudah agak kendur dalam “masa liberal” yang lampau. Yang menarik hati ialah bahwa perkataan itu sudah hilang sama sekali maknanya yang mula-mula itu”.

..... lama-kelamaan perkataan itu mendapat isi-pengertian yang lain: maknanya sekarang ialah usaha bangsa Inggris, yang hendak memberi kepada “kerajaan” perluasan daerah jajahan yang lebih besar, baik dengan jalan menaklukkan negeri-negeri yang oleh karena letaknya dalam ilmu bumi mungkin membahayakan jika berada dalam tangan saingan, manapun dengan jalan merampas daerah-daerah, yang bisa dijadikan pasar penjualan yang baik atau tepat-tempat orang bisa mendapatkan bahan-bahan pokok untuk pertukangan dalam negeri, yang justru waktu itu mulai makin menderita oleh saingan luar negeri”.

“Dalam arti perluasan daerah jajahan dengan tidak terbatas, pengertian itu segera juga menjadi umum....”

Maka sesudah itu, Dr. Bartstra lalu memberi keterangan lebih lanjut tentang penglihatan kaum sosialis terhadap imperialisme itu, demikian:

“Sebabnya perkataan itu menjadi sangat populer, ialah karena propaganda kaum sosial-demokrat, yang menganggap peristiwa itu sebagai konsekuensi dari sistem produksi kapitalis. Memang yang memberikan perkataan itu pengertian yang lebih dalam dan luas ialah pengarang-pengarang Marxis, seperti Rudolf Hilferding[3], Karl Renner dan juga H. N. Brailsford yang terkenal itu. Menurut mereka, imperialisme itu adalah politik luar negeri yang tidak bisa dielakkan dari negara-negara yang mempunyai “kapitalisme kelihat matang”. Yang dimaksud mereka ialah suatu kapitalisme yang pemusatan perusahaan-perusahaan dari bank-bank yang dijalankan sampai sejauh-jauhnya. Oleh karena itu, dan tidak sedikit pula oleh karena fungsi proteksionisme yang sudah berubah—dulu suatu cara untuk mempertahankan diri terhadap luar negeri, sekarang menjadi “sistem dumping[4]”.—maka imperialisme itu tidak puas lagi dengan pikiran-pikiran liberal yang tradisional mengenai tidak ikut

campurnya negara (dengan urusan partikular), persaingan bebas dan pasifisme.

Paham-paham kemudian ini seolah-olah sudah terbalik menjadi yang sebaliknya, yakni menjadi usaha mempergunakan alat-alat kekuasaan negara yang melulu bersifat politik untuk maksud-maksud ekonomi, yakni: mempengaruhi dan merampas daerah-daerah pasaran dan daerah-daerah bahan pokok, pun juga menjamin pembayaran rente kapital-kapital yang ditanam di negeri-negeri terkebelakang ekonominya.

Mengenai soal belakangan ini, yakni yang disebut “ekspor kapital”, oleh pengarang-pengarang tersebut istimewa istimewa sekali ditunjukkan betapa pentingnya. Disebabkan karena usaha kerajinan lebih sungguh-sungguh dikerjakan, oleh pemusatan-pemusatan bank-bank dan oleh “sistem dumping”, maka—demikian kata mereka—bukan main banyaknya kapital tertimbun-timbun, yang seringkali di dalam negeri tidak cukup bisa dipergunakan. Itulah sebabnya maka makin lama makin terasa perlunya untuk menanam kapital besar-besar di negeri-negeri yang terkebelakang ekonominya, tentu saja dengan bunga yang setinggi-tingginya. Lagi pula dengan demikian didapatlah pesanan-pesanan besar jalan kereta-api, mesin- mesin, dll. pada industri sendiri. Akibat segalanya itu pula: perhubungan dengan luar negeri menjadi runcing, bahaya perang, ekspedisi-ekspedisi militer, “daerah-daerah pengaruh” di daerah- daerah seberang lautan, pengawasan atas uang masuk dan uang keluar dari negeri-negeri asing oleh perkumpulan-perkumpulan bankir Eropa, pemburuan mencari jajahan. Itulah imperialisme!

Akhirnya Dr. Bartstra sekali lagi mengatakan dengan saksama apa yang disebutnya imperialisme-modern, katanya:

“Yang disebut imperialisme-modern ialah usaha meluaskan milik jajahan dengan tidak terbatas, seperti cita-cita demikian itu menjadi pendorong dalam masa ± 1880 sampai sekarang bagi politik luar negeri hampir semua negeri-negeri kebudayaan yang besar, terutama untuk keuntungan industri dan kapital bank mereka sendiri[5].

Imperialisme bukan sekali-kali satu-satunya tenaga penggerak, bahkan tidak setiap saat yang paling kena dari tenaga-tenaga penggerak yang sangat beragam-ragam dari jangka waktu itu, tapi dalam akibat-akibatnya itulah salah satu yang menjadi sangat

penting, oleh karena panggung sejarah bertambah luas karenanya, buat pertamakali dan buat selama-lamanya, di seluruh muka bumi”.

Diambil dari Risalah “**Indonesia Menggugat**”, yaitu Pidato Pembelaan Bung Karno di depan pengadilan kolonial (*landraad*) di Bandung, 1930.

[1] Dr. J.S Bartstra, penulis buku “*Geschiedenis van het modern imperialisme*” (Sejarah Imperialisme Modern)

[2] Kanada, Australia, yang waktu itu dikenal dengan pemerintahan sendiri di bawa lindungan Inggris, atau sering disebut Dominion Status.

[3] Rudolf Hilferding dalam buku “*Das Finanzkapital, eine studie uber die jeugste envolklung der kapitalismus*”.

[4] Sistime dumping adalah menjual barang di dalam negeri lebih mahal daripada di luar negeri. Ini pertama kali dilakukan oleh Jepang pada waktu menghadapi persaingan dari kapitalis-kapitalis Eropa dan Amerika.

[5] Perkembangan industri yang semakin maju di Eropa sekitar tahun 1880 itu, mendorong sesama negara Eropa meluaskan daerah jajahan, yang nantinya terbentur dan melahirkan Perang Dunia I pada tahun 1914-1918.

III

Imperialisme-tua dalam hakekatnya tak beda

Begitulah artinya imperialisme-modern.

Dan artinya imperialisme-tua?

Imperialisme-tua, sebagai yang kita alami dalam abad-abad sebelum bagian kedua abad ke - 19-, imperialisme-tua dalam hakekatnya adalah sama dengan imperialisme-modern: nafsu, keinginan, cita-usaha, kecenderungan, sistem untuk menguasai atau mempengaruhi rumah tangga negeri lain atau bangsa lain, nafsu untuk melancarkan tangan keluar pagar negeri sendiri. Sifatnya lain, azas-azasnya lain, pengahirannya lain,—tapi hakekatnya sama!

Di dalam abad-abad yang pertama atau di dalam abad ke-19, di dalam abad ke-16 atau ke-20,—kedua-duanya adalah imperialisme! Imperialisme, —begitulah kami katakan tadi—, terdapat pada semua zaman! Ya, sebagai Prof. Jos. Schumpeter katakan:

“sama tuanya dengan dunia,—nafsu yang tiada berhingga dari suatu negara untuk meluaskan daerahnya dengan kekerasan keluar batas-batasnya menurut alam”[1].

Imperialisme mana juga yang kita ambil, imperialisme-tua atau imperialisme-modern,—bagaimana juga kita bulak-balikkan, dari mana juga kita pandang,—imperialisme tetap suatu faham, suatu nafsu, sesuatu sistem,—dan bukan amtenar B.B., bukan pemerintahan, bukan gezag, bukan bangsa Belanda, bukan bangsa asing manapun juga,—pendek kata bukan badan, bukan manusia, bukan benda atau materi!

Azas imperialisme itu urusan rezeki

Nafsu, kecenderungan, keinginan atau sistem ini sejak zaman purbakala sudah menimbulkan politik luar negeri, menimbulkan perseteruan dengan negeri lain, menimbulkan perlengkapan senjata darat dan senjata armada, menimbulkan perampasan-perampasan negeri asing, menimbulkan jajahan-jajahan yang mengambil rezekinya,—dalam di dalam zaman modern ia menimbulkan “*Bezugländer*”, yakni tempat mengambil bekal industri, menimbulkan daerah-daerah pasaran bagi hasil-hasil industri itu, menimbulkan

lapangan bergerak bagi modal yang tertimbun-timbun..., menimbulkan “daerah pengaruh”, menimbulkan “protektorat-protektorat”, menimbulkan “*negeri-negeri mandat*” dan “*tanah jajahan*” dan bermacam-macam “lapangan usaha” yang lain, sehingga imperialisme adalah juga bahaya bagi negeri-negeri yang merdeka[2].

Baik “*daerah-daerah pengaruh*”, maupun “*negeri-negeri mandat*”, baik “*protektorat*” maupun “*tanah jajahan*”,—semua terjadinya begitu, sebagai ternyata pula dari dalil-dalil kami tadi, untuk mencari rezeki atau untuk menjaga penarian rezeki, semuanya ialah hasil keharusan-keharusan ekonomi. Partai Nasional Indonesia menolak semua teori yang mengatakan aha asal-asal penjajahan dalam hakekatnya bukan pencarian rezeki, menolak semua teori yang mengajarkan, bahwa sebab-sebab rakyat Eropa dan Amerika mengembara di seluruh dunia dan mengadakan tanah-tanah jajahan di mana-mana itu, ialah oleh keinginan mencari kemashuran, atau oleh keinginan kepada segala yang asing, atau oleh keinginan menyebarkan kemajuan dan kesopanan. Teori Gustav Klemm yang mengajarkan, bahwa menyebarnya “bangsa menang” ke mana-mana itu selain oleh nafsu mencari kekayaan ialah didorong pula oleh “nafsu mencari kemashuran”, “nafsu mencari keakuran”, “nafsu melihat negeri asing”, “nafsu mengembara merdeka”, atau teori Prof. Thomas Moon yang mengatakan, bahwa imperialisme itu selain berazas ekonomi juga adalah berazas nasionalisme dll., sebagai diutarakan dalam bukunya “*Imperialism and World-politics*[3]”,—teori-teori itu buat sebagian besar kami tolak sama sekali. Tidak! Bagi Partai Nasional Indonesia penjajahan itu asal-asalnya yang dalam dan azasi, ialah nafsu mencari benda, nafsu mencari rezeki belaka.

“Asal penjajahan yang pertama-tama hampir selalu ialah tambah sempitnya keadaan penghidupan di negeri sendiri”,

begitu Prof. Dietrich Schäfer menulis[1] [4]dan Dernburg, Kolonialdirektor negeri Jerman sebelum perang, dengan terus terang mengakui pula:

“Penjajahan ialah usaha mengolah tanah, mengolah harta-harta di dalam tanah, mengolah tanam-tanaman, mengolah hewan-hewan dan terutama mengolah penduduk, untuk keuntungan keperluan ekonomi dari bangsa yang menjajah”.....[2]

O memang, Tuan-tuan Hakim, penjajahan membawa pengetahuan, penjajahan membawa kemajuan, penjajahan membawa kesopanan. Tetapi yang sedalam-dalamnya ialah urusan rezeki, atau sebagai Dr. Abraham Kuyper menulis dalam bukunya “Antirevolutionaire staatkunde”:-“suatu urusan perdagangan”, “*een mercantiele betrekking*”!

“Jajahan-jajahan dengan tiada pembentukan keluarga sendiri yang menetap, memberi kesempatan menyuburkan penghasilan negeri bumi-putera, menggali tambang-tambang, menjualkan barang kita di situ dan sebaliknya mencarikan pasar di negeri-negeri kita buat barang-barang dari tanah jajahan itu, tapi perhubungan adalah tetap perhubungan ekonomi. Yang dipentingkan ialah pembukaan tambang-tambang, pembikinan barang-barang, perhubungan pasar dan perdagangan seberang lautan, tapi bahkan dalam hal bahasa dan adat istiadat, dan terutama dalam hal agama, bangsa yang menjajah itu bisa mengasingkan diri sama sekali dari rakyat yang dijajahnya. Perhubungan adalah perhubungan perdagangan dan tetap demikian sifatnya, yang mengayakan negeri yang menjajah dan tidak jarang membikin miskin negeri yang dijajah”.[5]

Dan Brailsford di dalam bukunya yang paling baru[6] berkata:

“Imperialisme itu telah memahatkan sejarahnya yang indah tentang keberanian dan kehebatannya dalam hal organisasi di dalam kulit bumi sendiri, dari Siberia yang ditutupi es sampai ke gurun-gurun pasir di Afrika-Selatan.

Tapi hadiah-hadiah pendidikan, rangsang-rangsang kecendikiaan dan pemerintahan yang lebih berperikemanusiaan yang turut dibawanya, senantiasa hanyalah barang-barang sisa dari kegiatannya yang angkara murka. Menganugerahkan hadiah-hadiah ini, jarang-jarang, barangkali juga tidak pernah, menjadi alasan pioner-pionernya yang kuat-kuat itu. Kalaupun mereka itu mempunyai sesuatu alasan, yang agak luhur dari keuntungan kebendaan, maka alasan itu ialah untuk kemuliaan dan kebesaran negeri induk.

Tapi nafsu yang mendorong mereka pergi ke “tempat-tempat yang bermandikan cahaya matahari” itu, biasanya ialah keinginan untuk memohopoli suatu pasar bahan-bahan mentah, atau perhitungan yang lebih rendah lagi, bahwa di situ banyak terdapat tenaga buruh yang murah dan tidak tersusun dalam organisasi, sedia untuk dipergunakan. Kalau bukan semua ini yang menjadi alasan, maka

yang menjadi alasan ialah perhitungan yang bersumber kepada saling pengaruh antara kepentingan kebendaan dan keadaan-keadaan ilmu bumi. . . . Kesopanan menghasilkan suatu keenakan, yang jelas sekali mengabdikan kepada maksud-maksud kita sendiri”.

Tidakkah karena itu, benar sekali kalau Prof. Anton Menger menulis:

“Tujuan penjajahan yang sesungguhnya ialah memeras keuntungan dari suatu bangsa, yang lebih rendah tingkat kemajuannya; di masa orang rajin beramal ibadat tujuan ini dibungkus dengan perkataan untuk “Agama Kristen” dan di zaman kemajuan dengan perkataan untuk “kesopanan” orang Inlander”, atau kalau Friedrich Engels bersenda gurau:

“Bangsa Inggris selamanya mengatakan Agama Kristen, tapi maksudnya ialah kapas”?

Nafsu akan rezeki. Tuan-tuan Hakim, nafsu akan rezekilah yang menjadi pendorong Colombus menempuh samudera Atlantik yang luas itu; nafsu akan rezekilah yang menyuruh Bartholomeus Diaz dan Vasco da Gama menentang hebatnya gelombang samudera Hindia; pencarian rezekilah yang menjadi “noordster” dan “kompas”nya[3] Admiraal Drake, Magelhaens, heemskerck atau Cornelis de Houtman. Nafsu akan rezekilah yang menjadi nyawanya kompeni di dalam abad ke-17 dan ke-18; nafsu akan rezekilah pula yang menjadi sendi-sendinya balapan cari jajahan dalam abad ke-19, yakni sesudah kapitalisme-modern menjelma di Eropa dan Amerika.

[1] Prof. Jos Schumpeter, penulis buku “Zur Sociologie der Imperialismus”.

[2] Perang terbuka (perang dunia) atau perang lokal yang diprakarsai oleh negara-negara imperialis itu menjurus ke penguasaan daerah dan negara lain dengan cara seperti protektorat oleh Inggris terhadap Mesir dari tahun 1923-1952, Mesopotamia lewat Volkenbond dijadikan daerah mandat bagi Inggris.

[3] Seperti lazimnya, kaum imperialis itu menyediakan ahli-ahli yang membela tindak-tanduk mereka, termasuklah Gustav Klemm, yang menyatakan bahwa imperialisme itu bertujuan memperbaiki nasib rakyat jajahan.

[4] Prof Dietrich Schafer dalam “Kolonial Geshichte” (Risalah Penjajahan) hal 12.

[5] Dr Abraham Kuyper “Antirevolutionaire staatkunde” yang dikutip oleh Snouck Horgronje dalam bukunya “Colijn over Indie” (Colijn tentang Indonesia).

[6] Brailsford dalam buku “Hoe long nog?” (berapa lama lagi?) hal 221 dst

IV

Lapangan imperialisme-tua

Sebelum zaman kapitalisme-modern itu, bahasa Inggris sudah menguasai sebagian dari Amerika, sebagian dari India, sebagian dari Australia dan lain-lain, yakni sudah menaruh sendi-sendi “*British Empire*” nantinya, –sudahlah bangsa Prancis menguasai sebagian pula dari Amerika dan sebagian juga dari India,–sudahlah bangsa Portugis mengibarkan benderanya di Amerika Selatan dan di beberapa tempat di seluruh Asia,–sudahlah bangsa Spanyol menguasai Amerika Tengah dan kepulauan Filipina,–sudahlah bangsa Belanda menduduki Afrika Selatan, beberapa bagian kepulauan Indonesia, terutama Maluku, Jawa, Sulawesi Selatan dan Sumatera. Sudahlah di zaman itu kita melihat hebatnya tenaga berusaha dari nafsu mencari rezeki tadi, yakni tenaga berbuat yang kuat dari imperialisme-tua!

Balapan cari jajahan di zaman imperialisme-modern

Dan tatkala kapitalisme-modern beranak imperialisme-modern, maka kita menjadi saksi atas “balapan cari jajahan” yang seolah-olah tiada berhingga! Kini orang Inggris sudah bisa mengusir bangsa Prancis dan Protunis dan Belanda dari India. Tiada musuh besar-besar lagi yang menghalang-halangi menjalarnya imperialismenya, tiada hingganya lagi bendera Inggris ditanam di mana-mana, tidak puas-puasnya kehausan kapitalisme Inggris mencari dan meminum sumber-sumber kekayaan di luar pagar dari “*the Empire*” sendiri, tiada suatu benua yang tak mendengar dengungannya pekik perjuangan imperialisme Inggris:

“Tatkala Inggris demi sabda Gusti
Menjelma dari samudera biru
Itu memanglah haknya negeri
Dan bidadari menyanyikan lagu:
Perintahlah, Inggris, Perintahlah ombak!
Bangsa Inggris tak kan menjadi budak!”

India takluk, Singapur dan Malaka diduduki, Tiongkok direbut haknya menetapkan beya dan hak-hak exterritorial, dan dibikin “daerah pengaruh” dengan jalan keras dan jalan “halus”, Mesir

“dilindungi”, Mesopotamia “dimandati”, –Hongkong, kepulauan Fiji, India Barat, kepulauan Falkland, Gibraltar, Malta, Cyprus, Afrika. . . . Imperialisme Inggris seolah-olah tidak puas-puasnya! Dan negeri-negeri lain? Negeri-negeri lain pun ikut dalam balapan ini:

Prancis menjejakkan kakinya di Afrika Utara, di Indo-China, di Martinique, di Guadeloupe, di Reunion, di Guyana, di Somali, di Nieuw Caledonia, –Amerika merebut Cuba, Portoriko, Filipina, Hawaii, dll., –Jerman melancar-lancarkan tangan imperialisme ke pulau Marshall, ke Afrika Barat-Timur, ke Togo, ke Kamerun, ke pulau-pulau Karolina, ke Kiautsjau, ke kepulauan Mariana, geer perkara Marokko dll., –Italia sibuk memperusahakan daerah pendudukannya Assab dekat selat Bab El Mandeb, mengatur kekuasaannya di Afrika Utara, mengambil Kossala, mencoba menaklukkan Abessinia, mengaut-ngaut di Tripoli dll. pula.

Bahwasanya, balapan mencari jajahan yang ktia alami dalam zaman kapitalisme-modern itu, yang mengaut-ngaut ke kiri dan ke kanan dan memasang mulut serta mengulur-ngulur kukunya sebagai Maha-Kala yang angkara murka, –balapan mencari jajahan ini tidak ada bandingannya di seluruh riwayat manusia.

Jepang

Dan di Asia sendiripun, imperialisme-modern itu membuktikan asal-turunannya: asal-turunan dari kehausan-kehausan ekonomi, anak dari kapitalisme, yang di dalam lingkungan rumah tangga sendiri kekurangan lapang usaha. Di atas sudah kami katakan, bahwa imperialisme itu bukan tabeat bangsa kulit putih saja, bukan “kejahatan hati” kulit putih saja: –Bukan saja imperialisme-modern, tapi juga imperialisme-tua kita dapati pada bangsa manapun juga. Kita ingat akan imperialisme bangsa Tartar yang di dalam abad ke-13 dan ke-14 sebagai “angin simun” menaklukkan sebagian besar benua Asia; kita ingat akan imperialisme bangsa-bangsa Aria, Machmud Gazni dan Barber yang memasuki negeri India; kita ingat akan imperialisme Sriwijaya yang menaklukkan pulau-pulau sekelilingnya; kita ingat akan imperialisme Majapahit, yang menguasai hampir semua kepulauan Indonesia beserta Malaka. Tetapi imperialisme-modern Asia baru kita lihat pada negeri Jepang tempo akhir-akhir ini; imperialisme-modern di Asia adalah suatu “barang baru”, suatu unicum, suatu nieuwigheid; memang hanya

negeri Jepang saja dari negeri-negeri Asia yang sudah masuk ke dalam kapitalisme-modern itu. Kapitalisme-modern Jepang yang butuh akan minyak tanah dan arang batu, kapitalisme-modern Jepang yang juga membangkitkan tambahnya penduduk yang deras sekali sehingga melahirkan nafsu mencari negeri-negeri emigrasi[1], – kapitalisme-modern Jepang itu membikin rakyat Jepang lupa akan kesatriaannya dan menanamkan kuku-kuku cengkramannya di semenanjung Sachlin dan Korea dan Mancuria.

Nama “kampiunnya bangsa-bangsa Asia yang diperbudak”, nama itu adalah suatu barang bohong, suatu barang dusta, suatu impian kosong bagi nasionalis-nasionalis kolot, yang mengira bahwa Jepanglah yang akan membentak imperialisme Barat dengan dengungan suara: “Berhenti!”—Bukan membentak “Berhenti!”, tetapi dia sendirilah ikut menjadi belorong imperialisme yang angkara murka! Dia sendirilah yang ikut menjadi hantu yang mengancam keselamatan negeri Tiongkok, dia sendirilah yang nanti di dalam pergaulan mahahebat dengan belorong-belorong imperialisme Amerika dan Inggris ikut membahayakan keamanan dan keselamatan negeri-negeri sekeliling Lautan Teduh, dia sendirilah salah satu belorong yang nanti akan perang tanding di dalam perang Pasifik!

Wujud balapan sekarang

“*Wujud cari jajahan*” di dalam bagian kedua dari abad ke-19, mula-mula adalah suatu balapan antara negeri-negeri Eropa saja. Tetapi sesudah di dalam balapan ini negeri Inggris menjadi yang paling depan, sesudah kapitaisme Inggris di dalam imperialismenya bisa membelakangkan sekalian musuh-musuhnya, sesudah John Bull boleh berjanji “Perintahlah, Inggris, perintahlah ombak”, sesudah itu masuklah dua kampion baru di dalam gelanggang imperialisme dan menjadilah balapan ini di dalam abad ke-20 suatu balapan baru antara Inggris, Amerika dan Jepang, suatu balapan baru untuk mengejar kekuasaan di atas negeri mahakaya yang sampai sekarang belum bisa “terbuka” seluas-luasnya itu, yakni negeri Tiongkok!

Perebutan kekuasaan di Tiongkok inilah kini menjadi nyawa persaingan antara belorong-belorong imperialisme yang tiga itu, perebutan kekuasaan di Tiongkok kini menjadi pokok politik luar negeri Jepang, Amerika dan Inggris. Siapa kuasa di Tiongkok, dialah

akan kuasa pula seluruh daerah Pasifik. Siapa yang menggenggam rumah tangga Tiongkok, dialah yang akan menggenggam pula segala urusan rumah tangga seluruh dunia Timur, baik tentang ekonomi maupun tentang militer. Oleh karena itu, Tuan-tuan Hakim, negeri Tiongkok itu akan diperebutkan mati-matian oleh belorong-belorong tadi, diperjuangkan mati-matian di peperangan Lautan Teduh!

Tentang propaganda kami berhubung dengan bahaya perang Lautan Teduh itu, akan kami uraikan lebih lebar di lain tempat.

[1] Emigrasi, pemindahan rakyat.

Imperialisme di Indonesia

I

Zaman Kompeni

Tuan-tuan Hakim yang terhormat, begitulah gambar imperialisme di Asia diluar Indonesia.

Dan keadaan di Indonesia? Ah, Tuan-tuan Hakim, kita mengetahuinya semua. Kita mengetahui bagaimana didalam abad-abad ke-17 dan ke-18 *Oos-Indische Compagnie* (VOC), terdorong oleh persaingan hebat dengan bangsa-bangsa Inggris, Portugis dan Spanyol, menanam sistem monopolinya. Kita mengetahui, bagaimana di Kepulauan Maluku ribuan jiwa manusia dibinasakan, kerajaan-kerajaan dihancurkan, jutaan tanaman-tanaman cengkeh dan pala saban tahun dibasmi (*hongitochten*). Kita mengetahui, bagaimana, untuk menjaga monopoli di kepulauan Maluku itu, kerajaan Makassar ditaklukkan, perdagangannya dipadamkan, sehingga penduduk Makassar itu ratusan, ribuan yang kehilangan pencarian-rezekinya dan terpaksa menjadi bajak laut yang merampok kemana-mana. Kita mengetahui, bagaimana ditanah Jawa dengan politik “*devide et empera*”, yakni dengan politik “memecah belah”, seperti dikatakan Prof. Veth atau Clive Day atau Raffles[1], kerajaan-kerajaannya satu persatu diperhamba, ekonomi rakyat oleh sistem monopoli, *contingenten* [2] dan *leverantien*[3] sama sekali disempitkan, ya sama sekali didesak dan dipadamkan. Kita mengetahui....tetapi cukup Tuan-tuan Hakim yang terhormat!

Caranya *Oost-Indische Compagnie* menanamkan monopolinya, caranya *Oost-Indische Compagnie* mengekal monopolinya, caranya *Oost-Indische Compagnie* mempertahankan monopolinya, tidak asing lagi bagi siapa yang suka membaca.

Tetapi , maafkanlah Tuan-tuan Hakim, bahwa kami disini mau bercerita sedikit lebar tentang zaman *Oost-Indische Compagnie* itu dan juga tentang zaman *cultuurstelsel*, yakni oleh karena bekas-bekas VOC dan *cultuurstelsel* itu sampai kini hari masih tampak didalam susunan pergaulan hidup Indonesia, sehingga sifat-sifat PNI terpengaruh pula oleh karenanya.

Maafkanlah jika terhubung dengan itu kami sependapat dengan Prof. Snouck Hurgronje yang menulis:[4]

“Orang bisa berkata, bahwa tidak ada gunanya membongkar-bongkar dosa lama yang bukan salahnya keturunannya sekarang, tapi.....akibat dua abad pemerintahan yang jelek itu atas sikap jiwa rakyat bumiputra terhadap dunia barat, sama sekali tidak boleh diabaikan dalam menyelediki soal-soal itu”.

Oleh karena itu, sekali lagi, maafkanlah terhubung dengan *cultuurstelsel* itu, kami mengulangi pendapat-pendapat satu dua kaum intelektual Eropa yang ternama:

“Kompeni itu menguasai raja-raja dan kaum bangsawan dan membebaninya dengan kewajiban-kewajiban, yang oleh mereka itu dijatuhkannya lagi diatas pundak rakyat. Kompeni itu lebih rendah serakah daripada kejam, tetapi akibatnya adalah sama: Penindasan!”, begitulah Prof. Colenbrander menulis[5] dan Prof. Veth berkata:

“Kekejaman tidak menjadi sifat jeleknya yang biasa tetapi.....keserakahannya yang picik barangkali lebih banyak merusak daripada kekejamannya. Bahkan kebuasan Nero hanya mencelakakan sedikit orang yang berdekatan dengan dia, kesejahteraan propinsi-propinsi tidak diganggu-gugatnya; tapi suatu pemerintahan yang jelek peraturannya, adalah suatu bencana umum[6]

Jadi, tidak selamanya “kejam”, tidak selamanya “*wreed*” ? Tetapi toh sering kejam dan buas.

Marilah kita bacakan lagi Colenbrander tentang penanaman monopoli di Ambon dan Banda:

“Coen (Jan Pieterszoon Coen, Sk.) didalam seluruh perkara ini, yang menodai namanya, telah bertindak dengan kelemahan yang meluar batas kemanusiaan, kekejaman yang kelewatan bahkan dalam mata hamba-hamba Kompeni sendiri.....

Sampai-sampai Kuasa-kuasa Kompeni pun sama terkejut membaca cerita-cerita hukuman mati yang diceritakan dengan tenang oleh Coen didalam surat-suratnya....”Itu benar membikin takut, tapi tidak menerbitkan kasih”

demikianlah kata mereka sendiri, yang untuk keperluan labanya, suatu bangsa yang makmur.....hampir tumpas sama sekali[7]

Dan Prof. Kielstra[8] menceritakan:

“Monopoli dagang itu harus diperjuangkan oleh orang-orang kita dan apabila sudah didapat, maka dengan tidak pikir panjang, dipergunakan tiap cara untuk mempertahankannya. Kepentingan-kepentingan penduduk sama sekali tidak diperdulikan oleh kuasa-kuasa kita; kaum Islam dan kaum *heiden*[9] dalam mata orang Kristen kurang harganya; menurut faham-faham zaman itu, mereka-orang gemar memakai istilah Injil-adalah keturunan yang palsu dan sesat” yang apabila berani melawan kompeni, jika perlu boleh dibinasakan”.

Lagi satu dalil dari seorang Jerman, Prof. Dietrich Schafer, yang berbunyi:

“Percobaan-percobaan mereka, memasukkan juga pulau-pulau Australia yang dekat-dekat ke dalam lingkungan kegiatannya, sudah kami ceritakan. Tatkala ternyata, bahwa disini tidak ada hasil apa-apa untuk perusahaan mereka waktu yang sudah dikenal lebih dulu. Caranya hal ini terjadi, bukan tidak beralasan orang menyebutnya yang paling kejam dalam riwayat penjajah[10] Sebagai penutup, pemandangan Prof. Snouck Hurgronje, yang berkata:

“Bagian pertama dari dukacita Hindia-Belanda, namanya Kompeni dan mulai hampir sama dengan abad ke-17. Pelakon-pelakon utamanya berhak atas rasa hormat kita, karena energinya yang hebat, tapi maksud yang mereka kejar dan cara-cara yang mereka pergunakan, demikian rupa, sehingga seringkali kita sukar menahan-nahan rasa jijik kita, meskipun kita mengingat sepenuhnya akan kaidah, harus mengukur laku perbuatan mereka dengan ukuran zaman mereka. ‘Percobaan’ itu mulai dengan perkenalan penduduk Hindia dengan kotoran dari bangsa Belanda, yang memperlakukan penduduk asli itu dengan penghinaan yang sangat besar, yang mungkin mereka tanggungkan; kewajiban mereka ialah berusaha sekuat tenaga untuk memperkaya suatu golongan pemegang andil di negeri Belanda. *Ambetenaar-ambetenaar* kompeni ini, yang oleh majikan-majikannya digaji sangat sedikit, tapi tidak kurang dari majikannya juga suka sekali beroleh laba, memperlihatkan suatu

masyarakat penuh korupsi, yang melebihi kejelekan sejelek-jeleknya yang dituduhkan kepada bangsa-bangsa Timur[11]

[1]) Sir Thomas Stanford Raffles yang pernah menjadi Letnan Gubernur Jenderal selama Inggris berkuasa di Indonesia (1811-1816).

[2] Contingenten= pajak yang dibayar dengan barang-barang hasil bumi oleh kepala-kepala.

[3] Leverantien- Kepala-kepala dipastikan setor barang-barang hasil bumi yang dibeli oleh kompeni. Tetapi banyaknya dan harganya barang itu kompenilah yang menetapkan.

[4] Prof. Snouck Hurgronje (1857-1936) sarjana Belanda yang pernah bermukim 2 tahun di Mekah dengan nama samaran Abd-Al-Gaffar. Sekembalinya dari Mekah, ia bersikap oposan terhadap pemerintah Belanda, tercemin dalam bukunya “Colijn Over Indie”.

[5] Prof. Colenbrander dalam buku “Kolonial Geschichte” Jilid II hal. 252

[6] Prof. J. Pieter Veth (1814-1895) seorang ahli etnologi dan bahasa Indonesia, dengan karangan utamanya, “*Java, geographisch, ethnologisch, historisch*”.

[7] Dari buku “*Kolonial Geschichte*” II, hal. 117

[8] Prof. Kiestra dalam bukunya “*De vestiging van her Nederlandsch gezag in den Indistieri Archtpel*” (Membangun kekuasaan Belanda di Kepulauan Indonesia).

[9] heiden= penyembah berhala (animisme)

[10] Prof. Dietrich Schafer, dari buku “*Kolonial Geschichte*” I hal. 82.

[11] Snouck Hurgronje dalam “*Colijn over Indie*, hal. 32.

II

Zaman Cultuurstelsel

Begitulah gambaran imperialisme-tua dari Oost-Indische Compagnie. Sesudah Oost-Indische Compagnie pada kira-kira tahun 1800 mati, maka tidak ikut mati sistem monopoli, tidak ikut mati sistem mengaut untung bersendi pada paksaan. Malahan.....sesudah habis zaman komisi-komisi dan pemerintahan Inggris, yang mengisi tahun-tahun 1800-1830; sesudah habis zaman “tergoyang-goyang” antara ideologi-tua dan ideologi-baru, sebagai yang disebar-sebarkan oleh revolusi Prancis; sesudah habis “*tijdvak van den twijfel*”[1] ini, maka datanglah sistem kerja paksa yang lebih kejam lagi, lebih mengungkung lagi, lebih memutuskan nafas lagi, –yakni sistem kerja paksa dari *cultuurstelsel*, yang sebagai cambuk jatuh diatas pundak dan belakangnya rakyat kami! Juga *cultuurstelsel* ini, Tuan-tuan Hakim, tidak usah kami beberkan panjang lebar kekejamannya; juga *cultuurstelsel* ini sudah diakui jahatnya oleh hampir setiap kaum yang mengalaminya dan oleh kaum terpelajar yang mempelajarinya riwayatnya.

Tetapi, juga tentang *cultuurstelsel* ini, yang bekas-bekasnya sampai hari ini belum juga hilang dan mempengaruhi susunan PNI itu (sebagai nanti akan kami uraikan), marilah kami ulangi satu dua pendapat ahli-ahli itu.

“Pemerasan penduduk, yang tiada batasnya lagi selain tahan tidaknya badannya, berjalan dengan tiada alangan apa-apa,” begitu kata Prof. Gonggrijp[2] .

Dan di lain tempat pujangga ini menulis pula:

“Jadi sistem ini tidak hanya bersendikan paksaan; paksaan itu, di dalam dua puluh tahun pertama yang gelap dari jangka waktu yang dibicarakan di sini, lebih berat dari beban *contingenten* yang penagihannya terutama diserahkan kepada Kepala-kepala Bumiputra. *Cultuurstelsel* menjadi lebih berat oleh kegiatan *Ambtenaar*Eropa: ini berarti bertambah beratnya tekanan sistem itu dan berarti pula perbaikan teknis dan keuntungan besar.”

“Tidak ada tanaman yang begitu menjadi gangguan seperti nila.[3]Tatkala nila ini akan dalam tahun 1830 dengan cara yang sembrono dimasukkan di tanah Priangan, maka tanaman itu sungguh-sungguh menjadi bencana bagi penduduk. Di dalam distrik Simpur di daerah itu, orang laki-laki dari beberapa desa dipaksa mengerjakan kebun-kebun nila, 7 bulan lamanya dengan tidak putus-putusnya, jauh dari rumahnya; dan selama itu mereka harus mencari makanannya sendiri. Tatkala mereka kembali ke rumahnya, didapatinnya tanaman padinya sudah rusak. Selama lima bulan yang pertama dari tahun 1831, 5000 orang laki-laki dan 3000 kerbau dari distrik itu juga, dipaksa mengerjakan tanah untuk suatu pabrik yang telah didirikan. Sesudah pekerjaan itu selesai, batang-batang nila tidak ada. Dua bulan kemudian, sesudah alang-alang, rumput yang ditakuti itu, tumbuh di atas lapangan yang telah dikerjakan itu, baru diterima untuk mengolah sekali lagi ladang-ladang itu. Kerap kali terjadi bahwa perempuan-perempuan yang hamil melahirkan anak waktu bekerja keras”.....

Dan Stokvis menceritakan:[4]

“Sampai-sampai tahun 1886 masih ada daerah-daerah, dimana si penanam kopi mendapat 4-5 sen sehari, sedang ia memerlukan 30 sen buat hidup. Di dalam perkebunan nila kerap kali dibayarkan f8[5]setahun Di dalam perkebunan kopi ada pembayaran f4,50 setahun buat satu keluarga,jadi 90 sen buat satu orang ”Penulis (Vitalis) itu juga melihat di tanah Priangan orang-orang tersebut kelaparan seperti kerangka kurusnya terhuyung-huyung sepanjang jalan. Beberapa orang begitu letih, sehingga mereka tidak bisa makan makanan yang diberikan kepada mereka sebagai persekot; mereka meninggal....”

.....”pengungsian penduduk banyak juga kejadian di perkebunan-perkebunan itu dan dengan cara besar-besaran. Inilah jalan satu-satunya untuk keluar dari kesengsaraan. “ Pukulan dengan pentungan dan labrakan dengan cambuk terjadi sehari-hari dan di banyak ladang nila biasa saja orang melihat tiang-tiang untuk menyiksa orang.” “Di sini kita melihat suatu bangsa yang tidak secara undang-undang hidup dalam perbudakan tapi secara kenyataan. Ketakutan kepada para bangsawannya telah merasuk ke dalam jiwa mereka; para bangsawan itu belajar pula takut kepada kaum penjajah. Segala keberanian dan semangat merdeka yang tadinya masih hidup dalam hati sanubari bangsa Jawa, kini hilang

lenyap oleh laku Kompeni yang kasar dan kesalahan yang fatal dari Van den Bosch[6]ialah, bahwa ia menghisap lagi rakyat yang sudah rusak itu, penghisapan yang pada hakikatnya sama betul dengan sistem Kompeni. Malahan lebih jahat dan lebih salah lagi! Kompeni tidak harus memikul tanggungjawab dan tidak pernah mau memikul tanggungjawab itu, Kompeni berdagang dengan cara-cara orang dagang yang keras. Van den Bosch mewakili negara sendiri, negara induk, yang begitu banyak masih yang harus diperbaikinya. Segala cara yang membikin perhubungan jajahan lebih memuakkan lagi dari yang sudah menjadi sifatnya, telah dipergunakan olehnya dan oleh penggantinya-penggantinya. Memaksakan suatu cara produksi Barat, jadi suatu cara produksi yang lebih banyak syarat-syaratnya, kepada suatu masyarakat negeri panas yang hidup bertani, sudah merupakan suatu tekanan, tapi lebih berat lagi dukacita yang dibawa oleh nafsu kuasa si bangsa asing”.....

Dua dalil lagi, Tuan-tuan Hakim, lantas kami tutup kami punya dalil-dalil berhubung dengan *cultuurstelsel* ini: dua dalil lagi dari Prof. Kielstra dan Prof. Veth:

“Di negeri Belanda orang tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa di Hindia semua pengeluaran buat pengajaran, pekerjaan umum, polisi dan sebagainya itu, selalu dikecilkan sampai-minimum yang paling kecil, supaya “keuntungan bersih” bisa bertambah besar; dan, yang lebih jahat lagi, oleh paksaan yang dibebankan kepada mereka, penduduk begitu terhalang-alangi dalam memelihara sawah dan ladangnya sendiri, sehingga dalam beberapa daerah timbul kemiskinan dan kesengsaraan, bahaya kelaparan dan pengungsian.[7] dan “bahkan buat mereka yang melihat dalam *cultuurstelsel* itu suatu kebaikan buat Jawa dan juga buat negeri Belanda;—buat Jawa oleh karena mengajar orang Jawa bekerja, buat negeri Belanda oleh karena kas negeri jadi berisi—, bahkan buat mereka saya kira kemunafikan yang menjadi alasan untu memasukkannya, mestinya menjijikkan,[8] begitulah kedua profesor itu menulis.

Tuan-tuan Hakim yang terhormat! *Oost-Indische Compagnie* mengoarn-gacirkan rumah tangga Indonesia, *cultuurstelsel* mengoarn-gacirkan rumah tangga Indonesia. Tuan-tuan barangkali bisa juga lantas mempunyai pikiran: “Benar VOC dan *cultuurstelsel* jahat, benar VOC dan *cultuurstelsel* memasukkan rakyat Indonesia ke dalam

kesengsaraan dan kehinaan, tetapi buat apa membongkar-bongkar hal-hal yang sudah kuno?”

Betul Tuan-tuan Hakim, kejahatan VOC dan kejahatan *cultuurstelsel* adalah kejahatan kuno, tetapi hati-nasional tak gampang melupakannya.

‘Ingatan orang kepada kelaliman yang dideritanya lama hilangnya; kelaliman yang orang lakukan, lekas lupa olehnya,’

begitulah Sanders berkata. Lagi pula, sebagai tadi telah kami katakan, sebagai pula telah dikatakan oleh Prof. Snouck Hurgronje yang kami kutip tadi, –akibat-akibat VOC dan *cultuurstelsel* itu, *naweeen*[9] VOC dan *cultuurstelsel* itu, yang keduanya bersistem monopoli, sampai ini hari belum hilang, sampai ini hari masih terbayang dalam wujud susunan pergaulan hidup Indonesia, sehingga politik dan gerakan Partai Nasional Indonesia, sebagai nanti akan kami terangkan, terpengaru oleh karenanya!

Pada pertengahan abad ke-19 “kapitalisme-modern” yang bersendi kepada “bisnis liberal” dan “persaingan liberal”, di negeri Belanda mulai timbul. Toh.....*cultuurstelsel* yang bersendi kepada “kerja paksa” dan yang terutama memberi untung kepada negara Belanda itu, yang telah begitu menggemukkan kantong kapitalis Belanda partikelir itu, *cultuurstelsel* itu tidak lekas-lekas dihapuskan. Bukan oleh karena negara Belanda tak mempedulikan kepentingan kaum pemodal partikelirnya, bukan oleh karena kepentingan negara itu lebih ditinggikan dari kepentingan borjuis, tetapi tak lain tak bukan ialah karena borjuis Belanda pada masa itu butuh pada *cultuurstelsel* itu sebagai pembayar segala yang perlu diadakan lebih dulu bagi suburnya kapitalisme di negeri Belanda sendiri! Henriette Roland Holst[10] di dalam bukunya “*Kapital en Arbeid in Nederland*” menuliskan seperti berikut:

“Perbuatan kaum borjuis disekitar tahun lima puluh[11] adalah praktis dan menunjukkan kesadaran kelas yang sehat, yakni perbuatan mereka tidak melemparkan *cultuurstelsel* ke sudut, sebelum mereka mengambil daripadanya segala yang bisa diambilnya.....Ada bahaya, bahwa orang-orang yang tidak sabar dan lekas mau maju, terlalau lekas mau memberikan orang Jawa berkah-berkah pekerjaan liberal dan menggantikan *cultuurstelsel*, warisan otokrasi itu, dengan inisiatif pertikelir. Tetapi mungkin beberapa orang berpendapat demikian, –borjuis pada umumnya

mengetahui. Sebagai golongan, mereka itu terutama merasa berkepentingan dalam hal, pertama, pelunasan utang. Kedua, liberalisasi perdagangan dan perusahaan dengan mengurangi bea-bea dan pajak-pajak, yang hanya bisa terlaksana oleh yang tersebut dibawah! Ketiga, pembikinan jalan-jalan kereta-api dan jalan-jalan airm dengan tidak membebani rakyat dengan ongkos-ongkos yang besar, suatu hal yang tentu akan mengobarkan semangat konsevatisme pada orang-orang Belanda yang selalu hemat itu. Semua ini perlu, sebelum bisa dimulai eksploitasi pertikelir di Hindia, sebab kredit nasional, jalan-jalan kereta-api dan pelabuhan-pelabuhan di negeri Belanda, harus menjadi tumpuan eksploitasi itu. Semua hal yang baik-baik itu didapat dari keuntungan-keuntungan Hindia, jadi keuntungan-keuntungan Hindia buat sementara harus tetap ada.”[12]

[1] *tijdvak van den twijfei*=masa ragu-ragu

[2] Prof.Gonggrijp dalam bukunya “*Economische Nederlandsch Indie*” hal.123.

[3] nila= sejenis tanaman yang daunnya dibikin cat warna (disebut juga indigo).

[4] H.J Stokvis dalam bukunya “*Van Wingewest naar Zelfbestuur In Nederlandsch Indische*” (Dari daerah rampasan ke pemerintah sendiri) hal. 27

[5]) f= rupiah zaman Belanda dulu, disebut juga gulden.

[6] Van den Bosch, Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1830-1833, perencana *cultuuralstelsel*. Menjadi menteri jajahan 1835-1837.

[7] Prof. Kielstra dalam “*De Vestiging*”, hal.38

[8] Prof. Veth dalam “*Java*” II, hal.410.

[9] *naweeen*=akibat

[10] Henriette Roland Holst, seorang penyair wanita Belanda yang berjuang di sayap sosialis.

[11] Lima puluh, maksudnya di sini adalah tahun 1850.

[12] Yang dimaksud di sini adalah modal lebihan dari keuntungan yang ditanam di Indonesia.

III

Imperialisme-modern

Tetapi, sesudah syarat-syarat kapitalisme-modern semua selesai terurus, sesudah kredit nasional kokoh dan sesudah jalan-jalan kereta api, terusan-terusan, pelabuhan-pelabuhan telah rampung, sesudah kapitalisme modern menjadi subur, maka kapital surplusnya, mulai ingin orang hendak memasukkannya ke Indonesia, imperialisme modern lahir. Tak berhenti-hentinya kapitalisme modern itu lantas memukul-mukul di atas pintu gerbang Indonesia yang kurang lekas dibukakan, tak berhenti-hentinya kampiun-kampiun imperialisme-modern itu dengan tak sabar lagi menghantam-hantam di atas pintu gerbang itu, tak berhenti-hentinya penjaga-penjaga pintu itu saban-saban sama gemetar mendengar dengungnya pekik “*naar vrijheid!*” (ke arah liberalisasi), “*naar vrijl arbeid*” (ke arah bisnis liberal) dari kaum kapitalisme liberal, yang ingin lekas-lekas dimasukkan. Dan akhirnya, kira-kira tahun 1870, dibukalah pintu gerbang itu! Sebagai angin yang makin lama makin keras bertiup, sebagai aliran sungai yang makin lama makin membanjir, sebagai gemuruh tentara menang yang masuk ke dalam kota yang kalah,—maka sesudah Undang-undang Agraris dan Undang-undang Tanaman Tebu de Waal di dalam tahun 1870 diterima baik oleh *Staten-Generaal* di negeri Belanda, [1]masuklah, modal partikelir itu di Indonesia, mengadakan pabrik-pabrik gula di mana-mana, kebun-kebun teh, *onderneming-onderneming* tembakau dan sebagainya ditambah lagi modal partikelir yang membuka macam-macam perusahaan tambang, macam-macam perusahaan kereta-api, trem, kapal, atau pabrik-pabrik yang lain. Imperialisme tua makin lama makin layu, imperialisme-modern menggantikan tempatnya,— cara pengedukan harta yang menggali untung bagi negara Belanda itu, makin lama makin berubah, terdesak oleh cara pengedukan baru yang mengayakan modal partikelir.

Caranya pengeduk berubah,- tetapi banyaklah perubahan bagi rakyat Indonesia? Tidak, tuan-tuan Hakim yang terhormat,—banjir jakarta yang keluar dari Indonesia malahan makin besar, “pengeringan” Indonesia malahan makin menghebat!

“Di dalam perbantahan tentang jajahan tahun 1848-1870 yang menjadi soal semata-mata ialah kerja paksa dan bisnis liberal; kita lihat berulang dengan sengitnya perselisihan pendapat dari masa keraguan sesudah jatuhnya Kompeni; juga kini nyata jelas pendirian kaum kolot dan kesamaran pendirian oposisi. Kaum konservatif tetap menganggap milik jajahan sebagai sumber keuntungan negara, kaum oposisi jijik dengan eksploitasi tanah jajahan itu sebagai “ daerah sumber keuntungan”. Suci dan penuh kemanusiaan cita-cita mereka hendak mencapai suatu negeri Hindia yang bekerja merdeka dan diperintahi dengan hati yang bersih, penuh harapan berkembang; tapi seperti juga pelopor-pelopor mereka yang terbaik, mereka mempunyai persangkaan salah yang hampir-hampir simpatik, seolah-olah kapital liberal hanya cukup dimasukkan saja ke negeri Hindia, niscaya lepaslah negeri ini dari keadaannya menjadi daerah sumber keuntungan. Bukankah, buat rakyat yang sudah letih itu, hanya ada peralihan penguasaan kekayaan negerinya? Memang berhentilah kejelekan mencampurbaurkan kapitalisme negara dan pemerintahan negara, dalam keadaan perhubungan di negeri Belanda, yang tak memberi hak kepada rakyat untuk ikut bicara; tapi sejarah penjajahan yang lebih baru telah mengajarkan, bahwa hilangnya *cultuurstelsel* hanya berarti kemenangan penguasaan yang satu atas yang lain. Daerah sumber keuntungan mendapat pemegang-pemegang andil yang baru. Kapital partikelir lebih besar pengaruhnya kepada negara dan tentunya juga kepada daerah negara yang dijajah. Dan tidak pernah begitu banyaknya “keuntungan bersih” mengalir justru seperti di bawah pimpinan si penguasaan baru itu; hanya jalannya lebih tenang”.....begitulah gambaran Stokvis.[2]

Dan tidaklah “kena” sekali perbandingan Multatuli yang membandingkan *cultuurstelsel* itu dengan:

“Suatu kumpulan pipa-pipa yang bercabang-cabang tidak terhitung banyaknya dan terbagi-bagi menjadi jutaan pembuluh-pembuluh kecil, semuanya bermuara dalam dada jutaan orang Jawa, semuanya berhubungan dengan induk pipa yang dipompa oleh satu pompa kuat yang digerakkan oleh uap; sedangkan dalam perusahaan partikelir setiap pengejar untung bisa berhubungan dengan semua pipa dan bisa mempergunakan mesin pompanya sendiri untuk mengeduk sumber.”[3]

Tidakkah kena sekali perbandingan itu?

Tuan-tuan Hakim yang terhormat, dengan dua kutipan ini, maka sifat umum imperialisme-modern di Indonesia itu sudah cukup tergambar.

Memang, bagi rakyat Indonesia perubahan sejak tahun 1870 itu hanya perubahan cara pengedukan rezeki; bagi rakyat Indonesia, imperialisme-tua dan imperialisme-modern kedua-duanya tinggal imperialisme belaka, kedua-duanya tinggal pengangkutan rezeki Indonesia keluar, kedua-duanya tinggal *drainage*![4]

“Peradaban”; keamanan, tambah penduduk, alat-alat lalu lintas, dan sebagainya.

O, memang, zaman imperialisme modern mendatangkan “peradaban”, zaman imperialisme modern mendatangkan perikehidupan damai dan “tenteram”, yakni mendatangkan keamanan. Zaman imperialisme-modern mendatangkan tambahnya jumlah rakyat yang deras. Zaman imperialisme-modern mendatangkan jalan-jalan yang menggampangkan perhubungan antara tempat-tempat di Indonesia, mendatangkan jalan-jalan kereta-api, mendatangkan pelabuhan-pelabuhan dan perhubungan-perhubungan kapal yang sempurna.

Tetapi, adakah itu semua dalam hakikatnya, ditinjau dari pergaulan hidup nasional, suatu kemajuan yang setimbang dengan bencana yang disebarkan oleh usaha-usaha partikelir itu?

Ah, Tuan-tuan Hakim, berapakah tidak banyaknya orang yang menjadi silau matanya oleh banyaknya modal dan hasil-hasil peradaban barat yang masuk di negeri kami dan lantas mengira bahwa imperialisme-modern itu mendatangkan kemajuan belaka. Berapakah tidak banyaknya orang yang terbeliak matanya oleh bayangan belakn, terbeliak matanya oleh sariat keadaan, yang didatangkan oleh imperialisme-modern itu dan lantas memanggut-manggutkan kepla sambil berkata: “Memang, memang sekarang sudah lain sekali dengan zaman Kompeni atau *Cultuurstelsel*!

O, memang, sariatnya memang memperdayakan. Bayangannya memang membeliakkan mata! Imperialisme-modern itu, menurut kata Kautsky, adalah: “berlainan dengan politik tua terhadap jajahan-jajahan perasan, yang hanya melihat dalamnya barang-barang untuk

dirampok, kekayaan untuk dikumpulkan dan diangkut ke negeri induk sebagai kapital. Sebaliknya imperialisme-modern adalah suatu politik, yang justru memasukkan kapital-kapital ke tanah jajahan, mendirikan bangunan-bangunan budaya di negeri-negeri ini. Jadi, nampaknya tidak lagi membinasakan, tapi justru memajukan budaya”.[5]

Tetapi hakikatnya, bagaimanakah hakikatnya! “budaya” atau “*cultuur*” yang didatangkan imperialisme-modern itu!

Berkata J.E. Stokvis menutup pandangannya atas *Oost-Indische Compagnie*: “tapi keamanan dan kedamaian itu berarti suatu perjuangan yang sia-sia, kadang-kadang suatu perjuangan satria.....untuk merebut kemerdekaan nasional; tambahannya jumlah jiwa yang pesat ialah berkembang biaknya rakyat katulistiwa yang korat-karit dan diperlakukan tidak semena-mena”[6] dan tiap-tiap perkataan dalam kalimat ini boleh kita pakaikan untuk zaman imperialisme-modern itu. Lagi pula, tambahannya penduduk tidak selamanya berarti kemakmuran, tambahannya penduduk tidak selamanya berarti kesejahteraan umum, sebagai diuraikan oleh Peter Maszlow di dalam bukunya “*Die Agrarfrage in Ruszland*”.

Di dalam kalangan kaum proletar di Eropa, tambahannya jumlah manusia lebih besar dan lebih cepat dari di dalam kalangan kaum pertengahan dan kaum atasan,- adakah ini berarti bahwa kaum proletar itu lebih nyaman hidupnya dari kaum borjuis? Bahwasanya, tambahannya penduduk di Indonesia itu tak lain daripada “*voortplanting van ontwrichte en misbruikte tropenvolken*”, yakni “berkembang biaknya rakyat katulistiwa yang korat-karit dan diperlakukan tidak semena-mena”, sebagai Stokvis mengatakan tadi!

Dan itu jalan-jalan lorong, itu jalan-jalan kereta-api, itu perhubungan-perhubungan kapal, itu pelabuhan-pelabuhan,- tidakkah itu bagus sekali bagi rakyat Indonesia?

O, memang, kami mengakui faedahnya alat-alat pengangkutan, yakni faedahnya alat-alat lalu-lintas modern itu, mengakui pengaruhnya yang baik atas perhubungan dan kemajuan rakyat, kami mengakui bahwa, jikalau umpamanya rakyat Indonesia itu sekarang kehilangan semua itu, niscaya ia merasa rugi,- **tetapi tak dapat disangkal bahwa alat-alat lalu lintas modern itu, menggampangkan geraknya modal partikelir. Tak dapat disangkal, bahwa alat-alat lalu lintas itu**

menggampangkan modal itu jengkelitan di atas padang perusahaannya, membesarkan diri dan beranak di mana-mana, sehingga rezeki rakyat menjadi kocar-kacir oleh karenanya!

Karl Kautsky di dalam bukunya "*Sozialismus und Kolonial-politik*" menulis (hal. 41): "perbaikan alat-alat perhubungan dan alat-alat produksi itu sesungguhnya bisa memperbesar tenaga produksi negeri-negeri yang terbelakang ekonominya, jikalau tidak sejalan dengan itu terus-menerus bertambah besar pula bea-bea kemiliteran dan utang-utang luar negeri. Olah adanya faktor-faktor ini perbaikan itu hanya menjad jalan untuk memeras lebih banyak dari biasa hasil- hasil dari negeri-negeri yang miskin, begitu banyaknya sehingga bukan saja produksi lebih—jika ada—yang lahir dari perbaikan- perbaikan teknis, oleh karenanya terisap habis, tapi juga begitu banyaknya, sehingga banyaknya hasil-hasil yang tinggal di dalam negeri untuk keperluan kaum produsen, berkurang. Dalam keadaan yang demikian itu, kemajuan teknis menjadi suatu jalan untuk pertanian besar-besaran yang sembrono dan kemiskinan."

Begitulah pendapat "kaum merah". Tetapi juga Kolonial-Direktor Dernburg, pemimpin imperialisme Jerman sebelum perang besar, seorang yang karena itu bukan kaum "penghasut",—Kolonial-Direktor Dernburg yang di muka sudah kami dalilkan kalimatnya yang begitu terus terang tentang asas-asas penjajahan yang sebenarnya,— Kolonial-Director Dernburg itu dengan terus terang lagi berkata:

"Tapi semua bangsa yang mempunyai tanah jajahan, telah mengalami, bahwa daerah-daerah jajahan yang luas dengan tiada jalan-jalan kereta api, tetap menjadi harta milik tertutup yang tidak memberikan jaminan keuntungan ekonomi".[7]

Dan keadaan di negeri kami? Bukti-bukti di negeri kami?

Bekas Assisten-Residen Schmalhansen yang terkenal itu menulis:

"Tanah Jawa mempunyai jalan-jalan kereta api dan trem, banyak sekali tanah-tanah erfpacht telah dibuka dan diusahakan, banyak pabrik-pabrik gula dan nila sudah berdiri,.....tapi apakah semua ini bisa mencegah keadaan bahwa kesejahteraan bukannya maju, malah menjadi mundur?"[8]

Dan Prof. Gonggrijp menulis:

“Pelengkapan Hindia dengan alat-alat lalu lintas yang modern ini adalah suatu keperluan yang mutlak dalam perkembangan perusahaan partikelir, yang hasil-hasilnya yang besar-besaran harus didagangkan di pasar-pasar dunia....

Pengaruh besar dan nyata kelihatan atas kesejahteraan orang banyak dari penduduk bumiputra, disebabkan oleh alat-alat lalu lintas yang modern itu....belum lagi ada.”[9]

[1] Undang-undang Agraria dan Undang-undang Tanaman Tebu, dibuat oleh Staten General yang berkedudukan di Belanda, bukan oleh Raad van Indie, karena Raad ini baru ada tahun 1918.

[2] Stokvis dalam bukunya “*Van Wingewest naar Zelfbestuur*” hal. 92.

[3] Multatuli alias Doves Dekker dalam bukunya yang terkenal “*Max Havelaar*” yang; dikutip oleh Roland Holst dalam bukunya “*Kapitaal en Arbeld in Nederland*” hal. 150

[4] Drainage= penyedotan sampai kering

[5] Karl Kautsky (1854-1938): Seorang bangsa Austria penganut aliran sosial demokrat, dalam bukunya “*Sozialismus und Kolonial-politik*” hal. 43.

[6] J.E. Stokvis dalam bukunya “*Van Wingewest naar Zelfbestuur*” hal.12-13

[7] Parvus, dalam bukunya “*Die Kolonial Politik und der Zusammenbruch*” hal.15.

[8] H.E.B. Schmalhausen, bekas Asisten Residen di Jawa, dalam bukunya “*Over Java en de Javanen*” (Tentang Jawa dan orang Jawa) hal. 169.

[9] Prof.Gonggrijp, dalam bukunya “*Ekonomische Geschiedenis Nederlandsch Indie*”, hal.190.

IV

“Keperluan-keperluan mutlak” yang lain

“Keperluan mutlak dalam perkembangan perusahaan partikelir!” Dan berapakah “keperluan mutlak” yang tidak ditemukan.

Ada aturan *erfpacht* yang bersendi atas “*gewetenstopper*” [1], *domeinverklaring*[2] buat *onderneming-onderneming* di pegunungan, ada aturan menyewa tanah bagi *onderneming* tanah datar yang banyak penduduk; ada aturan kontrak buruh dengan *poenale sanctie*[3] bagi *onderneming-onderneming* yang kekurangan kuli; dan “ketertiban dan keamanan” dan lapangan usaha di mana-mana dengan “*staatsafronding*”[4] yang memusnahkan kemerdekaan negeri-negeri Aceh, Jambi, Kurinci, Lombok, Bali, Bone dan lain-lain; ada sistem pengajaran yang menghasilkan kaum buruh “halusan”; ada pasal 161 bis Undang-undang Hukum Pidana yang meniadakan hak mogok, sedang undang-undang pelindung buruh tidak ada sama sekali, sehingga nasib kaum buruh boleh dipermainkan semau-maunya,- sungguh benar kapital partikelir tak kekurangan “keperluan mutlak”, kaum imperialisme-modern berada di surga!

Empat sifat imperialisme-modern

Hebatlah melarnya perusahaan imperialisme itu menjadi raksasa yang makin lama makin bertambah tangan dan kepala! Imperialisme-tua yang dulunya terutama hanya sistem mengangkut bekal-bekal hidup saja, kini sudah melar jadi raksasa imperialisme-modern yang empat macam “shakti”nya:

Pertama : Indonesia tetap menjadi negeri pengambilan bekal hidup

Kedua : Indonesia menjadi negeri pengambilan bekal-bekal untuk pabrik-pabrik di Eropa

Ketiga : Indonesia menjadi negeri pasar penjualan barang-barang hasil dari macam-macam industri asing

Keempat : Indonesia menjadi lapang usaha bagi modal yang ratusan, ribuan-jutaan jumlahnya.

–bukan saja modal Belanda, tetapi sejak adanya “*Opendeurpolitiek*”[5] juga modal Inggris, juga modal Amerika, juga modal Jepang, juga modal lain-lain, sehingga imperialisme di Indonesia kini jadi internasional karenanya.

Terutama “shakti” yang keempat inilah, yakni “prinsip” yang membikin Indonesia menjadi daerah eksploitasi dari kapital-lebih asing, menjadi lapang usaha bagi modal-modal kelebihan dari negeri-negeri asing, adalah yang paling hebat dan makin lama makin bertambah hebatnya!

Dalam tahun 1870 jumlah tanah *erfpacht* ada 35.000 bahu, dalam tahun 1901 sudah 622.000 bahu, dalam tahun 1928 sudah 2.707.000 bahu, –kalau dijumlahkan juga dengan konsesi-konsesi pertanian, jumlah ini buat tahun 1928 menjadi 4.592.000 bahu! Jumlah tanah yang ditanami karet kini tak kurang dari ± 488.000 bahu, hasil ± 141.000 ton jumlah kebun teh ± 132.000 bahu, hasilnya ± 73.000 ton: jumlah kebun kopi ± 127.000 bahu, hasilnya ± 55.000 ton; jumlah kebun tembakau ± 79.000 bahu, hasilnya ± 65.000 ton; jumlah kebun tebu ± 275.000 bahu, hasilnya 2.937.000 ton.[6]

Tuan-tuan Hakim yang terhormat, jutaan, tidak terbilang milyar rupiah kapital imperialis yang kini mengeduk kekayaan Indonesia!

Dr.F.G. Waller, di muka rapat anggota *dari Verbond van Nederlandsche Wetgevers*[7], antara lain berpidato demikian:

“Menurut taksiran majelis majikan, keuntungan bersih dari perusahaan-perusahaan Hindia: gula, karet, termbakau, teh, kopi, kina, minyak tanah, hasil tambang, bank-bank, dan beberapa perusahaan kecil yang lain, dalam tahun 1924, 490 juta rupiah, tahun 1925, 540 juta rupiah. Menurut taksiran bolehlah ditentukan, bahwa 70% dari jumlah ini jatuh di tangan pihak Belanda, jadi kira-kira 370 juta rupiah. Kalau kita perhitungkan jumlah ini dengan bunga yang tinggi 9 atau 10%, maka harga perusahaan-perusahaan itu sekarang mencapai angka luar biasa, yakni 3700 hingga 4100 juta rupiah. Angka ini tentu saja bukan angka yang teliti, tapi cukup memberikan gambaran berapa harga milik Belanda di Hindia-Belanda dan kepada saya terbukti, bahwa perhitungan yang dilakukan dengan jalan lain sampai kepada angka yang demikian juga. Kekayaan yang di negeri Belanda terkena pajak kekayaan ialah 12 milyar, sehingga milik kita yang ada di Hindia tidak kurang dari 1/3 kekayaan rakyat kita semua.”

Lebih dari 4000 juta rupiah kapital Belanda saja, Tuan-tuan Hakim yang terhormat, tetapi jumlah semua modal asing yang berusaha di Indonesia adalah lebih besar lagi, – yakni jikalau kita hitung dengan memakai asas perhitungan Dr. Waller itu juga:– kurang lebih 6000 juta rupiah![8]

Enam milyar rupiah dengan untung setahun rata-rata sepuluh persen! Tetapi berapa perusahaan asingkah yang untungnya tidak berlipat-lipat ganda lagi. Berapa perusahaan asingkah yang dividennya sering kali lebih dari 30, 40, ya kadang-kadang sampai lebih dari 100%! Kita mengetahui dividen tembakau Sumatra yang besarnya 35% dalam tahun 1924, kita mengetahui dividen kina yang berlipat-lipat lagi, kita kenal akan dividen-dividen yang sampai 170%! Kami, oleh karenanya, tidaklah heran kalau seorang sebagai Colijn mengatakan, bahwa modal asing harus terus mengerumuni Indonesia itu sebagai semut mengerumuni wadah-gula, sebagai “*de mieren den suikerpot*”![9]

Ekspor, impor, kelebihan ekspor

Memang milyunan rupiah harganya hasil-hasil perusahaan kapital asing itu yang saban tahun diangkut dari Indonesia, milyunan rupiah besarnya harga pengeluaran hasil-hasil itu saban tahun. Di dalam tahun 1927 pengeluaran kopi adalah seharga f 74.000.000,-; pengeluaran teh f 90.000.000,-; pengeluaran tembakau f 107.000.000,-; pengeluaran minyak f 155.000.000,-; pengeluaran gula f 360.000.000,- (malahan sebelum hebatnya persaingan dari Kuba, kadang-kadang lebih dari f 400.000.000,0); pengeluaran karet f 417.000.000, jumlah semua barang keluar tak kurang dari f 1.600.000.000,-[10]

Pendek kata, saban tahun kekayaan yang diangkut dari Indonesia, sedikit-dikitnya f 1.500.000.000,-!

Dan harga impor? Harga barang-barang yang masuk Indonesia? **Tuan-tuan Hakim yang terhormat, Indonesia adalah suatu tanah jajahan, di mana, sebagai tadi telah kami katakan, prinsip imperialisme yang nomor empatlah yang paling hebat. Semua tanah jajahan yang terutama ialah jadi lapangan usaha modal asing yang kelebihan, suatu daerah pengusahaan surplus kapital di luar negeri.** Suatu jajahan yang demikian itu, ekspornya selamanya melebihi impor, kekayaannya yang diangkut ke luar selamanya lebih banyak dari harga barang yang dimasukkan.

Inilah yang menjadi sifat rumah tangga kami yang miring itu, kelebihan ekspor, dan bukan kelebihan impor,— lebih banyak kekayaan yang keluar dan bukan lebih banyak barang yang masuk, bahkan bukan pula “*les produits se changent contre les produits*”, yakni bukan pula barang yang keluar sama dengan barang yang masuk.

Kelebihan ekspor di Indonesia makin lama makin besar. Di dalam tahun delapan puluhan kelebihan ekspor itu = f 25.000.000,-; di dalam tahun sembilan puluhan sudah menjadi ± f 36.000.000,-; di dalam tahun-tahun penghabisan abad ke-19 sudah bertambah menjadi ± f 45.000.000,-; di dalam tahun sekitar 1910 sudah menjadi f 145.000.000,-; di dalam tahun akhir-akhir ini sudah menjadi f 700.000.000,-[11]. Ya, di dalam tahun 1919 mencapai rekor f 1.426.000.000,-[12]

Bahwasanya,– Indonesia bagi kaum imperialisme adalah suatu surga, suatu surga yang di seluruh dunia tidak ada lawannya, tidak ada bandingan kenikmatannya:

“Kalau kita bandingkan dengan angka-angka internasional...nyatalah bahwa tidak satu negeri lain persentase kelebihan ekspornya begitu tinggi seperti Hindia-Belanda,” begitu Prof, Van Gelderen, kepala *Centraal Kantoor voor de statistiek* di sini, berkata.

[1] Gewetenstopper= pendiaman tuntutan hati

[2] Domeinverklaring= tanah yang diakui milik negara

[3] Ponale sanctie= mulai berlaku 1881, yaitu peraturan yang membolehkan perusahaan perkebunan menangkap buruh bila keluar sebelum masa kontrak berakhir.

[4] Staatsafronding= pembulatan wilayah jajahan.

[5] Opendeur-politiek= politik pintu terbuka, yang berlaku sejak 1905. Sejak itu masuklah modal asing lainnya, selain Belanda.

[6] Bandingkan statist, Jaaroverz. 1928.

[7] *Verbond van Nederlandsche Wetgever*, ialah Perkumpulan Pembuat Undang-Undang Belanda, di mana dr.F.G. Waller menyampaikan makalah pada tanggal 30 September 1927, hal. 16.

[8] Di masa itu 1 kg beras = f 0,07 (7 sen).

[9] Hendrikus Colijn (1869-1944): Pernah menjadi letnan dalam perang Aceh, kemudian menjadi Perdana Menteri Belanda tahun 1925-1939. Buku yang dikutip “koloniale vraagstukken van heden en morgen” hal. 124

[10] Bersumber dari “Jaaroverzicht”

[11] Data ini dibuat van Gelderen, kepala Kantor Pusat Statistik di Jakarta dalam bukunya “*Voorlezingen*”. Ternyata di masa malaise (1930) ekspor dari Indonesia mencapai 700 juta gulden

[12] Ekspor di tahun 1919 mencapai puncak, sebelum datangnya zaman malaise. Data ini diambil dari tulisan D.M.G.Koch “*Vakbeweging 1927*”, hal. 570. (*vakbeweging*= gerakan buruh)

V

Nasib Rakyat Dan bangsa Indonesia? Bagaimanakah nasib bangsa Indonesia?

Menjawab Mr. Brooshooft, seorang yang bukan sosialis, di dalam bukunya *“De Ethisce Koers in de koloniale Politiek”*:

“Jawabnya singkat aja, kita jerumuskan dia ke dalam jurang!” **“Kita jerumuskan dia ke dalam lumpur kesengsaraan, yang di dalam pergaulan hidup Barat meneggelamkan jutaan manusia sampai ke batang lehernya: pemerasan orang yang tidak punya apa-apa selain tenaga kerjanya, oleh orang yang memegang kapital, yakni menggenggam kekuasaan.”** [1]

Ah, Tuan-tuan hakim, begitu banyak orang bangsa Belanda yang tidak mengetahui kesengsaraan rakyat Indonesia. Begitu banyak bangsa Belanda yang mengira, bahwa rakyat Indonesia itu senang kehidupannya.

Meskipun demikian....tidak kurang pula orang-orang pandai bangsa Belanda yang menunjukkan kesengsaraan ini dalam buku-buku, karangan-karangan atau pidato-pidato, –tidak kurang kaum terpelajar bangsa kulit putih yang mengakuinya! Kesengsaraan rakyat Indonesia harus diakui oleh siapa saja yang mau menyelidikinya dengan hati yang bersih; **kesengsaraan rakyat itu bukan “omong-kosong” atau “hasutan kaum penghasut”. Kesengsaraan itu adalah suatu kenyataan atau realiteit yang gampang dibuktikan dengan angka-angka.** Lagi pula, tuan-tuan hakim, adanya kelebihan-kelebihan ekspor itu saja,– yang juga bukan “omong-kosong”, melainkan suatu barang yang nyata oleh adanya angka-angka statistik—adanya hal bahwa negeri Indonesia itu lebih banyak diangkut kekayaan keluar daripada dimasukkan. Adanya hal itu saja, sudah cukup bagi siapa yang mempunyai sedikit pengetahuan tentang ekonomi, bahwa di sini keadaan adalah “miring”,–bahwa di sini tidak ada “keseimbangan”. Dan bukan saja keadaan itu “miring”, bukan saja ada “tidak seimbang”—tetapi (oleh sebab kelebihan-kelebihan ekspor itu makin lama makin besar), keadaan “miring” itu makin lama juga makin “miring”, “tidak seimbang” itu makin lama juga makin tidak seimbang!

Tatkala membicarakan kelebihan-kelebihan ekspor ini, berkata D.M.G.Koch:

“Tentu saja pengambilan yang teratur dan saban tahun bertambah besar dari jumlah-jumlah uang dari negeri Hindia, berarti hilangnya kekayaan-kekayaan yang mungkin bisa dipergunakan untuk perkembangan ekonominya.”[2]

Lagi pula tuan-tuan Hakim, tidakkah pemerintah sendiri mengakui adanya “kekurangan kesejahteraan” itu, tidakkah pemerintah sendiri mengakui adanya “*mindere welvaart*” itu, tatkala pemerintah beberapa tahun yang lalu mengadakan “*mindere welvaartscommissie*” (komisi untuk menyelidiki kekurangan kesejahteraan). Tidakkah Menteri Idenburg[3] sendiri dua puluh lima tahun yang lalu telah menyebutkan *chronischen nood*, suatu “kesengsaraan yang terus-menerus”, “yang sekarang berjangkit di sebagian besar tanah Jawa”, tidakkah menteri itu mengakui pula adanya suatu “kemelaratan yang sudah mendalam”, suatu “*ingevreten armoede*”, [4] sehingga “keadaan ekonomi dari sebagian besar penduduk, sangat jeleknya”?

Tidakkah menteri jajahan itu juga mengakui pula adanya “penyerotan rezeki keluar”, yakni adanya “*drainage*”, walaupun ia berpendapat bahwa:

“menunjukkan penyakit ini lebih gampang dari mendapatkan obat untuk menyembuhkannya”?[5]

Dan tidak kurang pula orang-orang Belanda lain yang mengakui keadaan ini pada zaman itu; Tuan Pruys v.d. Hoeven, bekas Anggota Dewan Hindia, di dalam bukunya “*Veertig Jaren Indische Dienst*”, [6] menulis:

“Nasib orang Jawa dalam empat-puluh tahun yang akhir ini, tidak banyak diperbaiki. Di luar golongan kaum ningrat dan beberapa hamba negeri, masih tetap hanya ada satu kelas saja yang hidupnya sekarang makan besok tidak. Suatu kaum yang agak berada, belum lagi bisa terbentuk, sebaliknya dalam tahun-tahun belakangan ini kita lihat terakhir suatu kelas proletar, yang terdahulu hanya terdapat di ibukota-ibukota.”

H.E.B. Schmalhausen, bekas asisten residen, di dalam bukunya, *Over Java en de Javanen*, bercerita:

“Saya sudah melihat dengan mata sendiri, bagaimana orang-orang perempuan,—sesudah berjalan beberapa jam lamanya, sampai di tempat yang dituju dan mengalami peristiwa, bahwa mereka tidak bisa ikut mengetam padi, karena kebanyakan pekerja. Maka ada yang menangis tersedu-sedu lalu duduku di tepi jalan, putus asa. Keadaan-keadaan yang demikian itu baru bisa kita mengerti, sesudah hidup lama di pedalaman, itupun kalau kita cukup punya perhatian kepada negeri dan penduduk dan senantiasa membuka mata!” “Kami membikinperhitungan.....menurut keterangan-keterangan yang benar dan hasilnya ialah, bahwa harga padi yang mereka terima (sebagai upah) sebanyak-banyaknya f 0.09 sehari.”

Untuk mencari upah 9 sen yang menyedihkan ini dengan kerja berat di panas matahari yang terik, seperti kita katakan tadi, perempuan-perempuan kadang-kadang harus berjam-jam lamanya berjalan kaki dan kadang-kadang ditolak pula. Kenyataan-kenyataan seperti itu lebih membukakan mata bagi keadaan-keadaan yang sebenarnya dari banyak perslah-perslah dan pidato-pidato yang mengenai luarnya saja.” (hal. 14).

Dan Mr. Brooshoof menulis kalimatnya yang termashur: “Kita jerumuskan dia ke dalam jurang”, *Wij duwen hem ini den afgrand*”, sedang di dalam *Staten-Generraall* perkara *inzinking* (kejatuhan) ini ramai dibicarakan. Terutama van Kol tidak berhenti-hentinya membongkar keadaan-keadaan ini, tidak berhenti-hentinya membicarakan :negeri yang tiada sumsum lagi” atau “uitgemergelde gewesten” itu, tidak berhenti-hentinya menggambarkan nasib “jajahan sengsara” atau *noodlijdende kolonie*” ini, tidak berhenti-hentinya menangkan “kemunduran manusia dan ternak” itu. Yakni “*physieke achteruitgang van menschen en vee*”. [7]

Begitulah keadaan beberapa tahun yang lalu, **Adakah keadaan sekarang berbeda? Adakah keadaan hari ini lebih baik?**

Tuan-tuan hakim yang terhormat, tadi sudah kami buktikan dengan angka-angka, bahwa *drainage* Indonesia tidak makin surut, tidak makin kecil, melainkan makin besar, makin membanjir, mendahsatkan, bahwa kelebihan-kelebihan ekspor makin tak berhingga, —bahwa ketidakseimbangan makin menjadi tidak seimbang! Bagi siapa yang mau mengerti, maka tidak boleh tidak, *drainage* yang makin membanjir itu pasti berarti rakyat makin sengsara, pasti berarti rakyat itu, dengan perkataan Mr. Brooshoof,

makin terjerumus ke dalam “jurang”! Jikalau di zaman Pruys v.d. Hoeven kita sudah melihat “suatu kelas proletar, yang dahulu hanya terdapat di ibukota-ibukota”, kalau di zaman Mr. Brooshooft kita sudah melihat “pemerasan orang yang tidak punya apa-apa selain tenaga kerjanya, oleh orang yang memegang kapital”.

Jikalau kita di zaman itu sudah melihat daya yang “memproletarkan”, yakni *proletariseeringstendens* dengan senyatanya,— bagaimanakah kerasnya *proletariseeringstendens* itu di zaman kita sekarang ini, di mana pengedukan kekayaan secara imperialistis itu makin lama makin mengaut, kapital asing makin lama makin bertambah banyak dan bertambah besar “shaktinya”!

Di dalam buku Dr. Huender “Overzicht van den Econ. Toestand der Inheemsche Bevolking van Java en Madoera”, kita membaca:

“Sedang di tahun 1905 jumlah penduduk dewasa yang bekerja tani, ada 71%, menurut maklumat-maklumat yang akhir di Dewan Rakyat.....sekarang ini hanya 52% saja yang semata-mata mempunyai penghasilan dari pertanian”....[8]

dan Prof, van Gelderen dari *Centraal Kantoor Voor de Statistiek* menulis:

“Perkembangan perusahaan asing dengan sendirinya cenderung kepada usaha untuk senantiasa dan berangsuur-angsur secara lebihh besar-besaran melaksanakan perbandingan pokok ini: majikan dan kapital, jadi juga keuntungan, bagi bangsa asing; dan kaum buruh, jadi juga upah, bagi bangsa bumiputra. Memang dengan demikian bertambah besar permintaan kepada tenaga buruh dan bertambah besar jumlah penduduk yang mendapat penghasilan berupa upah. Tapi hal ini terjadi secara sangat berat sebelah seperti berikut. Penduduk bumiputra menjadi suatu bangsa yang terdiiri dari kaum buruh belaka dan Hindia menjadi buruh antara bangsa-bangsa.”[9]

[1] Mr. Brooshooft, dalam bukunya “*De Etische Koers in de Koloniale Politiek*” hal. 65 (Arah etika dalam politik Kolonial).

[2] D.M.G. Koch dalam “*Vakbeweging 1927*” hal. 570.

[3] Alexander W.F. Idenburg (1861-1935), seorang tokoh dari partai And revolusioner, menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda pada tahun 1909-1916, kemudian menjadi menteri jajahan tahun 1918.

[4] Van kol dalam bukunya "*Nederlandsch Indie in de Staten General*" hal. 112.

[5] Ibid hal. 1007.

[6] "*Veertig Jaren Indische Dienst*" = Empat puluh tahun berdinis di Hindia.

[7] Apa yang diuraikan oleh Mr. Brooshoof ini, terdapat juga dalam buku Van Kol "*Nederlandsch-indie in de Staten General*"

[8] Dr. Huender dalam bukunya "*Overzicht van den Economischen Toestand der Inheemsche Bevolking van java en Madoera*" (Risalah keadaan ekonomi penduduk pribumi di Jawa dan Madura) menulis bahwa tahun 1905 ada 71 petani di antara penduduk. Sekitar tahun 1930 berkurang menjadi 52%. Hal ini akibat banyaknya tanah yang diambil perkebunan asing, selain banyak yang pindah ke kota karena sempitnya tanah garapan.

[9] Prof. Van Gelderen, kepala kantor Pusat Statistik di Jakarta, dalam bukunya "*voorlezingen*" hal. 116.

VI

“Bangsa yang terdiri dari kaum buruh belaka” dan “menjadi buruh antara bangsa-bangsa”, Tuan-tuan Hakim,—itu bukan nyaman! Itu bukan memberi harapan besar bagi hari kemudian! Itu bukan memberi perspektif pada hari kemudian itu, jikalau terus-terusan begitu! Tidakkah oleh karenanya, wajib tiap-tiap nasionalis mencegah keadaan itu dengan sekuat-kuatnya? Tidakkah hal ini saja sudah cukup buat membenarkan kami punya pergerakan?

“Bangsa yang terdiri dari kaum buruh belaka” —amboi, dan berapa besarkah upah yang biasanya diterima oleh Kang Kromo atau Kang Marhaen itu! Berapakah, umpamanya, besarnya upah di dalam perusahaan yang terpenting, yakni perusahaan gula,— perusahaan gula yang terdiri di tengah-tengah pusat pergaulan hidup Bumiputra, di tengah-tengah ulu hati pergaulan hidup itu? Menurut *Statistisch Jaaroverzicht* : rata-rata hanya f 0,45 seharu bagi orang laki-laki dan f 0,35 sehari bagi perempuan![1]

Sesungguhnya, Dr. Huender tak salah kalau ia menulis:

“Perusahaan gula buat orang Indonesia yang berhak atas tanah, adalah merugikan: upah-upah yang dibayarkan kepada orang-orang Indonesia yang bekerja padanya, jika tidak terlalu rendah untuk menolak maut, setidak-tidaknya adalah upah minimum, yakni upah yang paling rendah”

Dan bukan di dalam perusahaan gula saja kita dapatkan “Upah yang paling rendah” atau “*minimumloon*en” itu! Upah minimum di Indonesia kita dapat dimana-mana. Selama rumah tangga rakyat Bumiputra masih suatu rumah tangga yang kocar-kacir, selama rakyat Bumiputra masih “*minimumlijdstef*”[2], sebagai dikatakan Dr.Huender selama itu pula upah-upah dimana-mana tentulahberwujud upah-upah minimum,—selama itu maka rakyat yang kelaparan itu tentu terpaksa menerima saja upah-upah yang bagaimanapun juga rendahnya, “*om er het leven bij te houden*”. [3] Prof, van Gelderen di dalam bukunya dengan seterang-terangnya menunjukkan perhubungan sebab akibat antara rumah tangga kami yang kocar-kacir ini dengan rendahnya upah-upah di dalam pergaulan hidup kami,—upah-upah di dalam pergaulan hidup kami yang menurut pendapatnya, bukan

“*Ertragslohn*”[4] tetapi “*Erhaltungslohn*”[5] yakni upah yang “sekedar supaya jangan sampai mati kelaparan”,— upah yang “sekedar sama dengan ongkos-ongkos hidup yang paling rendah”!

Dan hidupnya, *bestaannya* rakyat umum? Bagaimanakah hidupnya rakyat umum? Di atas sudah kami katakan, bahwa Dr. Huender menyebut rakyat Bumiputra itu “*minimumlijdster*” (penderita minimum).

“Yang paling sukar dan paling mengkhawatirkan berhubung dengan keadaan ekonomi di Jawa dan Madura, ialah bahwa penduduk yang telah dibebani sampai batas kesanggupannya itu rupanya adalah “penderita minimum” dan bagi mereka ternyata beberapa peraturan yang diadakan pemerintah untuk memperbaiki kehidupan mereka, tidak mempan.....,[6]

begitulah kesimpulan Dr. Huender. Dan Prof. Boeke di dalam bukunya “*Het zakelijke en persoonlijke element in de koloniale welvaartspolitiek*”, berkata:

“Si tani kecil, pak tani Jawa yang miskin itu bukan saja melarat hidupnya, tapi tidak bisa pula mempengaruhi apa-apa kesejahteraan sekelilingnya; sisa-sisa yang sedikit dari perusahaannya, tidak memungkinkan dia, di luar keperluan-keperluannya yang paling penting sehari-hari, memenuhi keperluan-keperluan lain yang agak berarti juga, yakni keperluan-keperluan yang bisa diadakan oleh lain-lain golongan masyarakat, yang menunggu-nunggu apa yang akan diminta dan ditawarkannya. Yang terutama bisa dikerjakannya dalam masyarakat, ialah menekan tingkat upah.”[7]

“Hidup yang melarat”, “*een Ellendig bestaan*” Tuan-tuan! Hakim, begitulah pendapat Prof. Boeke, seorang yang toh bukan bolsyewik atau “penghasut”, — melainkan seorang ahli ekonomi yang ternama! Angka-angka, Tuan-tuan Hakim? Menurut perhitungan Dr. Huender, penghasilan seorang kepala rumah tangga marhaen setahun ialah rata-rata f 161,-, jumlah beban rata-rata/22.50,- jadi bersih penghasilan setahun adalah f 161,- — f 22.50 = f 138.50, (seratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh sen!), Tuan-tuan Hakim, di dalam dua belas bulan! Yakni, belum sampai f 12. — sebulan; yakni belum sampai f 0.40 sehari yakni, kalau dimakan lima orang (besarnya sama rata), belum sampai f 0.08 sehari seorang![8] Sesungguhnya, sejak kalimatnya Pruys v.d. Hoeven yang berbunyi bahwa kebanyakan rakyat hidupnya “sekarang makan besok tidak” sejak perkataannya Mr. Brooshooft bahwa rakyat terjerumus ke dalam “jurang”, sejak dengungnya suara van Kol yang mendakwa atas adanya “negeri-negeri yang tiada sumsum lagi”, atau

“jajahan yang sengsara” atau “kemuduran manusia dan ternak”, — sejak zaman itu tetaplah bangsa kami hidup “sekarang makan besok tidak”, tetaplah bangsa kami hidup dalam “jurang”, tetaplah bangsa kami hidup dalam “jajahan yang sengsara”!

Bahwasanya,—*drainage* yang kami derita dengan tiada berhentinya itu, tak luput menunjukkan pengaruhnya,—imperialisme-modern tak luput menunjukkan kejahatan shakti-shaktinya!

Orang bisa berkata: “Adakah imperialisme modern itu berkejahatan? Gula “memasukkan” uang ke dalam pergaulan hidup Indonesia dengan upah-upah dan penyewaan tanah; karet, teh, kopi, kina, hanya membuka tanah-tanah hutan yang jauh dari rakyat; minyak tanah keluarnya dari sedalam-dalamnya tanah, — semua memberi “berkah” pada rakyat dan kesempatan berburuh!

O, memang, — memang gula “memasukkan” uang; memang onderneming *erfpacht* tidak begitu “mengenai” rakyat; memang minyak dibor dari sedalam-dalamnya tanah; — memang semua memberi kesempatan berburuh. Tetapi marilah kita membaca pandangan Prof. Snouck Hurgronje, bagaimana macamnya “berhak” (kalau ada “berhak”), yang modal asing itu berikan kepada kami dan sebagaimana macamnya kaum modal asing itu “memelihara” kesejahteraan kami:

“Manfaat-manfaat yang diterima oleh penduduk Bumiputra dari modal Eropa itu, hanya sisa-sisa hasil pekerjaan kaum majikan, bukan dimaksud dan sekali-kali tidak dimaksud terutama untuk mereka. Tujuan mereka ialah.....cari duit..... Seandainya “wadah gula’ tadi — untuk memakai perbandingan Colijn —mulai kosong, oleh karena satu atau lebih hasil-hasil bumi mengalami krisis harga, maka segeralah semut-semut itu menyusup lagi ke dalam tanah, dengan tidak memperdulikan sedikit juga nasib rakyat yang 35 atau 50 juta, yang tadinya senantiasa mengisi wadah gula itu. Selama, seperti sekarang ini, semut-semut itu berdesak-desak mengerumuni wadah gula itu, artinya, selama onderneming-*onderneming*Eropa itu beroleh untung, maka kepentingan-kepentingan orang Bumiputra terhadap usaha mereka yang sewajarnya untuk mencapai untung yang lebih besar lagi, tidak aman, jika tidak ada alat penjagaan yang kuat.... Orang tidak usah seorang antikapitalis untuk mengerti betapa berbahayanya kapital Barat mengancam penduduk Bumiputra dari suatu tanah jajahan.”

Marilah kita juga ingat akan kenyataan, sebagai yang diterangkan oleh Prof. Van Gelderen di dalam bukunya tadi, bahwa tinggi-rendahnya upah itu adalah ditetapkan oleh “tenaga produksi” pergaulan hidup umum,— bahwa jikalau pergaulan hidup itu kocar-kacir, upah pasti kocar-kacir dan serendah-rendahnya pula: — bahwa jikalau pergaulan hidup umum itu suatu “*Ernährungswirtschaft*”[9] upah pasti hanya “*Erhaltungslohn*” saja! Marilah kita ingat, bahwa keadaan rakyat Indonesia yang sebenarnya, memang membenarkan kenyataan ini, — yakni, bahwa, di mana rakyat Bumiputra itu umumnya adalah “*minimumlijdster*”, upah yang biasa diterimanya juga memang hanya “*minimumloonen*”, “*Erhaltungslohen*” belaka! Marilah kita ingat, bahwa industri imperialisme yang cita-citanya membikin untung setinggi-tingginya itu, dan yang karena itu, mempunyai kepentingan atas adanya upah-upah yang serendah-rendahnya (yakni mempunyai kepentingan atas adanya *loonen* yang “*minimumloonen*”) — oleh karenanya, mempunyai kepentingan pula atas tetapnya pergaulan hidup kami ini dalam keadaan yang kocar-kacir, mempunyai belang atas tetapnya kami punya rumah tangga atau *Wirtschaft* itu bersifat “*Ernährungswirtschaft*” adanya!

[1] Dari statistik tahun 1928 itu diketahui, upah buruh laki-laki satu hari f 0,45, dan upah buruh wanita f 0,35. Bandingkan dengan harga beras waktu itu f 0,07 (7 sen) 1 kg dan upah terendah buruh menurut Pemda Jabar tahun 1982 Rp. 850,- satu hari.

[2] *Minimumlijdster* = Penderita paling parah.

[3] Bandingkan dengan keadaan masyarakat kita sekarang (1982) karena tidak ada pilihan lain, orang mau saja bekerja di pabrik, walau dengan upah Rp. 200,- sehari (pabrik rokok) atau Rp. 500,- sehari (buruh tani) di Jawa.

[4] *Ertragslohn* = upah terendah.

[5] *Erhaltungslohn* = upah sekedar tidak sampai mati kelaparan

[6] Walau ada usaha-usaha dan pemerintah Belanda memperbaiki kehidupan kaum tani, tapi perbaikan itu tidak menyentuh perombakan “kemiskinan strukturalnya”.

[7] Prof; Kees Boeck (1884-19):

Seorang ahli pendidikan Belanda yang menulis “*Het Zakelijke en persoonlijk element in de koloniale welvaartspolitiek*” (hal-hal yang wajar dan bersifat pribadi dalam politik kesejahteraan kolonial).

[8] Bandingkan dengan kehidupan kaum Marhaen tahun 1930 dengan pendapatan 8 sen sehari per jiwa, dengan upah Rp 850,- sehari dengan 5 orang (bapak, istri, dan 3 orang anak) di tahun 1982.

[9] *Ernährungswirtschaft*= susunan masyarakat yang kocar-kacir.

VII

Prof. Van Gelderen menulis:

“Apabila tenaga produksi dari penghasil Bumiputra bertambah besar dan oleh karenanya harga sewa tanahnya jadi lebih tinggi, maka dalam suatu cara perkebunan tertentu dari pengusaha-pengusaha Eropa, bertambah kurang keuntungan perusahaannya. Ini suatu pertentangan kepentingan yang tidak bisa dimungkiri, dan sekali-sekali terasa benar”. “Perbedaan hasil pekerjaan dalam hal dipergunakan pekerjaan orang Bumiputra dan dalam hal dipergunakan pekerjaan orang asing, buat sebagian besar menguntungkan pengusaha asing. Makin kecil perbedaan ini, disebabkan karena tenaga produksi pekerja Bumiputra dalam lingkungan sendiri bertambah besar (ini pada hakekatnya berarti tenaga produksi dalam pertanian Bumiputra), maka makin kecil pula sumber keuntungan yang lain dari perusahaan besar asing ini.”

Dan di dalam buku Prof. Schrieke *“The effect of Western Influence on native civilizations in the Malay Archipelago”*, kita membaca kalimat Tuan Meyer-Ranneft yang sekarang menjadi Ketua Dewan Rakyat:

“Jumlah yang diterima oleh kaum modal dan perusahaan industri, menjadi sebanding lebih besar dengan bertambah jeleknya tingkat kehidupan Bumiputra,”

Sedang Prof. Boeke dengan lebih terus-terang lagi berpidato:

“Mereka,— (kaum modal asing, Sk), terutama menjalankan rol ekonomi yang diharapkan oleh dunia dari tanah jajahan, mereka pandai mengeduk kekayaan dari Hindia pada umumnya dan dari bumi Hindia pada khususnya dan membikin negeri itu memberikan keuntungan-keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya, mereka itu terutama menghasilkan barang-barang yang diperlukan di pasar dunia dan mereka mengharap dan menuntut dari Hindia tidak lebih dari tanah yang baik dan tenaga buruh yang murah; penduduk bagi mereka tidak lebih dari suatu alat (ini yang mengenai penduduk tanah Jawa) atau penyakit yang perlu (ini yang mengenai penduduk di tanah seberang).[1] Buat mereka yang penting hanya... penawaran tenaga buruh dan harga tanah; apa yang menambah banyak penawaran dan menurunkan harga, menguntungkan bagi mereka. Mereka itu adalah, mereka harus jadi, apa yang disebut oleh

orang Jerman dengan tepatnya “*Real-politiker*”, harus mendahulukan kenyataan dan kesoalan, anasir cita-cita dan perseorangan buat mereka itu tidak sehat atau lebih lagi.”

Dengan lain perkataan: Kaum modal partikelir mempunyai kepentingan atas rendahnya tenaga produksi dan rendahnya tingkat pergaulan hidup kami, imperialisme-modern karena itu, mengalangi kemajuan sistem sosial kami itu, imperialisme-modern karena itu suatu rem bagi kami punya kemajuan ekonomi sosial!

Benar sekali, — imperialisme-modern “membikin rakyat Bumiputra menjadi bangsa yang terdiri dari kaum buruh belaka dan membikin Hindia menjadi si buruh di dalam pergaulan bangsa-bangsa”!

Dan si buruh yang bagaimana, Tuan-tuan Hakim!, — si buruh yang *loonen*-nya. *minimumloonen*, si buruh yang *Wirtschaft*-nya *Minimumwirtschaft*!, si buruh yang upahnya upah *Kokro*! Hati nasional tentu berontak atas kejahatan imperialisme-modern yang demikian itu!!

Lagi pula, — siapakah nanti yang bisa mengembalikan lagi kekayaan-kekayaan Indonesia yang diambil oleh *mijnberdrijven* partikelir, yakni perusahaan-perusahaan tambang partikelir, sebagai timah, arang batu, minyak! Siapakah nanti yang bisa mengembalikan lagi kekayaan-kekayaan tambang itu?

Musnah, musnahlah kekayaan-kekayaan itu buat selama-lamanya bagi kami, musnahlah buat selama-lamanya bagi pergaulan hidup Indonesia, masuk ke dalam kantong beberapa pemegang andil belaka![2]

“.....Perusahaan hasil tambang, yangblama-kelamaan menghabiskan kekayaan-kekayaan tambang itu,” begitulah Prof, Van Gelderen menulis.

“Juga di dalam hal ini, yang tinggal di dalam negeri hanya ongkos-ongkos produksi saja. Hasil bersihnya jatuh ke tangan pemilik modal asing.

Di dalam hasil bersih ini termasuk bukan saja bunga dan keuntungan pengusaha, tapi juga apa yang dinamakan “bunga pertambangan”, yakni pembayaran bagian monopoli yang tidak bisa diganti, bagian yang ada dalam penghasilan segala perusahaan tambang, yang mempunyai tenaga produksi yang lebih dari ‘batas tenaga produksi’.

Dengan jalan penghapusan dan pencadangan jumlah kapital yang ditanam dalam pertambangan bisa tetap dala tangan si pemilik. Tapi barang yang dikerjakan ini, yakni batu arang, minyak tanah, timah, musnah buat selama-lamanya”!

“Musnah buat selama-lamanya!” “*Onkerroepelijk verloren!*” Bahwasanya, “bangsa kaum buruh”, “*minimumloon*”, “*minimumlijdst*”, kemajuan ekonomi sosial direm”, “kekayaan tambang musnah buat selama-lamanya”, semua perkataan-perkataan itu tidak menggembirakan! Dan toh.....apakah hak-hak bangsa kami, yang kiranya boleh jadi “imbangan” dari keadaan ekonomi yang menyedihkan itu? Apakah hak-hak bangsa kami yang boleh dipakai sebagai obat di atas luka hati nasional yang perih itu? Pengajaran? Oh, di dalam “abad kesopanan” ini di dalam “*eeuw van beschaving*” ini, menurut angka-angka *Centraal Kantoor voor de Sfatistiek*, orang laki-laki yang bisa membaca dan menulis belum ada 7%, orang perempuan belum ada....1/2%. Dan toh, *Hollandsch-Inlandsch-Onderwijscommissie*[3] memajukan usul memberhentikan penambahan *Hollandsch-Inlandsch-Onderwijs!* – Pajak-pajak enteng? Laporan Meyer-Ranneft-Huender menunjukkan, bahwa Kang Marhaen yang pendapatnya setahun rata-rata hanya f 160.—itu, harus membayar pajak sampai kurang lebih 10% dari pendapatannya; bahwa bagi bangsa Eropa pajak yang setinggi itu baru dikenakan kalau pendapatannya tak kurang dari f 8.000,- sampai dengan f 9.000,- setahun!; bahwa pajak yang istimewa mengenai Kang Marhaen, yang pada tahun 1919 sudah mencapai jumlah f 86.900.000,-itu, di bawah pemerintahan Gubernur-Jenderal Fock[4] dinaikkan lagi menjadi f 173.400.000,- setahun!; bahwa teristimewa beban-beban desa sering berat sekali adanya!

Kesehatan rakyat atau hygiene? Di seluruh Indonesia hanya ada 343 rumah sakit gubernemen, kematian bangsa Bumiputra setahun tak kurang dari ±20%, ya, di dalam kota-kota besar sampai kadang-kadang 30, 40, 50%[5], seperti di betawi, di Pasuruan, di Makassar! Kesempatan bekerja di pulau-pulau luar tanah jawa? Soal kontrak dan *poenale sanctie*, perbudakan zaman baru atau *moderne slavernij* itu, seolah-olah takkan habis-habisnya di-“pertimbangkan” dan sekali lagi dipertimbangkan”,–

Perlindungan kepentingan kaum buruh? Peraturan yang melindungi kaum buruh tak ada sama sekali,*arbeidsinspectie* tinggal namanya saja, hak mogok, yang di dalam negeri-negeri yang sopon sudah bukan soal lagi itu, dengan adanya pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, musnah sama sekali dari *realiteit*, terhalimunkan sama sekali

menjadi impian belaka!—kemerdekaan cetak-mencetak dan hak berserikat dan berkumpul?...[6]

Tuan-tuan hakim, marilah kita dengan hati yang tenang dan tulus bertanya lagi: Adakah di sini bagi kami bangsa Indonesia kemerdekaan cetak, adalah disini hak, yang dengan sebenarnya boleh kita namakan hak berserikat dan berkumpul? Amboi,— adakah di sini hak-hak itu, di mana Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih saja berisi itu pasal-pasal mengenai penyebaran – rasa kebencian (*haatzaaiartikelen*) yang bisa diulur-ulur sebagai karet, itu *haatzaaiartikelen* yang hampir zonder perubahan diambil dari “*gewrocht der duisternis*”[7] sebagai Thorbecke menyebut peraturan cetak- mencetak, di mana “*horribel starfwetartikel*”[8] 153 bis-ter yang lebih-lebih elastis lagi mengancam keselamatan tiap-tiap pemimpin sebagai kami ini hari, dimana hak pendigulan memberi kekuasaan yang hampir tak terhingga kepada pemerintah terhadap tiap-tiap pergerakan dan tiap-tiap manusia yang ia tak sukai? Adakah di sini hak-hak itu, dimana kritik di muka umum gampang sekali mendapat teguran atau sopan, di mana tiap-tiap rapat penuh dengan spion-spion polisi, di mana hampir tiap-tiap pemimpin dibuntuti reserse di dalam gerak-geriknya ke mana-mana, di mana gampang sekali diadakan “larangan berapat”, di mana rahasia surat seringkali dilanggar diam-diam sebagai kami lihat dengan mata sendiri? Adakah di sini hak-hak itu, di mana laporan spion-spion itu saja atau tiap-tiap surat kaleng sudah bisa dianggap cukup buat membikin penggerebekan di mana-mana, mengunci berpuluh-puluh pemimpin di dalam tahanan, yang menjerumuskan pemimpin-pemimpin itu ke dunia pembuangan?

Tuan-tuan Hakim, marilah sekali lagi kita bertanya dengan hati yang tenang dan tulus: adakah di sini bagi bangsaku kemerdekaan cetak-mencetak dan hak berserikat dan berkumpul, dimana menjalankan “kemerdekaan” dan “hak” itu dialang-alangi oleh macam-macam alangan, diranjau oleh macam-macam ranjau yang demikian itu???

Tidak! Di sini tidak ada hak-hak itu! Dengan macam-macam alangan dan macam-macam ranjau demikian itu, maka “kemerdekaan” itu tinggal namanya saja “kemerdekaan” “hak” itu tinggal namanya saja, “hak”, dengan macam-macam serimpatan yang demikian, maka “kemerdekaan cetak-mencetak” dan “hak berserikat dan berkumpul” itu lantas menjadi suatu omong-kosong, suatu *paskwil*! Hampir tiap-tiap jurnalis sudah pernah merasakan tangan besinya hukum, hampir tiap-tiap pemimpin indonesia sudah pernah merasakan bui, hampir

tiap bangsa Indonesia yang mengadakan perlawanan radikal lantas saja dipandang “berbahaya bagi keamanan umum”!

Sesungguhnya: Tidak ada hak-hak yang orang berikan pada rakyat Indonesia untuk jadi “imbangan” kepada bencana pergaulan hidup dan bencana kerezekian yang ditebar-tebarkan oleh imperialisme-modern itu; tidak ada hak-hak yang orang berikan pada rakyat kami yang cukup nikmat dan menggemberikan untuk dijadikan pelipur hati nasional yang mengeluh melihat kerusakan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh imperialisme-modern itu; tidak ada hak-hak yang orang berikan pada rakyatku yang boleh dijadikannya sebagai pegangan sebagai penguat, sebagai *sterking* untuk memberhentikan kerja imperialisme yang mengobrak-abrik kerezekian dan pergaulan hidup kami itu!

[1] Pernyataan Prof.Boeke ini sekaligus membuyarkan teori, bahwa kedatangan orang Eropa ke Indonesia untuk “misi suci”.

[2] Sejak tahun 1931, Bung karno sudah mengingatkan akan musnahnya kekayaan yang tersimpan dalam bumi (tambang, minyak) oleh pengusaha-pengusaha tambang swasta.

[3] *Hollandsch-Inlandsch-Onderwijscommissie*= Komisi pengajaran Indonesia Belanda (sekolah-sekolah HIS, MULO dan AMS waktu itu).

[4] Fock, Gubernur Jenderal Hindia belanda, pada tahun 1919 menambah pendapatan bagi kas negara menaikkan lagi pajak, termasuk dari rakyat miskin.

[5] Dikutip dari statistik “*Jaaroverzicht*” 1928

[6] Negeri-negeri yang sopan dan mengenai paham demokrasi, kesopanan dan kedemokrasiannya tercermin adanya hak mogok bagi kaum buruh, kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan pers.

[7] *gewrocht der duisternis*= perangkap terselubung

[8] *horribel starfvetartikel*= pasal-pasal 153 bis, begitu mengerikan, merupakan pasal yang menaikkan bulu roma.

Pergerakan Di Indonesia

Soekarno

I

Pergerakan tentu lahir

Toh diberi hak-hak atau tidak diberi hak-hak; diberi pegangan atau tidak diberi pegangan; diberi penguat atau tidak diberi penguat, — **tiap-tiap makhluk, tiap-tiap umat, tiap-tiap bangsa tidak boleh tidak, pasti akhirnya berbangkit, pasti akhirnya bangun, pasti akhirnya menggerakkan tenaganya, kalau ia sudah terlalu sekali merasakan celaknya diri teraniaya oleh suatu daya angkara murka! Jangan lagi manusia, jangan lagi bangsa,— walau cacing pun tentu bergerak berkeluget-bkeluget kalau merasakan sakit!**

Seluruh riwayat dunia adalah riwayat golongan-golongan manusia atau bangsa-bangsa yang bergerak menghindarkan diri dari suatu keadaan yang celaka; seluruh riwayat dunia, menurut perkataan Herbert Spencer,[1] adalah riwayat “*reactief verzet van verdrukte elementen*”![2] Kita ingat pergerakan Yesus Kristus dan agama Kristen yang menghindarkan rakyat-rakyat Yahudi dan rakyat-rakyat Lautan Tengah dari bawah kaki burung Garuda Roma; kita ingat perjuangan rakyat Belanda yang menghindarkan diri dari bawah tindasan Spanyol; kita ingat pergerakan-pergerakan demokrasi kewargaan (*burgerlijke democratie*) yang menghindarkan rakyat-rakyat Eropa pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 dari bawah tindasan autokrasi dan absolutisme, kita menjadi saksi atas hebatnya pergerakan-pergerakan sosialisme yang mau menggugurkan takhta kapitalisme; kita mengetahui pergerakan rakyat Mesir di bawah pimpinan Arabi dan Zaglul Pasha[3] beserta pergerakan rakyat India di bawah pimpinan Tilak[4] atau Gandhi melawan ketamakan asing; kita mengetahui perjuangan rakyat Tiongkok menjatuhkan absolutisme mancu dan melawan imperialisme Barat; kita telah bertahun-tahun melihat seluruh dunia Asia bergelora sebagai lautan mendidih menentang imperialisme asing, — tidakkah ini memang sudah terbawa oleh hakikat keadaan, tidakkah ini memang sudah terbawa oleh nafsu mempertahankan dan melindungi diri atau nafsu *zelfbehoud*[5] yang ada pada tiap-tiap sesuatu yang bernyawa, tidakkah ini memang sudah “*reactief verzet van verdrukte elementen*” itu?

Rakyat Indonesia pun sekarang sejak 1908 sudah berbangkit; nafsu menyelamatkan diri sekarang sejak 1908 sudah menitis juga kepadanya! Imperialisme-modern yang mengaut-ngaut di Indonesia itu, imperialisme-modern yang menyebarkan kesengsaraan di mana-mana

itu, — imperialisme-modern itu sudah menyinggung dan membangkitkan musuh-musuhnya sendiri. Raksasa Indonesia yang tadinya pingsan seolah-olah tak bernyawa, **raksasa Indonesia itu sekarang sudah berdiri tegak dan sudah memasang tenaga! Saban kali ia mendapat hantaman, saban kali ia rebah, tetapi saban kali pula ia tegak kembali! Sebagai mempunyai kekuatan rahasia, sebagai mempunyai kekuatan penghidup, sebagai mempunyai aji-pancasona dan aji-candrabirawa, ia tidak bisa dibunuh dan malah makin lama makin tak terbilang pengikutnya!**

Amboi,— di manakah kekuatan duniawi yang bisa memadamkan semangat suatu bangsa, di manakahn kekuatan duniawi yang bisa menahan bangkitnya suatu rakyat yang mencari hidup, dimanakah kekuatan duniawi yang bisa membendung banjir yang digerakkan oleh tenaga-tenaga pergaulan hidup sendiri! Di manakah kebenaran jerita anggota-anggota dan sahabat-sahabat imperialisme yang mengatakan ini ialah bikinan beberapa kaum “penghasut”, yakni kaum “*opruiers*”[6] kaum “*raddraaiers*”,[7]kaum “*ophitsers*”[8] dan lain sebagainya dan yang oleh karenanya sama mengira bahwa pergerakan itu bisa dibunuh kalau “penghasutnya” semua dimasukkan bui, dibuang atau digantung? Puluhan, ratusan, ya, ribuan “penghasutnya” “*opruiers*” dan “*ophitsers*” sudah dibui atau dibuang,—tetapi adakah pergerakan itu berhenti, adakah pergerakan itu mundur, tidakkah pergerakan yang umurnya baru ± 20 tahun itu malahan semakin menjadi besar dan semakin menjadi umum?

“*Man totet den Geist nicht*”, begitulah Freiligrath menyairkannya,—“orang tak bisa membunuh semangat”! Di dalam tahun 1900, yakni sebelum di sini ada “*ophitsers*”, sebelum di sini ada “*raddraaiers*”, Ir. Van Kol sudah mendengarkan peringatannya di dalam *Tweede Kamer* demikian:

“Teruslah.....sampai sekali waktu tiba akhirnya; sekali waktu, siapa tahu entah kapan, pasti meledak kekuatan rahasia”

Dan sesungguhnya, “kekuatan rahasia” itu sudah meledak! Seluruh dunia sekarang melihat bangkit dan bergerakanya kekuatan rahasia itu!

Seluruh dunia yang tidak sengaja membuta-tuli, mengertilah, bahwa kekuatan rahasia itu bukan bikinan manusia, tetapi bikinan pergaulan hidup yang mau mengobati diri sendiri. Seluruh dunia yang tulus hati mengertilah, bahwa pergerakan ini ialah antitesa imperialisme yang terbikin oleh imperialisme sendiri. Bukan bikinan

“penghasut” bukan bikinan “*opruiers*”, bukan bikinan “*raddraaiers*”, bukan bikinan “*ophitsers*”—pergerakan ini ialah bikinan kesengsaraan dan kemelaratannya rakyat! Ir. Albarda di dalam *Tweede Kamer* memperingatkan: [9].

“Diantara mereka, yang berwajib atau merasa wajib membicarakan peristiwa-peristiwa zaman di muka umum, ada yang senang menggambarkan pergerakan Bumiputra dan perkembangannya sebagai hasil pikiran-pikiran revolusioner Barat dan yang mengira bahwa pergerakan itu bisa ditindas dengan jalan menghadapinya dengan kebijakan pemerintah yang keras dan dengan mengerahkan polisi dan justisi melawan propagandis-propagandisnya. Pemandangan dan taktik yang demikian itu sangat dangkal dan menunjukkan bahwa mereka tidak punya pengertian sejarah dan tidak punya pengertian politik... Pergerakan yang demikian itu terlahir dari keadaan-keadaan masyarakat dan dari perubahan-perubahan yang dialaminya. Pergerakan demikian itu juga akan lahir dan juga akan tumbuh, meskipun tidak pernah seorang Eropa yang revolusioner menjejakkan kakinya di Hindia. Pergerakan demikian itu, tumbuh terus, meskipun semua pemimpin dan propagandisnya dibasmi.

Seperti juga dalam abad ke-16 pergerakan *kerkhervorming*[10] tidak terhenti dengan memburu-buru kaum bid'ah, seperti juga dalam abad ke-19 demokrasi-sosial tidak bisa dihancurkan oleh politik penindasan dengan kekerasan oleh Bismarck, begitu juga dalam abad ke-20 pergerakan Bumiputra tidak bisa didorong ke belakang, bahkan tidak bisa diberhentikan oleh kebijaksanaan pemerintah yang reaksioner. Pergerakan itu tumbuh terus dan tidak usah diraguragukan, bahwa ia akan mencapai cita-citanya, yakni memerdekakan penduduk Hindia dari penjajahan asing!....”

Tuan-tuan Hakim barangkali berkata, “O, itu pandangan kaum sosialis!”

Jika demikian, marilah kita dengarkan Dr. Kraemer, seorang yang bukan sosialis, menulis dalam *Koloniale Studien*[11]

“Di sinilah juga letaknya keterangan, mengapa orang salah sangka sama sekali, apabila orang menyangka, bahwa apa yang disebut kebangunan dunia Timur itu atau di dalam lingkungan kita sendiri: pergerakan Bumiputra itu, hanya menjadi soal suatu lapisan

Intelektuan yang tipis dan jumlahnya sangat kecil. Mau tidak mau “rakyat murba yang diam itu” juga ikut mendidih dalam kancah pergolakan itu”,

dan Prof. Snouck Hurgronje, yang juga bukan kaum dogma, yang toh juga bukan kaum pembuta-tuli mengikuti sesuatu kepercayaan, tempo hari berkata:

“Sumbernya”.....dulu dan sekarang, bukan pemupukan beberapa ribu kaum intelektual, yang terlampau banyak mendapat pendidikan Barat dan tidak bisa ditampung oleh masyarakat Bumiputra, tapi rasa perlawanan di mana-mana terhadap penjajahan oleh orang-orang dari bangsa lain, rasa perlawanan yang kadang-kadang tampak keluar dan kadang-kadang tinggal terbenam.....”[12]

[1] Herbert Spencer (1820-1893); Seorang filusuf Inggris penganut empirisme.

[2] *reactief verzet van verdrukte elementen*= perlawanan terhadap elemen yang menindas.

[3] Arabi dan Zaglul Pasha, adalah pendiri partai Wafd di Mesir tahun 1918, diteruskan Mustafa Nahas Pasha dari 1927.

[4] Tilak, Bal Gangadhar (1894-1962): Politikus India yang bersama-sama Gandhi memimpin Partai Kongres, kemudian diteruskan oleh nehru.

[5] *Zelfbehoud*= menolong diri sendiri (mandiri).

[6] *Opruiers*= penghasut-penghasut

[7] *Raddraaiers*= biang keladi

[8] *Ophitsers*= penghasut-penghasut

[9] Ir. Albarda, seorang sosialis Belanda di Tweede kamer, memberi peringatan kepada pemerintahnya pada tanggal 19 desember 1919.

[10] *Kerkhervorming*= pembaharuan gereja (Protestan)

[11] Dr. Kraemer (1888-1962) seorang ahli orientalis yang berada di Indonesia antara tahun 1921-1937, kemudian menulis buku “Koloniale Studien”, hal.5.

[12] Dikutip dari “Colijn over Indie” hal.12.

Bahwasanya, matahari bukan terbit karena ayam jantan berkokok, ayam jantan berkokok karena matahari terbit! Dan dengan sedikit perubahan, maka kami dari sini, bagi kaum-kaum yang masih saja mengira bahwa pergerakan itu bikinan “penghasut” mengobarkan lagi api pidato Jean Jaures, kampiun buruh Prancis yang termashur itu, di dalam dewan rakyat Prancis terhadap wakil-wakil kaum modal:

“Ah, Tuan-tuan, alangkah anehnya Tuan-tuan sampai tersilaukan mata, dan mengatakan bahwa evolusi universal ini terjadi karena perbuatan beberapa orang saja! Tidakkah terkena hati Tuan-tuan oleh luasnya pergerakan kebangsaan sehingga terdapat di seluruh muka bumi? Dimana-mana, di semua negeri yang tidak merdeka, ia muncul pada waktu yang sama, semenjak sepuluh tahun yang kemudian ini, tidak mungkin lagi menggambarkan sejarah Mesir, India, Tiongkok, Filipina dan Indonesia dengan tidak juga menceritakan riwayat pergerakan nasional!... Dan di hadapan pergerakan umum yang menghela rakyat-rakyat Asia ini, rakyat-rakyat yang sangat berbeda satu sama lain, dalam iklim manapun mereka itu hidup, termasuk bangsa apa pun mereka itu,— di hadapan pergerakan yang demikian itulah Tuan-tuan bicara tentang beberapa orang Penghasut yang bertindak sendiri-sendiri. Tapi dengan menuduh seperti itu Tuan-tuan terlalu memberi penghormatan kepada orang-orang yang tuan tuduh, Tuan-tuan menganggap terlalu berkuasa orang-orang yang Tuan-tuan sebut penghasut itu. Bukanlah pekerjaan mereka sendiri meletuskan pergerakan yang demikian hebatnya; tarikan nafas lemah dari beberapa mulut manusia tidak cukup untuk meletuskan tofan bangsa-bangsa Asia ini!

Tidak, Tuan-tuan, yang sebenarnya ialah: pergerakan ini timbul dari pusat kejadian-kejadian sendiri; ia timbul dari penderitaan-penderitaan yang tidak terhitung banyaknya dan sampai sekarang tidak menghubungkan diri satu sama lain, tapi mendapatkan kata semboyannya dalam semboyan menyerukan merdeka. Yang sebenarnya ialah, bahwa juga di Indonesia pergerakan nasional itu terlahir dari imperialisme yang didewa-dewakan oleh Tuan dan tidak kurang-kurangnya dari sistem *drainage* ekonomi yang semenjak berabad-abad bekerja di negeri itu.....Imperialisme itulah penghasut

yang besar, imperialisme itulah penjahat besar yang menyuruh berontak: karena itu bawalah imperialisme itu ke depan polisi dan hakim!”^[1]

Benar sekali! “Bawalah imperialisme itu ke depan polisi dan hakim!”

Toh....bukan imperialisme, bukan anggota-anggota imperialisme, bukan sahabat-sahabat imperialisme, bukan Treub, bukan Trib, bukan Colijn, bukan Bruineman, bukan Fruin, bukan Ali Musa, bukan Wormser, yang kini berada di muka mahkamah tuan-tuan Hakim, – tetapi kami: Gatot Mangkoepradja, Maskoen, Soepriadinata, Soekarno!

Apa boleh buat, **biarlah nasib pemimpin begitu! Kami tidak merasa salah. Kami merasa bersih, kami tidak merasa melanggar hal-hal yang dituduhkan, sebagai nanti akan lebih jelas kami terangkan.** Kami oleh karena itu, memang mengharap-harap dan menunggu- tunggu Tuan-tuan punya putusan bebas, mengharap-harap moga- moga Tuan-tuan mengambil putusan *vrijspraak*^[2] adanya!

Tetapi, tuan-tuan Hakim, marilah kami melanjutkan kami punya pidato pembelaan.

“Ratu Adil”, “Heru Cakra”, dan lain sebagainya

Pergerakan rakyat Indonesia bukanlah buatan kaum “penghasut”. Juga sebelum ada “penghasut” itu, jugazonder ada “penghasut” itu, udara Indonesia sudah penuh dengan hawa kesedihan merasakan kesengsaraan dan oleh karenanya, penuh pula dengan hawa keinginan menghindarkan diri dari kesengsaraan itu. Sejak berpuluh-puluh tahun udara Indonesia sudah penuh dengan hawa-hawa yang demikian itu. Sejak berpuluh-puluh tahun rakyat Indonesia itu hatinya selalu mengeluh, hatinya selalu menangis menunggu-nunggu datangnya wahyu yang akan menyalakan api pengharapan di dalamnya, menunggu-nunggu datangnya mantarm yang bisa menyanggupkan sesuap nasi dan sepotong ikan dan sepotong ikan kepadanya. Haraplah pikirkan, Tuan-tuan hakim, apakah sebabnya rakyat senantiasa percaya dan menunggu-nunggu datangnya “Ratu Adil”, apakah sebabnya sabda Prabu Jayabaya sampai hari ini hari masih terus menyalakan harapan rakyat, –apakah sebabnya seringkali kita mendengar bahwa di desa ini atau di desa itu telah muncul

seorang “Imam Mahdi”, atau “Heru Cakra”, atau turunan seorang dari Wali-Sanga. Tak lain tak bukan ialah oleh karena hati rakyat yang menangis itu,” tak berhenti-hentinya, tak habis-habisnya menunggu-nunggu atau mengharap-harapkan “datangnya pertolongan, sebagaimana orang yang berada dalam kegelapan tak berhenti-hentinya pula saban jam, saban menit, saban detik, menunggu-nunggu dan mengharap-harap: “kapan, kapankah matahari terbit?”

O, siapa yang mengerti akan sebab-sebab yang lebih dalam ini, siapa yang mengerti akan *diepere ondergrond*[3] dari kepercayaan rakyat ini, sebagaimana yang diterangkan pula oleh Prof. Snouck Hurgronje di dalam brosurnya “Vergeten Jubiles”[4], tentu sedih dan ikut menangislah hatinya, kalau ia saban kali mendengar suara rakyat meratap: “Kapan, kapankah Ratu Adil datang?”—tentu sedih dan menangislah hatinya pula dan tidak tertawa, jikalau ia saban kali melihat lekasnya dan setianya rakyat menyerahkan diri ke dalam tangan seorang kyai atau dukun yang menyebutkan diri “Heru Cakra” atau “Ratu Adil”!

“Selama kaum intelek Bumiputra belum bisa mengemukakan keberatan-keberatan bangsanya, maka “perbuatan-perbuatan yang mendahsyatkan” itu (yakni pemberontakan, Sk) adalah peledakan yang sewajarnya dari kemarahan yang disimpan-simpan dan perlawanan yang ditekan-tekan terhadap usaha yang bodoh untuk memerintah rakyat dengan tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh keinginan dan kepentingan-kepentingan mereka dan membikannya jadi pedoman. Sebagaimana sekarang golongan-golongan besar dari bangsa Bumiputra senantiasa bersedia untuk dengan terus terang memihak kepada salah seorang intelektual bangsanya sendiri, yang dirasanya memperjuangkan kepentingannya, meskipun mereka itu “belum matang” untuk mengerti semua teori-teorinya, demikianlah mereka seringkali suka mengikuti pemimpin-pemimpin yang menjanjikan kepada mereka kemerdekaan yang bisa diperoleh dengan jalan rahasia dan dengan cara-cara rahasia, atau yang dengan cara sembunyi mengerahkan tentara untuk perang sabil dengan kaum kafir, bilamana ada kesempatan baik. Bahwa percobaan-percobaan yang demikian itu sia-sia saja, karena alat-alat untuk membuka jalan sama sekali tidak cukup, mereka tidak mengerti, dan demikianlah mereka menganggap setiap orang yang menjanjikan kepada mereka Ratu Adil, atau Mahdi atau pemerintahan yang adil, adalah nabi. Syarat-

syarat hidup yang perlu, yang menurut perasaannya tidak diberikan kepadanya oleh alam, oleh jalannya keadaan yang biasa, atau oleh penjajahan asing, mereka coba mencapainya dengan jala gaib yang luar biasa...dengan kepercayaan akan mendapat pertolongan tuhan,”

begitulah kata Prof. Snouck Hurgronje.

Dan sebagaimana sang kiai atau sang dukun itu bukan pembikin dari kepercayaan umum dan harapan umum atas kedatangan ratu Adil atau Heru Cakra itu, sebagaimana mereka mendapat pengaruh itu ialah, hanya oleh karena rakyat umum hatinya memang menangis mendoa-doa dan menunggu-nunggu datangnya Ratu Adil atau Heru Cakra itu, maka kami yang disebut “penghasut” bukanlah pula pembikin pergerakan rakyat sekarang ini dan bukanlah pula pengaruh kami itu terjadinya ialah oleh karena licinnya kami punya lidah atau tajamnya kami punya pena.

Pergerakan rakyat adalah bikinan kesengsaraan rakyat, pengaruh kami diatas rakyat adalah pula bikinan kesengsaraan rakyat! Kami hanyalah menunjukkan jalan; kami hanyalah mencarikan bagian- bagian yang rata dan datar untuk aliran-aliran yang makin lama makin membanjir itu;— kami hanyalah menunjukkan tempat-tempat yang harus dilalui oleh banjir itu, agar supaya banjir itu bisa dengan sesempurna-sempurnanya mencapai Lautan Keselamatan dan Lautan Kebesaran adanya.....

[1] Dikutip dari pidato Jean Jaures (1859-1914) di Parlemen Prancis, tanggal 23 September 1903, “Rapport Jean Jaures” hal. 25, dengan sedikit perubahan.

[2] *Vrijspraak*= bebas dari tuntutan

[3] *diepere ondergrond*= rahasia yang lebih dalam

[4] *Vergeten Jubile's*= peringatan ulang tahun yang dilupakan

Partai Nasional Indonesia

Kami punya asas tentang “Kemerdekaan Indonesia”

Tempat yang harus dilalui? Manakah tempat-tempat yang harus dilalui? Partai Nasional Indonesia dengan sepenuh-penuhnya keyakinan menjawab: tempat-tempat yang berjajar-berjajar menuju ke arah Indonesia Merdeka! Sebab dibelakang Indonesia Merdeka itulah tampak kepada mata PNI keindahan Samudra Keselamatan dan samudra kebesaran itu, di belakang Indonesia Merdeka itulah tampak kepada mata PNI sinar hari kemudian yang melambai-lambai!

Inilah pokok keyakinan PNI, sebagai yang tertulis di dalam buku keterangan asasnya: **“Partai Nasional Indonesia berkeyakinan, bahwa syarat yang amat penting untuk perbaikan kembali semua susunan pergaulan hidup Indonesia itu, ialah kemerdekaan nasional. Oleh karena itu, maka semua bangsa Indonesia terutama haruslah ditujukan ke arah kemerdekaan nasional itu.”**

Dengan bahasa Belanda: *de nationale vrijhed als zeer belangrijke voorwaarde tot de nationale reconstructie!*

Berlainan dengan banyak partai-partai politik lain, yang mengatakan “perbaikilah dulu rumah tangga, nanti kemerdekaan datang sendiri”;— berlainan dengan partai-partai lain, yang menganggap kemerdekaan itu sebagai buahnya perbaikan rumah tangga, — maka PNI berkata: “Kemerdekaan nasional usahakanlah, sebab dengan kemerdekaan nasional itulah rakyat akan bisa memperbaiki rumah tangganya dengan tidak terganggu, yakni dengan sesempurna-sempurnanya”, —PNI berkata, *“De-volkomen nationale reconstructie allen mogelijk na wederkomst der nationale onafhankelijkheid”*.

Tuan-tuan Hakim, sepanjang keyakinan kami, asas PNI yang demikian ini dalam hakikatnya tidak beda dengan asas perjuangan kaum buruh di Eropa dan Amerika, tidak beda dengan asas yang mengatakan bahwa untuk melaksanakan sosialisme, kaum buruh itu harus lebih dulu mencapai kekuasaan pem erintahan.

“Kaum proletar hanya bisa mematahkan perlawanan kaum modal terhadap usaha membikin alat-alat perusahaan

partikelir menjadi milik umum, dengan mengambil kekuasaan politik. Untuk maksud ini, kaum buruh seluruh dunia, yang telah menjadi insaf akan kewajibannya dalam perjuangan kelas, menyusun diri,”

begitulah bunyi paragraf 11 dari keterangan *asas Sociaal Democratische Arbeiders Partij*. [1]

Nah, buat suatu rakyat jajahan, buat suatu rakyat yang di bawah imperialisme bangsa lain, hakikat perkara sepanjang keyakinan kami, tidaklah lain. Buat suatu rakyat yang dibencanai oleh imperialisme, buat usaha rakyat itu melawan bencana imperialisme itu, perlu sekali pula “kekuasaan politik” dicapainya. Buat rakyat yang demikian itu, kalimat tadi mendapat variasi:

“Rakyat yang dijajah hanya bisa mematahkan perlawanan kaum imperialisme terhadap pekerjaan memperbaiki kembali semua susunan pergaulan hidup nasionalnya, dengan mengambil kekuasaan pemerintahan, yakni dengan mengambil kekuasaan politik.”

Dan apakah artinya “kekuasaan politik” bagi suatu rakyat jajahan? Apakah artinya “kekuasaan pemerintahan”, apakah artinya “mengambil kekuasaan pemerintahan” bagi suatu rakyat jajahan? Mencapai Kekuasaan politik bagi suatu rakyat jajahan adalah berarti mencapai pemerintahan nasional, mencapai kemerdekaan nasional, — mencapai hak untuk mengadakan undang-undang sendiri, mengadakan aturan-aturan sendiri, mengadakan pemerintahan sendiri!

Nah, Partai Nasional Indonesia ingin melihat rakyat Indonesia bisa mencapai kekuasaan politik itu, Partai Nasional Indonesia tidak **tedeng aling-aling** mengambil kemerdekaan nasional itu sebagai maksudnya yang tertentu. Partai Nasional Indonesia mengerti, — atau lebih benar: kami mengerti, — bahwa mengejar kekuasaan politik, jadi, mengejar kemerdekaan nasional itu, adalah konsekuensi dan *voorwaarde*, [2] buntut dan syarat, bagi suatu perjuangan kontra imperialisme itu adanya.

Sebagai di negeri barat kaum kapitalis mengusahakan kekuasaan politiknya mempengaruhi rumah tangga negara menurut mereka punya kepentingan, sebagaimana kaum kapitalis itu mengusahakan

kekuasaan politiknya untuk mengadakan aturan-aturan rumah tangga negara yang menguntungkan mereka punya kepentingan dan meniadakan aturan-aturan yang merugikan mereka punya kepentingan,—sebagaimana kaum kapitalis itu mengusahakan mereka punya kekuasaan politik untuk menjaga dan memelihara kapitalisme—, maka di suatu negeri jajahan, kaum imperialisme mengusahakan kekuasaan politiknya pula untuk mempengaruhi rumah tangga negara menurut mereka punya kepentingan, yakni menurut kepentingan sistem imperialisme! Olah karena pengaruh itu, maka hampir tiap aturan yang penting di dalam suatu negeri jajahan bersifat menguntungkan kepentingan kaum imperialisme itu, sesuai dengan kepentingan kaum imperialisme itu. Hampir tiap-tiap aturan yang penting di dalam suatu negeri jajahan adalah bersifat untuk penjajahan itu, untuk imperialisme itu.

Oleh sebab itu, maka, selama suatu negeri masih bersifat jajahan, ya, lebih jauh lagi: selama suatu negeri masih bersifat “protektorat” ataupun “daerah mandat”, — pendek kata selama suatu negeri masih belum sama sekali leluasa mengadakan aturan-aturan rumah tangga sendiri, — maka sebagian atau semua aturan-aturan rumah tangganya, mempunyai “cap” yang imperialistis adanya. Artinya: **selama rakyat belum mencapai kekuasaan politik atas negeri sendiri, maka sebagian atau semua syarat-syarat hidupnya, baik ekonomi maupun sosial maupun politik, diperuntukkan bagi kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingannya, bahkan bertentangan dengan kepentingannya.** Ia adalah seolah-olah terikat kaki dan tangannya, tak bisa leluasa berjuang melawan daya-daya imperialisme yang membencanainya, tak bisa leluasa berjuang mengalangi syarat-syarat hidupnya diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain, tak bisa leluasa berusaha memperuntukkan syarat-syarat hidupnya itu bagi perikehidupan ekonominya sendiri, perikehidupan kebudayaannya. Ia pendek kata, tak bisa leluasa berusaha melawan dan memberhentikan imperialisme, tak bisa pula leluasa menyubur-nyuburkan badan sendiri[3]

Rakyat jajahan adalah rakyat yang tak bisa “menemukan diri sendiri”, suatu rakyat yang tak bisa “*zichzelf*” (berpribadi sendiri), suatu rakyat yang hampir semua apa-apanya kena “cap” yang imperialistis itu, — “cap” yang terjadinya ialah oleh pengaruh besar dari kaum imperialisme adanya. Tidak ada persamaan kepentingan

antara kaum imperialisme dan kaum yang di bawah imperialisme; tidak ada *belangengetneenschap*[4] antara kedua pihak itu. Antara kedua pihak itu ada pertentangan kepentingan, ada pertentangan kebutuhan, — *adategenstelling van belangen*[5] ada *conflict van behoeften*. [6] Semua kepentingan kaum imperialisme, baik ekonomi, maupun sosial, baik politik maupun yang berhubungan dengan kebudayaan umumnya, semua kepentingan kaum imperialisme itu, adalah bertentangan, *tegengesteld* dengan kepentingan Bumiputra. Kaum imperialisme sebisa-bisanya mau meneruskan adanya penjajahan, — orang Bumiputra sebisa-bisanya mau memberhentikan penjajahan itu. Aturan-aturan yang diadakan di bawah pengaruh kaum imperialisme, adalah karena itu bertentangan dengan kepentingan Bumiputra itu adanya.

Meskipun demikian, Bumiputra menerima saja aturan-aturan itu? Meskipun demikian Bumiputra menghormati aturan-aturan itu? O, memang, Bumiputra menerima saja aturan-aturan itu, Bumiputra menghormati aturan-aturan itu. Tetapi mereka menerimanya dan menghormatinya itu, ialah hanya oleh karena Bumiputra kalah, hanya oleh karena Bumiputra terpaksa menerimanya dan terpaksa menghormatinya!

Bukankah justru kekalahan ini sebabnya maka mereka dijajah?

Bukankah justru kekalahan yang memaksa mereka menjadi rakyat, jajahan? Jules Harmand, Ambassadeur Honoraire dan ahli jajahan bangsa Prancis, dalam bukunya yang termashur “*Domination et Colonisation*”, menulis dengan terang-terangan:

“Tentu saja bisa kejadian, bahwa kepentingan orang Bumiputra kebetulan sama dengan kepentingan si penjajah; tapi ini jarang sekali kejadian. Biasanya....kepentingan-kepentingan itu bertentangan satu sama lain.” “Kedua pikiran “penjajahan” dan “kekerasan” atau sekurang-kurangnya “paksaan”, adalah bergandengan satu sama lain, atau isi-mengisi. Tergantung kepada tempat, keadaan dan tingkah laku, kekerasan itu boleh nyata atau kurang nyata, atau sedang saja, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, —tapi penggunaannya tidak pernah bisa dihilangkan. Pada hari paksaan hilang, berakhirlah pula penjajahan.” [7]

Adakah pengakuan yang lebih terang-terangan, adakah ketulusan hati yang lebih tulus? Sesungguhnya kita tidaklah berdiri sendiri,

kalau kita mengatakan bahwa oleh adanya pertentangan kepentingan itu, tiap-tiap sistem atau aturan jajahan, adanya diterima dan dihormati rakyat jajahan itu, hanya karena mereka terpaksa menerima dan terpaksa menghormatinya belaka,—terpaksa, yakni tidak dengan senang hati, tidak dengan rela hati, tidak dengan kemufakatan yang sebenar-benannya, tidak dengan persetujuan yang sepuuh-penuhnya!

[1] Paragraf 11 itu adalah leidsch program (program dasar) dari *Sociaal Democratische Arbeiders Partij*.

[2] *Voorwaarde*= syarat

[3] Menurut keyakinan kami, hilangnya pemerintahan asing dan Indonesia, belum tentu juga dibarengi oleh hilangnya imperialisme asing sama sekali. Imperialisme yang “*overheersen* (memerintah) hilang, tetapi imperialisme yang *beheersen* (menguasai), lenyapnya baru kemudian. (lihat Tiongkok).

[4] *Belangengetneenschap*= persamaan kepentingan.

[5] *tegenstelling van belangen*=pertentangan kepentingan

[6] *conflict van Behoeften*= pertentangan kebutuhan.

[7] Jules Harmand, duta besar kehormatan dan ahli jajahan bangsa Prancis dalam bukunya yang termashur “*Domination et Colonisation*” hal. 122, (terbitan E. Flammarion, Paris 1910).

II

Tiap-tiap rakyat jajahan ingin merdeka

Oleh karena itulah, Tuan-tuan Hakim, maka tidka ada satu rakyat negeri jajahan yang tindak ingin merdeka, tidak ada satu rakyat jajahan yang tak mengharap-harapkan datangnya hari kebebasan. Jikalau Partai Nasional Indonesia mendengung-dengungkan semboyan “mencapai kekuasaan politik” itu, jikalau Partai Nasional Indonesia mengobar-ngobarkan semangat ingin merdeka itu, maka ia hanyalah mengemukakan cita-cita umum belaka. Kemerdekaan adalah syarat yang amat penting baginya untuk bisa melawan dan memberhentikan imperialisme itu dengan seluas-luasnya. Kemerdekaan adalah pula syarat yang amat penting bagi pembaikan kembali segala susunan pergaulan hidup suatu negeri bekas jajahan, suatu syarat yang amat penting bagi rekonstruksi nasionalnya.

Ya, kemerdekaan adalah syarat yang amat penting bagi kesempurnaan rumah tangga tiap-tiap negeri, tiap-tiap bangsa, baik bangsa timur maupun bangsa Barat, baik bangsa kulit berwarna maupun bangsa kulit putih. Tiada satu bangsa bisa mencapai kebesaran *zonder* kemerdekaan nasional, tidak ada satu negeri bisa menjadi teguh dan kuasa, umpama ia tidak merdeka. Sebaliknya, tiada satu negeri jajahan yang bisa mencapai keluhuran, tiada satu negeri jajahan yang bisa mencapai kebesaran itu. Oleh karena itu, maka tiap-tiap bangsa jajahan ingin akan kemerdekaan itu, ingin supaya bisa mencapai kebesaran itu.

Tiap-tiap rakyat yang tak merdeka, tiap-tiap rakyat yang karena itu, tak bisa dan tak boleh mengatur rumah tangga sendiri secara kepentingan dan kebahagiaan sendiri, adalah hidup di dalam suasana yang rusuh, yakni hidup di dalam suasana yang kami sebutkan tadi, hidup di dalam suatu “*permanente onrust*”, kerusakan yang terus-menerus, yang disebabkan oleh tabrakan daya-daya yang saling bertentangan itu, — suatu keadaan yang tidak boleh tidak menimbulkan pula keinginan keras akan hilangnya pertentangan-pertentangan itu, yakni keinginan keras akan berhentinya ketidakmerdekaan itu tadi. Dari Maroko sampai Filipina, dari Korea sampai Indonesia melancar-lancar kemana-mana melalui gunung dan samudra, terdengarlah suara yang memanggil-manggil kemerdekaan

itu,— bukan saja dari mulut rakyat-rakyat yang baru saja merasakan pengaruh imperialisme, tetapi juga, ya, malahan terutama, dari mulut bangsa-bangsa yang sudah berabad-abad tak menerima cahaya matahari kebesaran.

“Sekalipun sudah berabad-abad mereka menjajah.....begitulah Jules Harmand menulis lagi:

“Sekalipun sudah berabad-abad mereka menjajah....., adalah suatu kebodohan apabila si penjajah itu sudah menyangka bahwa ia dicintai, — butalah ia apabila menyangka bahwa masyarakat yang dijajah itu merasa senang mengalami penjajahannya”.....”Bagaimanapun juga lemahnya atau merosotnya, bagaimanapun juga biadabnya disangka orang bangsa yang terjajah itu, — bagaimanapun juga jahatnya kaum ningratnya, atau sebaliknya, bagaimanapun juga beradabnya mereka itu dalam tingkah lakunya dan bagaimanapun juga tajam otaknya dianggap orang.....mereka itu akan memandang kepergian atau hilangnya penjajahan asing selalu sebagai suatu pembebasan”. [1]

Mengertikah orang sekarang, apa sebabnya Prabu Jayabaya yang menujumkan kemerdekaan itu, terus hidup saja berabad-abad dalam hati rakyat? Mengertikah orang sekarang, apa sebabnya di dalam tiap-tiap surat kabar Indonesia, di dalam tiap-tiap rapat bangsa Indonesia,— juga kalau kami yang disebut “penghasut” tidak menghadirinya! —, sebentar-sebentar terbaca atau terdengar perkataan “merdeka”? mengertikah orang sekarang, apa sebabnya sampai partai-partai politik yang paling sabar atau sedangpun, misalnya Budi Utomo dan Pasundan, yang toh terang sekali bukan perkumpulan kaum “penghasut”, juga sama mengambil cita-cita Indonesia Merdeka, sebagaimana disyaratkan bagi penerimaan menjadi anggota PPPKI?

Partai Nasional Indonesia hanyalah lebih terang mengemukakan cita-cita itu; Partai Nasional Indonesia hanyalah lebih tentu mengutamakan kemerdekaan nasional itu, menjunjung kemerdekaan nasional itu sebagai syarat yang amat penting bagi perbaikan kembali semua susunan pergaulan hidup Indonesia yang sekarang kocar-kacir ini, dan bagi bisa berhasilnya perjuangan menghentikan imperialisme itu! Sebab, sebagai yang kami terangkan tadi, Partai Nasional Indonesia mengambil soal jajahan itu di dalam hakikat yang sedalam-dalamnya, mengambil

soal jajahan itu terus ke dalam pokok-pokoknya, — mengambil soal jajahan itu di dalam filsafatnya yang sebenar-benarnya, yakni filsafat,— kami ulangi lagi—, bahwa di dalam tiap-tiap sistem jajahan adalah pertentangan kepentingan antara kaum imperialisme dan kaum Bumiputra; bahwa di dalam tiap-tiap sistem jajahan umumnya, keadaan-keadaan adalah dipengaruhi, di-“cap”-kan, diperuntukkan bagi kepentingan-kepentingan imperialistis; — bahwa karena itu, di dalam sistem jajahan mana pun juga, kepentingan Bumiputra tak bisa terpelihara sesempurna-sempurnanya.

Dalil –dalil pemimpin-pemimpin negeri lain

Dan juga dalam keyakinan ini, Partai nasional Indonesia tidak berdiri sendiri. Juga di dalam keyakinan ini, Partai Nasional Indonesia mendapat pembenaran di dalam ujaran-ujaran pemimpin besar di negeri-negeri lain. Jikalau Mustafa kamil[2] dari Mesir menulis, bahwa “suatu bangsa yang tak merdeka sebenarnya adalah suatu bangsa yang tak hidup”, jikalau Manuel Quezon[3] dari Filipina berkata bahwa “lebih baik *zonder* Amerika ke neraka daripada dengan Amerika ke surga”, jikalau Patrick Hendry dari Amerika dulu berteriak: “Berikanlah padaku kemerdekaan, atau berikanlah padaku maut saja” – maka itu bukanlah jerit budi pekerti yang “panas” belaka, tetapi di dalam hakikatnya mereka tidak lain daripada mengutamakan kemerdekaan nasional itu. Jikalau kita membaca pemimpin Irlandia, Michael Davitt, menulis:

“Baik keselamatan, baik bujukan maupun undang-undang yang menguntungkan, tidak akan memuaskan bangsa Ir, jika kami tidak mendapat hak untuk memerintah negeri kami sendiri”,[4].

Ya, jikalau kita membaca bahwa seorang pemimpin Irlandia lain Erskine Childers, menolak tingkat *free-statedan* menuntut kemerdekaan sepenuh-penuhnya dengan perkataan:

“Kemerdekaan bukanlah soal tawar-menawar, kemerdekaan adalah sebagai maut: dia ada atau dia tidak ada. Kalau orang mengurangnya, maka itu bukan kemerdekaan lagi”,[5]

–tidakkah itu dalam hakikatnya suatu pembenaran pula dari kami punya pendirian itu? Tetapi, perhatikanlah perkataan-perkataan Jozef Mazzini, Bapak Rakyat Italia, yang lebih terang lagi:

“Membangunkan tanah air ini, malahan adalah suatu kemustian. Penguatan hati dan jalan-jalan yang saya bicarakan tadi itu, hanya bisa datang dari suatu tanah air yang bersatu padu dan merdeka. Keadaan masyarakat kamu hanya bisa menjadi baik, apabila kamu ikut serta dalam kehidupan politik bangsa-bangsa.” Janganlah tertipu oleh pikiran, bahwa keadaan kebendaanmu akan menjadi baik, dengan tidak menyelesaikan lebih dulu soal nasional; kamu tidak akan berhasil dalam hal itu.”[6]

dan perhatikanlah pula perkataan-perkataan Sister Nivedita, yang mengutamakan kemerdekaan nasional itu buat suburnya hidup kebatinan dan hidup kesenian, di dalam buku Okakura: “Die Ideale des Ostens”:

“Seni hanyalah bisa berkembang pada bangsa-bangsa yang hidup merdeka. Dia, sebenarnya adalah alat yang hebat dan buah Rasa-Suci dari kemerdekaan, yang kita sebut keinsafan kebangsaan”.[7]

Ini adalah ucapan-ucapan belaka. Prakteknya?

Marilah kita misalnya mendengarkan pidato Dr. Sun Yat Sen tentang San Min Chu I, di mana Bapak Rakyat Tiongkok ini, sudah menunjukkan bahwa Tiongkok sebenarnya tidak mempunyai kemerdekaan nasional yang sejati, melainkan malahan adalah suatu “*hypo-colony*”[8] menggambarkan terganggunya rumah tangga Tiongkok itu dengan kata-kata:

“Tatkala Tiongkok berdiri atas dasar politik yang sama dengan lain-lain bangsa, ia bisa bersaing dengan merdeka di lapangan ekonomi dan sanggup dengan tidak membuat kesalahan mempertahankan dirinya sendiri. Tetapi baru saja bangsa-bangsa asing mempergunakan kekuasaan politik sebagai tameng bagi maksud-maksud ekonomi, maka Tiongkok pun kehilangan kemampuannya untuk mempertahankan diri atau bersaing dengan mereka dengan berhasil.”[9]

Dan sekarang, sesudah kemerdekaan nasional negeri Tiongkok itu makin lama makin teguh, maka ahli pikir Inggris H.C. Wells, menulis:

“Pada zaman sekarang ini bisa jadi, bahwa lebih banyak tenaga otak yang baik dan lebih banyak orang yang sungguh hati bekerja untuk membikin modern dan menyusun kembali peradaban Tiongkok, daripada yang demikian itu kita jumpai di bawah pimpinan bangsa Eropa mana pun juga”.^[10]

[1] Ibid hal 154

[2] Mustafa Kamil (1857-1908) seorang pemimpin nasionalis Mesir yang besar jasanya bagi perjuangan kemerdekaan.

[3] Manuel Quezon (1878-1944), salah seorang pejuang kemerdekaan Filipina, dan penulis buku “The Good Fight”.

[4] Michael daviit, seorang pemimpin Irlandia, dikutip dari buku Yann Morvran Goblet “*L’Irlande dans la Crise Universalle*” hal. 45 (terbitan F.Alcan, Paris 1918), hal.45.

[5] Erskine Childers, seorang pemimpin Irlandia lainnya, dikutip dari buku Simon Tery “*En Irlande de la guerre*” hal.101

[6] Guiseppe Mazani (1805-1872) pemimpin pemersatu Italia bersama Cavour dan Garibaldi. Buku yang dikutip “*De Plichten Van den Mensch*” hal. 171-179.

[7] Sister Nivedita, seorang penyair wanita Jepang. Ia menulis buku “*Kaka-su Okakura*” “Die Ideale des Osten” hal.8

[8] *hypo-colony*= negeri yang lebih jajahan dari jajahan.

[9] Sun Yat Sen (1866-1925) Bapak Kemerdekaan Tiongkok, pendiri Partai Kuo Min Tang dan pencetus “Trisila” (San Min Chu I) yang dibukukan dengan judul “*San Min Chu I*”. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

[10] H.G. Wells dalam bukunya “*The Outline of History*” hal. 464.

III

Dan prakteknya di Indonesia? Adakah prakteknya di sini membenarkan keyakinan PNI, bahwa negeri yang tak merdeka itu memang segala atau sebagian daripada aturan-aturan dan syarat-syarat hidupnya dipengaruhi, di-capkan, diperuntukkan bagi kepentingan-kepentingan imperialistis, yang bertentangan dengan Bumiputra itu? Prakteknya di sini membenarkan dengan sepenuhnya! Kita lihat, bahwa untuk sempurnanya usaha imperialisme-perindustrian di sini, masyarakat kita diproletarkan, kita dijadikan “rakyat kaum buruh”; kita mengetahui, bahwa kaum imperialisme yang butuh akan tanah murah dan kaum buruh murah itu, sebagai diterangkan oleh Prof. Van Gelderen, mempunyai kepentingan di dalam rendahnya tenaga produksi kita punya pergaulan hidup, jadi, dengan sengaja pula merendahkan tenaga produksi itu dan melawan keras tiap-tiap usaha bangsa Bumiputra yang mau menaikkan tenaga produksi itu. Lihatlah,—jikalau kita mau memajukan perusahaan kita, kebun teh dan pabrik teh, jikalau kita mendirikan Bank Nasional[1] di Surabaya, jikalau kita mau mendirikan suatu maskapai perkapalan Indonesia, maka kaum imperialisme itu menjadi geger perkara “gerakan elit” itu, geger perkara niat pemerintah mau memberikan hak hubungan kredit pada Bank Nasional itu, geger memaki-maki di dalam pers dan di kalangan pelayaran atas maksud mendirikan maskapai perkapalan itu. Dan kita lihat kaum imperialisme itu, sebagai yang kami telah kemukakan di dalam pemeriksaan, menjalankan pengaruhnya, *invloed-nya*, ya tiraninya atas pemerintahan, sebagai yang dimarahkan oleh Prof. Snouck Hurgronje, dengan kata-kata:

“.....perlulah, bahwa kekuasaan yang tertinggi itu dihormati oleh mereka (oleh kaum majikan, Sk.), sama dihormati mereka seperti pangreh praja Bumiputra menghormatinya, yang menurut kata Colijn, senantiasa mengarahkan satu mata ke Bogor. Memang, dalam waktu yang akhir-akhir ini kebanyakan mereka mengarahkan kedua-dua matanya ke sana, akan tetapi bukan untuk menuruti petunjuk-petunjuk, tapi untuk mengemukakan mereka punya tuntutan-tuntutan, yakni supaya susunan dan kerjanya mesin pemerintahan sesuai dengan mereka punya kemauan. Ini juga suatu macam revolusi.”[2]

Kita lihat kaum imperialisme itu mempengaruhi pemerintah mengadakan politik tarip yang menguntungkan baginya, sebagai tertulis dala AID de Preangerbode beberapa bulan yang lalu di bawah kepala: “*Vrijhandelbinnen het rijk is instrijd met het belong van Nederland en van Indie*”; kita lihat bagaimana di sini ada suatu aturan pajak, yang sebagai ditunjukkan oleh komisi Meyer-Ranneft-Huender, enteng sekali bagi kaum Eropa dan berat sekali bagi kaum Indonesia; kita lihat bagaimana di sini ada bea karet, yang mengenai karet Bumiputra saja, sehingga suburnya mendapat rintangan besar; kita lihat bagaimana di sini ada itu aturan kuli kontrakan beserta *poenale sanctienya*, yang sama sekali hanya menguntungkan kaum modal belaka! Kita lihat adanya suatu undang-undang pelindung kaum buruh dan adanya pasal 161 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang juga melulu berarti untungnya kaum kapital, celaknya kaum buruh; kita lihat adanya macam-macam aturan yang mengalangi pergerakan rakyat apa saja, yang memusuhi imperialisme itu; kita lihat suatu politik pengajaran yang membunuh rasa kebangsaan dan mendidik pemuda-pemuda kam menjadipennelikkers[3] dan tidak menjadi manusia-manusia yang tabiat semangatnya merdeka; kita melihat suatu keadaan, sebagai De Stuw mengatakannya, bahwa rakyat

“makin lama makin jadi tergantung kepada pihak asing dan dengan demikian juga makin lama makin jauh dari cita-cita Hindia buat bangsa Hindia”;

Kita melihat.....tetapi cukup, Tuan-tuan hakim, cukup untuk membuktikan kebenaran keyakinan PNI itu! PNI memang adalah suatu partai yang tidak mau ngelamun, suatu partai yang tidak mau terapung-apung di atas awan angan-angan; PNI adalah suatu partai yang dengan kedua-dua kakinya berdiri di atas keadaan-keadaan yang sebenarnya, dengan kedua-dua kakinya berdiri di atas *realiteit*. Ia melihat, bahwa imperialisme adalah bertentangan keyakinan dengan kita, ia melihat bahwa kaum imperialisme itu mengusahakan kekuasaan politiknya untuk menjaga dan memelihara kepentingannya, — jadi, ia mengatakan bahwa kita barulah bisa melawan dan memberhentikan imperialisme itu seluas-luasnya, kalau kekuasaan politik itu sudah di dalam tangan kita, bahwa kita barulah bisa mengusahakan perbaikan kembali kita punya

pergaulan hidup dengan sesempurna-sempurnanya, kalau kita sudah merdeka, — jadi, ia memujikan rakyat Indonesia mengejar kemerdekaan itu! “Terang benderang sebagai kaca”, — “*zoo helder als glas*”, begitulah orang Belanda berkata!

Percaya pada usaha sendiri

Dan mendatangkan Indonesia merdeka itu? Juga di dalam menjawab soal ini, maka PNI dengan kedua-dua kakinya berdiri di atas *realiteit*. Ia menjawab soal itu dengan yakin: “dengan usaha rakyat Indonesia sendiri!” Ia tak mau mengikuti pengelamunan setengah orang yang mengira, bahwa adanya sistem imperialisme di sini itu ialah untuk mendidik kita dibikin “matang” atau “*rijp*” dan bahwa jikalau nanti kita sudah cukup “matang”, jikalau kita nanti sudah cukup “*rijp*”, sistem imperialisme itu lantas akan “berhenti sendiri”, — “memberikan” kemerdekaan kepada kita sebagai suatu “anugerah yang berharga”, sebagai suatu “*kostbaar geschenk*”!

Amboi, alangkah baiknya imperialisme kalau memang begitu; alangkah benarnya kalau begitu perkataan perjanjian *Volkenbond* pasal 22, bahwa politik jajahan itu ialah suatu “*mission sacree*”, suatu “misi yang suci” dari bangsa-bangsa kulit putih untuk bangsa-bangsa kulit berwarna!

Tidak, Tuan-tuan Hakim yang terhormat, pengelamunan yang demikian itu adalah pengelamunan yang kosong sama sekali! Pengelamunan yang demikian itu adalah pengelamunan yang sama sekali terapung-apung di atas awan, pengelamunan yang tidak berdiri di atas kenyataan sedikit jua pun adanya! Tidak, sistem imperialisme tidak akan mendidik kita menjadi “matang”; sistem imperialisme tidak akan membikin kita menjadi “*rijp*”; sistem imperialisme tidak akan meng-“anugerahi” kita dengan kemerdekaan, tetapi malahan sebaliknya akan bertambah-tambah mengokohkan penjajahan dengan pelbagai tali-tali wadag dan tali-tali yang halus. Sebab kenyataan yang sebenarnya ialah, bahwa imperialisme itu tidaklah buat “misi yang suci”, tidaklah buat sesuatu “*mission sacree*.” Kenyataan yang sebenarnya ialah, bahwa imperialisme itu adalah untuk kepentingan-kepentingan imperialisme sendiri! Imperialisme adalah bertentangan kepentingan dengan kita: bukan kepentingan imperialismelah me-“matang”-kan

kita atau me”rijp”-kan kita; bukan kepentingan imperialismelah “menganugerahkan” kemerdekaan kepada kita. Kepentingan imperialisme adalah meneruskan, mengekalkan, mengokohkan penjajahan itu buat selama-lamanya!

[1] Bank Nasional, salah satu aksi menolong diri sendiri, yang menjadi pendirian dr. Sutomo telah didirikan di Surabaya di bawah panji-panji Parindra (Partai Indonesia Raya)

[2] “Colijn over Indie”. Hal. 41.

[3] *Pennelikkers*= penjilat melalui tulisan.

IV

O..memang, imperialisme datangnya ialah dari bangsa-bangsa yang lebih pandai dari kita; imperialisme datangnya ialah dari negeri-negeri yang mempunyai kebudayaan lebih modern dari kita; imperialisme datangnya ialah dari dunia yang lebih tinggi teknik dan ilmu pikirannya dari kita, imperialisme datangnya ialah dari kalangan yang lebih pandai menjalankan "*struggle for life*" dari kita. Kita mengakui hal ini semua. Tetapi kita tidak mau mengakui, bahwa sistem imperialisme itu, karena itu, mendidik kita ke arah ke"matang"-an! Karl Kautsky, ahli teori Demokrasi Sosial yang termashur itu, di dalam bukunya "Sozialismus und Kolonial-politik" bab III, menulis:

"Tetapi pemerasan kapitalisme itu bukan saja berdasar kepada kekerasan terang-terangan, kepada hak siapa yang lebih kuat, juga bukan kepada perbedaan golongan-golongan, tapi kepada kemerdekaan dalam pergaulan hidup dari individu, yang menjadi tidak-merdeka, oleh karena pihak yang satu tidak mempunyai apa-apa sedang pihak yang lain memiliki semua alat-alat produksi untuknya sendiri. Tetapi orang yang tidak punya apa-apa dengan sendirinya kekurangan pula alat-alat peradaban, jadi juga kekurangan peradaban. Maka peradaban ini kelihatannya hanya terbatas kepada kelas yang berkuasa saja. Demikianlah kelihatannya seolah-olah buat yang kemudian ini, kekuasaannya atas proletariat, adalah kekuasaan peradaban atas kebiadaban, kekuasaan kaum intelektual yang terpilih atas rakyat banyak yang tidak terpelajar, *the great unwashed*[1] sebagai orang Inggris menyebutnya. Dari kaum pemilik memegang keras pandangan yang salah ini.....Bukan untuk keuntungan mereka, bukan untuk mendapat laba mereka itu, menurut pandangan yang salah ini, memeras kaum proletar itu, mereka hanya memerintahi kaum proletar untuk kepentingan umum dari masyarakat. Di dalam lingkungan bangsa sendiri kesusilaan seperti ini berarti membenarkan hak yang lebih tinggi dari orang yang punya terhadap orang yang tidak punya. Terhadap bangsa-bangsa lain kesusilaan ini..... dalam prakteknya menyatakan tidak lain dari paham, bahwa bangsa-bangsa kapitalistis berhak menguasai seluruh dunia manusia!"[2]

Tuan-tuan hakim yang terhormat, itulah dasar semua omongan tentang "semboyan perwalian" dari sistem imperialisme atas kami,

bangsa yang “sekarang bodoh”, dasar semua omongan tentang pendidikan dari “tidak matang” dijadikan “matang”.

Tidak, tidak, — perwalian itu tidak ada, didikan itu omong kosong belaka,— didikan itu “*mere phrase*”. Kalau bangsa Indonesia ingin mencapai “kekuasaan politik, yakni ingin merdeka, kalau bangsa kami itu ingin menjadi tuan di dalam rumah sendiri, maka ia harus mendidik diri sendiri, menjalankan perwalian atas diri sendiri berusaha dengan kebisaan dan tenaga sendiri! Dari sistem imperialisme ia tidak mendapat pertolongan; dari sistem imperialisme ia malahan hanya akan mendapat rintangan!

Sudah semestinya kaum imperialisme itu merintangi-rintangi tiap-tiap usaha kami ke arah kedewasaan. Sudah semestinya kami dialang-alanginya di dalam kami punya perwalian atas diri sendiri, dimakimaki, dimintakan hukuman, dimintakan pembuangan, dimintakan tiang penggantungan sebagai dulu *Nieuws van den dag* memintakannya. Oleh karena itulah, Tuan-tuan hampir saban minggu, saban hari membaca cacian dan makian dari pihak AID de Preangerbode, atau Java Bode atau De Locomotief, atau Soerabajaasch Handelsblad[3] kepada alamat kami, membaca hasutan-hasutan yang sampai mencoba mempengaruhi keadilan putusan Tuan-tuan di dalam proses ini!

Ah, Tuan-tuan hakim, itu begitu logis, itu begitu *vanzelfsprekend*,[4] itu memang semestinya: Tuan-tuan mengetahui, bahwa AID de Preangerbode adalah surat kabar kaum karet, kaum kina, kaum teh di seluruh Priangan; Tuan-tuan mengetahui, bahwa Soerabajaasch Handelsblad adalah surat kabar kaum gula; Tuan-tuan mengetahui bahwa *Nieuws van den Dag* adalah surat kabar kaum gula; Tuan-tuan mengetahui bahwa *Nieuws van den Dag* adalah surat kabar kaum dagang di Kali Besar; Tuan-tuan mengetahui bahwa semua surat kabar yang reaksioner itu adalah surat kabar kaum imperialisme yang kami musuhi itu, bahwa jeritan-jeritan yang mencaci maki kaum pergerakan itu ialah jeritan orang-orang yang takut akan kebakaran gedung hartanya, takut terancam dividennya, takut terancam keselamatan perusahaannya yang menghasilkan kekayaan berjuta-juta itu! Tuan-tuan mengetahui hal itu semuanya! Dan oleh karenanya, tidak khawatirlah kami akan apa yang

dituliskan oleh Mr.Hitter dalam buku “Drukpersvrijheid” serie *pro en contra*,[5], tentang:

“Kemungkinan, bahwa kekuasaan hakim kena pengaruh oleh pendapat umum, adalah suatu kemungkinan yang berbahaya”,

dan percayalah kami, bahwa Tuan-tuan akan menjalankan keadilan dengan tidak kena pengaruh hasutan-hasutan surat-surat kabar yang benci kepada pergerakan itu tadi.

Ah, Tuan-tuan Hakim, kami sudah biasa lagi akan makina-makian yang memang sudah logis itu. Kami tak heran lagi tentang itu;– kepentingan mereka terancam oleh usaha kami, mereka tentunya menjadi geher!

Prof. Snouck Hurgronje menulis:

“Kaum majikan telah mengadakan organisasi yang kuat dan mendapatkan jaminan bantuan dari orang-orang yang licin lidahnya dan tajam penanya, untuk dengan jalan propaganda yang luas, bukan saja menghilangkan segala keragu-raguan terhadap berkah-berkah (yakni berkah-berkah kapital partikelir, Sk.), tapi juga untuk memerangi dengan hebatnya orang-orang yang ragu-ragu itu. Sekalian surat kabar Eropa di Hindia sekarang berdiri di belakang mereka, juga koran-koran yang dulu dengan senang hati membuka kolom-kolomnya untuk ratapan hati dari dunia Bumiputra. Tidak, keberanian adalah.... perlu, untuk melawan pasukan-pasukan yang diperlengkapi dengan segala macam alat peperangan itu”.[6]

Dan Tuan Lievegoed, bekas redaktur *De Locomotief*, seorang liberal yang tulus hati, yang karena itu dikeluarkan dari *De Locomotief*, seorang Liberal yang tulus hati, yang karena itu dikeluarkan dari *De Locomotief*,[7] sudah dalam tahun 1925 menulis bahwa kegegeran kaum imperialisme itu, adalah:

“suatu ekstremisme-kanan *zonder* cita-cita, yang menjalankan politik duit secara membuta-tuli, dengan semboyan-semboyan yang memekakkan telinga,” dan bahwa: “tidak ada golongan yang lebih merugikan kekuasaan Hindia-Belanda di Indonesia dari golongan yang gembar-gembor ini, yang dengan pura-pura menyokong pemerintah, memukul kanan-kiri untuk merebahkan segala yang mengancam kepentingannya yang sempit”. (*Locomotief*, 5 November 1925).

- [1] *The great unwashed*= kaum yang tidak tercuci
- [2] Karl Kautsky dalam “Sozialismus und Kolonial-politik” bab III hal.19.
- [3] *Nieuws van den Dag, A ID de Preangerbode*, adalah surat-surat kabar Belanda berbahasa Belanda di Indonesia tahun tiga puluhan.
- [4] *Vanzelfspreken*= masuk akal
- [5] Menjelang proses peradilan Bung Karno di Landraad Bandung, telah banyak komentar pers yang pro dan kontra, kemudian komentar itu oleh Mr. Ritter dibukukan dengan judul “Drukpersvrijheid” (kebebasan pers)
- [6] “Colijn over Indie” hal. 39.
- [7] Ternyata kebijaksanaan memberhentikan wartawan yang dianggap mengganggu ketertiban, telah berlaku juga di masa itu, walau terhadap orang Belanda sendiri.

V

Benar! Benar sekali. Tuan-tuan Hakim: “pura-pura menyokong pemerintah”, “*onder het voorwendsel vangezagschraging*”, mereka minta kami dihukum, dibuang, atau digantung, tetapi sebenarnya ialah oleh karena kantongnya dan dividennya terancam! Untuk keselamatan kantong dan untuk keselamatan dividen ini juga, mereka kalau perlu, tak segan pula melanggar kekuasaan pemerintah itu, sebagai misalnya AID de Preangerbode tak segan sebentar-sebentar melanggar kekuasaan itu, atau sebagai misalnya Nieuws van den Dag, yang dulu pernah menghina Gubernur Jenderal de Graeff[1] dengan penghinaan:

“Pergilah, enyahlah, Hindia butuh kepada orang-orang yang lebih keras!”

Kantongnya terancam! Tuan-tuan Hakim, kantongnya terancam!— Untuk melindungi kantong ini, maka mereka mengabui mata umum, — untuk menjaga kepentingan ini maka mereka mengadakan pers yang tiada moral melainkan moral duit, tiada kesusilaan melainkan kesusilaan fulus! “Juga negeri Belanda,” – begitulah Tuan Vleming, bekas kepala dinas akuntan pajak di sini, berpidato,

‘Juga negeri Belanda masih tetap suatu negeri yang diperintah secara kapitalistis, di mana kapital besar yang disusun dalam organisasi yang kuat itu, dan tidak kurang-kurang pula kapital besar yang mempunyai kepentingan-kepentingan di Indonesia, bukan saja mempunyai kekuasaan ekonomi yang besar sekali, tetapi juga bisa menjalankan pengaruh yang hebat atas pemerintah dengan segala alat-alat yang ada padanya. Dan alat-alat ini bukan sedikit.

Kapital besar ini berhubungan rapat dengan kapitalis-kapitalis besar Inggris, Amerika, Belgia, Jerman, Prancis, dan lain-lain yang oleh adanya apa yang disebut politik pintu terbuka, juga mempunyai kepentingan-kepentingannya di Indonesia dan yang tergabung dengan kapitalis-kapitalis besar Belanda dalam organisasi “Dewan Majikan untuk Hindia-Belanda, yang didirikan dalam tahun 1921. Dengan langsung atau tidak langsung dewan majikan ini mempunyai pers dan dinas penerangan pers yang luas, sedang anggota-anggotanya yang berkepentingan mempunyai pula hubungan dengan dua surat kabar yang terbit di luar negeri, yakni “The New World” dan “Le Monde Nouveau”. Dengan kebohongan, penipuan, perampasan makanan orang,— dan di mana perlu untuk

kepentingannya dan jika bisa mencapai maksudnya mereka bersedia berlaku lebih kejam lagi—maka kapital besar yang tersusun dalam organisasi itu, melakukan perjuangan untuk kepentingannya di tiap negeri, jadi juga di Indonesia, sekali-sekali mengubah haluan dimana perlu.”[2]

Lebih terang dari tuan Vleming itu tak bisalah digambarkan asal-usul moral duit dan kesusilaan duit dari pers imperialisme di Indonesia itu. Oleh karena itu, tak haruslah kita heran atau marah atas kegegeran surat-surat kabar ala AID de Preangerbode atau ala Soerabajaasch Handelsblad itu. Biar mereka gembar-gembor, biar mereka berpikir ke kanan dan ke kiri, biar mereka jengkelitan berdiri di atas kepalanya, — kami tak akan ambil pusing, kami tak akan ambil mumet, kami akan bekerja terus!

Tuan-tuan Hakim yang terhormat, marilah kami mengulangi lagi: kekuasaan politik, kemerdekaan, hanyalah bisa didatangkan oleh usaha rakyat Indonesia sendiri! Kaum imperialisme sudah semestinya mengalang-alangi kami; dari sistem imperialisme, yang hidupnya daripada penjajahan itu, kami tak harus mengharap sokongan memberhentikan penjajahan itu. Nasib kami adalah di dalam genggaman kami sendiri; keselamatan kami adalah di dalam kemauan kami sendiri, di dalam tekad kami sendiri, di dalam kebiasaan kami sendiri, di dalam usaha kami sendiri. **Semboyan kami tidaklah “minta-minta”, tidaklah “mengemis”, tidaklah “mendicancy” sebagai Tilak mengatakannya,— tetapi semboyan kami haruslah “noncooperation”, lebih benar: “selfhelp”, “zelfver- werkelijking”, “selfreliance”!**, sebagai yang kami lambangkan dengan perlambang kepala banteng!

Siapa yang masih mengharap-harap pertolongan dari sistem imperialisme, siapa yang masih percaya akan “anugerah” yang nanti akan di-“anugerah”-kan olehnya, siapa yang masih menggugu akan omongan “*mission sacree*”, siapa yang masih mengarahkan muka ke Barat, ia adalah sama sekali buta akan kenyataan yang sebenarnya, buta akan *realiteit*.

Sebab kenyataan yang sebenarnya ialah, sebagai tertulis di dalam keterangan asas kami, bahwa negeri Belanda peri kehidupannya sangat tergantung kepada penjajahan Indonesia. Kenyataan yang sebenarnya menyebabkan Mr. Dijkstra di dalam “Indische Gids”[3] 1914 menulis:

“Penduduk di dalam seratus dua ratus tahun ini tidak bisa mengharapakan dari imperialisme kebudayaan kita, bahwa kekuasaan dan pengetahuan kita akan kita pergunakan untuk memajukan peradaban dan kesehatan mereka.”

Kenyataan yang sebenarnya menyebabkan Tuan Vleming berpidato:

“bagi kesejahteraan umum penduduk yang hampir 7½ juta dari negeri kita yang kecil.....besar sekali faedahnya, bahwa saban tahun mengalir ke negeri Belanda suatu saldo ekspor yang besar jumlahnya, artinya suatu jumlah harga barang ekspor Hindia yang jauh lebih besar dari jumlah harga impor, berupa dividen, bunga, *tantieme*, gaji-gaji, pensiun, gaji-perlop, dan lain-lain.[4]

Kenyataan yang sebenarnya ialah, bahwa, sebagai Prof. Moon menuliskan, kebesaran negeri Belanda sekarang ini adalah oleh karena negeri Belanda itu mempunyai negeri jajahan Indonesia yang luas dan banyak penduduk itu. Kenyataan yang sebenarnya menjadi sebab Dr. Sandberg tempo hari geger membikin buku yang istimewa bernama: “*Indie verloren, ramspoed geboren*”,[5] Indonesia merdeka, Belanda pun bangkrut”, menjadi sebab Komisi untuk Pertahanan Hindia-Belanda menulis:

“Juga dipandang dari sudut ekonomi, lepasnya Hindia akan berarti bencana nasional yang sehebat-hebatnya bagi negeri Belanda.”[6]

[1] Jhr. Andries C.D. de Graeff, Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1926-1931, menteri luar negeri dalam kabinet Colijn 1933-1937.

[2] Vleming dalam bukunya “*Intern. Soc. Dem, Kol. Pol*”, hal.82

[3] “*Indische Gids*” sebuah penerbitan Belanda yang mengutamakan pemuatan penelitian ilmiah. Buku yang dikutip terbitan tahun 1914, No. 36 II, hal. 1240.

[4] Vleming, Ibid hal.72.

[5] Dr. Sandberg, dalam bukunya, “*Indie verloren, ramspoed geboren*” diterbitkan D.A. Daamen, ‘s-Gravenhage, 1914.

[6] Pledoi Sneevliet di pengadilan Belanda (1917) yang mengakibatkan Sneevliet (1883-1942) diinternir. Sneevliet adalah orang Belanda yang mendirikan *Indische Sociaal Democratische Partij* (ISDP) tahun 1914 di Indonesia.

VI

Kenyataan yang sebenarnya adalah, bahwa sudah zaman dulu pun menteri Baud sudah pernah berkata, “*Indie is de kurk waarop Nederland drijft,*” “ Hindia adalah gabus di atas mana negeri Belanda terapung-apung,” bahwa de Kat Angelino di dalam bukunya “*Staatkunding beleid en bestuurszorg in Ned.-Indie*[1] (buku standar yang penerbitannya mendapat sokongan dari Kementerian Daerah Jajahan, Tuan-tuan Hakim), dengan terus terang menulis:

“Dunia Barat yang penuh industri itu, tidak bisa hidup dengan tiada hasil-hasil daerah-daerah pertanian beriklim panas dan setengah panas, yakni daerah-daerah yang terutama menjadikan dunia jajahan. Masyarakatnya terikat teguh oleh banyak tali-temali ekonomi kepada daerah-daerah itu dan masa depannya.”

Tidakkah ini berarti, bahwa dunia Barat itu seperti bunuh diri, kalau dengan kemauan sendiri memberi kemerdekaan kepada dunia Timur? Bahwa sesungguhnya: siapa yang dengan keadaan yang semacam itu masih berani mengharapkan pertolongan dari dunia Barat di dalam usahanya memerdekakan negeri dan bangsanya,— ia adalah menutupkan mata. PNI tidak mau menutupkan mata, PNI tidak mau mimpi, PNI tidak mau ngelamun, — PNI bangun sebangun-bangunnya!

Banyak orang yang mengatakan, bahwa politik PNI yang bersendi kepada “percaya diri sendiri itu”, adalah disebabkan karena pemerintah tidak memenuhi ia punya “janji-janji bulan November” tahun 1918,[2] yang menyanggupkan perluasan hak-hak bagi rakyat Indonesia. Sangkaan yang demikian ini adalah salah: Asas PNI “percaya pada diri sendiri” bukanlah disebabkan karena tidak dipenuhi janji-janji November itu; asas PNI itu, sebagai tadi kami terangkan, adalah keluar dari analisa keadaan jajahan di dalam hakikatnya,—yakni dari analisa hakikat imperialisme sendiri. Asas “percaya pada diri sendiri” itu, tidaklah buat Indonesia saja, tetapi sebenarnya dipakai untuk perjuangan tiap-tiap rakyat jajahan yang mengejar kemerdekaan. Ia boleh dipakai oleh bangsa India, bangsa Indocina, bangsa Filipina, bangsa Korea, bangsa Mesir,—pendek kata oleh tiap-tiap bangsa yang berkeluh kesah memikul beban imperialisme asing. Asas kami tidaklah terikat kepada batas-batas negeri kami sendiri saja,—asas kami adalah “*supranational*”, oleh karena hakikatnya imperialisme adalah supranasional pula.

Imperialisme di dalam hakikatnya di mana-mana adalah sama; di mana-mana imperialisme adalah: nafsu menguasai dan mempengaruhi negeri orang lain untuk keuntungan sendiri; di mana-mana imperialisme adalah bertentangan kepentingan dengan rakyat yang didudukinya! Di mana-mana sistem imperialisme tidak akan me-“matang”-kan dan memerdekakan jajahannya dengan kemauan sendiri!

Tidak dipenuhinya janji-janji November itu tidaklah membikin keingkaran kami. Politik Gubernur Jenderal Fock yang mencederai kata kehormatan yang oleh pemerintah van Limburg Stirum disanggupi itu. Politik Gubernur Jenderal Fock yang malahan memberatkan nasib kami dengan penghematan, dengan istilah kebanyakan pegawai, dengan cabutan tunjangan kemahalan, dengan tambahan pajak, dengan surat edaran pembungkeman, dengan larangan berapat, dengan pasal 161 bis dan sebagainya; politik Gubernur Jenderal Fock yang sama sekali suatu penghinaan atas semangat janji-janji bulan November itu, politik yang demikian itu tidak menjadi asal kami punya asas, tetapi hanya menambah teguhnya kami punya kepercayaan di dalam kebenaran kami punya asas itu saja, menambah teguhnya kami punya kepercayaan terhadap kebenaran kami punya analisa: yakni analisa, bahwa kaum imperialisme yang sesudah perang besar itu malahan makin butuh akan Kekayaan Indonesia, harus menjalankan pengaruhnya atas pemerintahan! Janji-janji bulan November yang toh diberikan juga, tidak karena sekonyong-konyong kami dipandang lebih “matang” sedikit, tetapi hanya karena keadaan politik sangat mengkhawatirkan, yakni karena pada masa itu perhubungan Belanda-Indonesia menjadi sangat tipis sekali, pergerakan rakyat makin membanjir, sedang keadaan di negeri Belanda sendiri sangat berbahaya,— janji-janji bulan November yang oleh karenanya, toh sudah mempunyai sifat “janji-janji karena takut” alias “*angstbeloften*” itu, janji-janji November itu, sesudah bahaya hilang, oleh kaum imperialisme tidak boleh tidak harus dipaksakan mencederainya!

“Ketika itu adalah memuncaknya kejadian-kejadian internasional, tatkala pecahan-pecahan singgasana-singgasana yang dihancurkan mendesing-desing melintasi kuping-kuping rakyat Belanda dan guntur revolusi-revolusi di luar negeri menggemuruh di atas padang-padangnya,”

-begitulah Troelstra menggambarkan keadaan tatkalan janji-janji November itu perlu diucapkan, tetapi, sesudah bahaya hilang, tatkala janji-janji November itu perlu dicabut lagi, maka segeralah kita mengetahui “rahasia” sebabnya, yakni “rahasia” yang dibukakan oleh Prof, Treub di dalam rapat Dewan Majikan tanggal 21 Juni 1923, -yang bunyinya:

“Salah satu kesan yang sudah ada pada saya, lama sebelum saya datang ke Hindia, bertambah keras waktu saya berada di sana, yakni bahwa disebabkan karena peperangan, Hindia menjadi jauh lebih penting lagi buat negeri Belanda dari dulu!”

“Rahasia!”...tetapi! “rahasia” yang buat kami kaum PNI bukan “rahasia” lagi, – “rahasia” yang gemerincing dengan ringgit, “rahasia” yang berbau gula, “rahasia” yang berbau karet, “rahasia”, yang berbau minyak, berbau teh berbau tembakau dan lain-lain. Sedang di zaman perang, kelebihan ekspor “hanya” kurang lebih f 300.000.000,-setahun, sedang di zaman perang itu persentase kelebihan ekspor “hanya” rata-rata 40% dari ekspor seluruhnya, maka di dalam tahun 1919 menjadilah ia lebih dari f 1.400.000.000,-, menjadilah ia lebih dari 70% dari jumlah ekspor![3]

Oleh sebab itu, ini “rahasia” adalah “rahasia” yang tidak mengherankan kami lagi, janji-janji bulan November harus dicerainya, harus digantinya dengan politik yang sangat reaksioner!

Di dalam buku peringatan lima belas tahun berdirinya *Indonesische Vereeniging*, halaman 25-26, kami baca:

“Dan tatkala sesudah damai, oleh kerja pembinasaan besar-besaran itu, keadaan ekonomi menjadi kacau-balau...maka eropa menjadi berlipat ganda memerlukan ‘daerah-daerah terbuka’ di timur, dimana ibunda alam dengan sabarnya yang tak terhingga memberikan kekayaan-kekayaannya. Maka perlulah suatu politik negara yang tujuannya ialah pelaksanaan kekuasaan yang seluas-luasnya, sebab jika tiada demikian, tidak dapat dilakukan pengedukan sebanyak-banyaknya. Politik Inggris yang reaksioner segera sesudah perang selesai terhadap India; adalah suatu akibat yang tidak bisa dielakkan dari hal ini. Tapi juga, Amerika, yang terutama masih bisa hidup dari kekayaan sendiri, melepas politik *solemen-nya* yang terpuji itu dan bertindak sebagai kekuasaan imperialis di timur. Jika tidak, apakah sebabnya keterangan-

keterangan pemerintah berbeda satu sama lain....yakni bahwa Filipina mula-mula dianggap ‘matang’, kemudian pula tidak ‘matang’ untuk kemerdekaan, yang dijanjikan dalam *jones act* tahun 1916? Negeri belanda, yang karena sikap netralnya di masa perang, terpelihara dari kerusakan-kerusakan harta benda, tetapi mengalami juga sedikit-banyaknya krisis di benua eropa, berusaha sekuat-kuatnya untuk menggerakkan kembali tali-tali ekonomi dengan Hindia-Belanda yang oleh peperangan telah menjadi longgar”.....

Dan Gubernur Jenderal Fock dikirimlah kemari, janji-janji November musnahlah menjadi kabut atau halimun di dalam ingatan belaka, – lebih teguh lagilah oleh karenanya keyakinan kami akan azas “selfhelp” dan “Selfreliance” itu, lebih insyaf lagilah kami, bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan kami sendiri.

[1] De Kat Angelino dalam “*Staatkunding beleid en bestuuzorg in Ned Indie*” hal.89 (kebijaksanaan ketatanegaraan dan pembinaan pegawai di Hindia Belanda).

[2] Janji-janji bulan November tahun 1918, atau lebih terkenal “*November belofte*”, adalah janji yang diucapkan oleh Gubernur Jenderal Limburg Stirum di *Volksraad* (Dewan Hindia) bulan November 1918, bahwa Regerings-reglement (aturan pemerintahan) segera akan diubah, supaya diperlukan pemindahan hak-hak pemerintahan dari Nederland ke Indonesia. Janji ini tidak pernah ditepati, maka Fock dikirim menggantikan Limburg Stirum (mulai tahun 1919).

[3] Bandingkan Koch “*Vakbeweging*”, 1927 hal.570, dan van Gelderen, “*Voorlezingen*”, hal. 98 dan seterusnya.

VII

Pembentukan tenaga, pembentukan kekuasaan atau *machtsvorming*.

Bahwasanya, sebagaimana kaum buruh negeri Belanda berjuang untuk hak pemilihan umum (*algemeen kiesrecht*) dengan nyanyian:

“Wathelpen ons gebeden, voor het kiesrecht dient gestreden!”, “Tiada guna meminta sayang, buat hak pilih harus berjuang!”

Maka kami juga mendengungkan kami punya semboyan:

“Tiada guna meminta sayang, buat kemerdekaan harus berjuang!” -
“Whathelpen ons gebeden, voor de vrijheid dient gestreden!”

Berjuang! Dengan apa berjuang? Dengan pedang? Dengan bedil? Dengan bom? Dengan merusak keamanan umum? Dengan menjalankan kejahatan? Amboi, tidak! Tidak dengan pedang, tidak dengan bedil, tidak dengan bom, tidak dengan melanggar pasal 153 bis atau 169, tidak dengan melintasi batas undang-undang kami berjuang, –kami berjuang ialah dengan “pembentukan tenaga” yang halal, dengan suatu modern *georganiseerde machhtsvorming* di dalam lingkungan undang-undang, sebagaimana kaum buruh di negeri Belanda berjuang melawan kapitalisme dan “mengambil” kekuasaan politik itu juga tidak memakai cara-cara yang diharamkan oleh hukum, melainkan juga hanya dengan pembentukan tenaga yang halal belaka. Pembentukan tenaga yang halal, pembentukan kekuasaan di dalam lingkungan undang-undang, itulah yang PNI maksudkan, Tuan-tuan Hakim, dan bukan pembentukan tenaga yang diharamkan oleh undang-undang itu, – bukan pembentukan kekuasaan dengan serdadu-serdadu rahasia, bukan pembentukan kekuasaan ala nihilisme, bukan pula pembentukan kekuasaan yang bermaksud membahayai “keamanan umum”, melanggar pasal 153 bis dan pasal 169 undang-undang hukum pidana.

Jadi buat apa pembentukan kekuasaan! Buat apa *machtsvorming*! Kami dengar orang bertanya. *Machtsvorming*, pembentukan kekuasaan, oleh karena soal jajahan adalah soal kekuasaan, soal *macht*! Pembentukan kekuasaan oleh

karena seluruh riwayat dunia mengatakan bahwa perubahan-perubahan besar hanya diadakan oleh kaum yang menang, kalau pertimbangan akan untung rugi menyuruhnya, atau kalau suatu kekuasaan menuntutnya. “Tak pernahlah suatu kelas suka melepaskan hak-haknya dengan kemauan sendiri,” begitulah Marx berkata. **Seluruh riwayat dunia adalah riwayat pergerakan-pergerakan kekuasaan ini. Seluruh riwayat dunia, terutama sesudah lahirnya faham demokrasi pada fajar abad ke-19, adalah menunjukkan pembentukan kekuasaan itu; tiap-tiap partai politik, tiap-tiap serikat pekerja, tiap-tiap perkumpulan adalah suatu pembentukan kekuasaan, suatu pembentukan kekuatan.** Orang seorang-seorang tidaklah bisa mengembangkan kekuasaan yang besar. Maka manusia seorang-seorang itu lantas berkumpul, menggabungkan diri satu sama lain,— suatu perkumpulan lahirlah ke dunia. Kalau misalnya orang-orang Eropa di sini mengadakan suatu perkumpulan PEB,[1] kalau orang-orang Eropa di sini mendirikan *Vaderlandsche Club*, kalau sebagian orang Tionghoa membangunkan *Chung Hwa Hui*, kalau orang-orang Bumiputra berserikat dalam “*Wargi Bandung*” atau “*Tulak Bahla Tawil Oemoer*”, maka mereka hanyalah mendirikan badan-badan pembentukan kuasa belaka.

O, memang, pembentukan kekuasaan PEB, pembentukan kekuasaan *Vaderlandsche Club*, pembentukan kekuasaan “*Tulak Bahla Tawil Umur*” tidaklah sama sifat tabiatnya dengan pembentukan kekuasaan PNI. Sedang P E B mengejar kepentingan-kepentingan yang sesuai dengan kepentingan imperialisme, sedang *Vaderlandsche Club* mau meneruskan penjajahan Indonesia itu sampai kiamat, sedang T B T O percaya pula dalam kebahagiaan penjajahan itu, — sedang perkumpulan-perkumpulan itu adalah partai-partai reaksi atau partai-partai konservatif, maka PNI adalahh mengejar kepentingan-kepentingan yang sama sekali bertentangan dengan kepentingan imperialisme, **PNI adalah partai perlawanan, partai oposisi. Pembentukan kekuasaan PNI sebagai yang tadi kami katakan, pembentukan kekuasaan PNI adalah timbul dari keyakinan, bahwa soal jajahan adalah soal kekuasaan.** Selama rakyat Indonesia belum menjadi suatu kekuasaan yang mahasentosa, selama rakyat itu masih saja tercerai-berai dengan tiada kerukunan satu sama lain, selama rakyat itu belum bisa mendorongkan semua

kemauannya dengan suatu kekuasaan yang teratur dan tersusun,—selama itu maka kaum imperialisme yang mencari untung sendiri itu akan tetaplah memandang kepadanya sebagai seekor kambing yang menurut dan akan terus mengabaikan segala tuntutan-tuntutannya. Sebab tiap-tiap tuntutan rakyat Indonesia adalah merugikan bagi imperialisme; tiap-tiap tuntutan rakyat Indonesia tidaklah akan diturutinya, kalau kaum imperialisme itu tidak terpaksa menurutinya. Tiap-tiap kemenangan rakyat Indonesia atas kaum imperialisme dan pemerintah adalah buah desakan yang rakyat itu lakukan, — tiap-tiap kemenangan rakyat Indonesia itu adalah suatu konsesi yang dipaksakan!

Sosialis Cramer pada 10 Juni 1925 berkata dalam *Tweede kamer*:

“Walaupun diselimuti dengan kata-kata manis, dari sini nyata sekali, bahwa....kepentingan-kepentingan Belanda, atau lebih benar, kepentingan-kepentingan kapital besar, senantiasa lebih dulu harus dijamin keselamatannya; kepentingan-kepentingan rakyat Hindia baru diperhatikan dalam tingkat kedua, ketiga atau keempat.

Tuan Ketua!

Rakyat Hindia tentulah tak urung menarik satu-satunya kesimpulan yang benar, bahwa dari suatukamer yang disusun seperti sekarang ini, tidak bisa dan tidak usah diharapkan apa-apa dan bahwa mereka, jika hendak mencapai sesuatu harus memperhadapkan kekuasaan dengan kekuasaan. Sebab bukankah seluruh soal matang atau tidak matang untuk ikut memerintah itu, terutama adalah soal kekuasaan?”

“Memperhadapkan kekuasaan dengan kekuasaan”, “*macht tegenover macht*”, begitulah nasihat Cramer. Meskipun demikian, Cramer bukan bolsjewik Cramer bukan sosialis kiri! Cramer bukan orang yang mau main bedil-bedilan atau bom-boman, bukan orang yang mau “membahayai keamanan umum”, bukan orang yang mau “menyerang” atau “merobohkan” kekuasaan pemerintah. Cramer adalah sosialis yang “*kutuq*”, seorang “warga yang tulus”. Anggota partai oposisi SDAP yang tenang itu!

Bahwasanya, pembentukan kekuasaan suatu partai perlawanan tidaklah selamanya harus pembentukan kekuasaan yang melewati batas hukum! Sebagaimana SDAP dengan jalan pembentukan kekuasaan yang halal itu, dari suatu golongan kecil yang dihina-hina

dan dimaki-maki bisa menjadi suatu kekuasaan yang ditakuti orang, karena sekarang mempengaruhi orang ratusan ribu; sebagaimana SDAP itu, **dengan pergerakan puluhan ribu kaum rakyat, dengan mendirikan serikat-serikat kaum buruh, dengan mengadakan koperasi-koperasi, dengan mengeluarkan berpuluh-puluh surat kabar, bisa mendesak dan memaksa kepada musuhnya mengadakan konsesi-konsesi yang berharga;** sebagaimana SDAP atau kaum buruh di Eropa Barat dengan pembentukan kekuasaan yang mahahebat tetapi halal itu, mau mencapai kekuasaan politik dan lantas memberhentikan kapitalisme, — maka PNI dengan jalan pembentukan kekuasaan pula, ingin menjadi kekuasaan yang ditakuti, yang akhirnya bisa menuntun rakyat Indonesia ke atas “kekuasaan politik juga, — kekuasaan politik kemerdekaan, yang menurut penglihatan kami, adalah syarat yang terpenting untuk memberhentikan imperialisme sama sekali.

[1] P.E.B. (*Politiek Economische Bond*) adalah satu perkumpulan pengusaha-pengusaha Belanda di Indonesia, yang selalu berusaha mengajukan kepentingan mereka untuk dijadikan kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda.

VIII

Tiap partai Kemerdekaan mau berontak?

“Mencapai kekuasaan politik! Mendatangkan Indonesia merdeka! Ya, benar, mendatangkan Indonesia merdeka! Jadi PNI mau berontak, kalau kemerdekaan itu tidak diberikan! –beginitulah orang bisa berkata.

Amboi, aneh benar “logika” yang demikian ini! Kalau memang benar “logika” yang demikian itu, orang lantas boleh me-“logika”-kan pula: jadi, PSI yang bercita-cita pemerintahan Islam itu, juga mau berontak! Atau orang boleh me-“logika”-kan pula: jadi, Budi Utomo, jadi, Pasundan, jadi kaum Betawi, jadi Sarekat Madura, jadi semua anggota PPPKI yang juga mau mendatangkan kemerdekaan itu, juga mau membikin huru-hara! Ya, orang boleh me-“logika”-kan pula: jadi SDAP, jadi ISDP, jadi Albarda c.s. dan Stokvis c.s. yang bersemboyan “mencapai kekuasaan politik!, nyah dengan kapitalisme!” itu, juga mau mengamuk dengan bom dan dinamit! :

Amboi, kocak benar kalau begitu: Orang tua Stokvis mengamuk dengan bom dan dinamit! Padahal, – bagaimanakah aksi ISDP? Bagaimanakah aksi SDAP? Bagaimanakah Stokvis c.s. dan Albarda c.s. itu mau mencapai kekuasaan politik itu?

“Bagaimanakah jalannya mengambil kekuasaan politik?” beginitulah kami itu menjawab di dalam buku kecil mereka tentang asas dan tujuan SDAP:

“Kami sedang melakukan yang demikian itu pada tiap-tiap keping organisasi, yang kami dirikan dan luaskan. Kami bekerja untuk itu pada tiap pemilihan, pada tiap perjuangan untuk hak memilih, pada tiap aksi besar terhadap kaum borjuis. Ini bukan pemberontakan satu hari, tapi adalah pekerjaan perlawanan kami bertahun-tahun.....alat-alat yang kelihatan, yang dipergunakan oleh proletariat dalam perjuangannya, disesuaikan dengan syarat-syarat dan kemungkinan-kemungkinan perjuangan itu dan dengan senjata-senjata yang diberikan oleh masyarakat kapitalis itu sendiri kepada kami. Sebab itulah terutama kami pergunakan parlemen, sebab itulah pula gerakan sekerja memakai senjata mogok – di negeri Belanda adalah hak mogok, Tuan-tuan Hakim – yang bisa dipergunakannya oleh karena tenaga buruh tidak bisa ditiadakan

dalam proses produksi. Tapi senjata itu pula yang dipergunakan oleh proletariat juga untuk tuntutan-tuntutan politik umum dan tuntutan-tuntutan kelas, apabila dianggapnya bisa mendatangkan manfaat....kekerasan menurut pengalaman kami, ternyata adalah suatu senjata yang jelek, boleh bilang tidak perlu kalau kekuasaan ada pada kita, merugikan selama kita tidak mempunyai kekuasaan....**Tapi aksi apa pun yang hendak kita lakukan, — senjata apa pun hendak kita pakai, — dasar yang tidak bisa ditiadakan dari segala, ialah: adanya suatu organisasi yang tahan lama, kuat susunanya dan tumbuh terus, suatu organisasi yang mempunyai hak susila dan kekuasaan, untuk memegang pimpinan kelas kaum buruh dalam perjuangan kelas-kelas”.[1]**

Sesungguhnya, kocak betullah “logika” yang me-“logika”-kan, bahwa karena itu, PNI akan membikin huru-hara. Tetapi, juga dengan tidak menertawakan “logika” yang kocak itu, maka tiap-tiap orang yang mau mengakui bahwa sedikitnya otak kami toh masih belum terganggu, tiap-tiap orang yang tidak memandang kami orang yang gila atau orang *idiot*, tentulah mengerti, bahwa kami mustahillah tak mengetahui bahwa kemerdekaan itu hanya bisa tercapai dengan suatu usaha susunan dan usaha kekuasaan yang maha sukar dan mahaberat adanya, dan bahwa mustahillah pula kami misalnya bisa berkata, bahwa kemerdekaan itu akan datang dalam tahun ‘30! Sebagaimana kekuasaan politik tidak bisa dicapai oleh kaum buruh Eropa di dalam satu, dua, tiga, sepuluh, dua puluh tahun, maka kemerdekaan pun tak bisa diperoleh rakyat Indonesia dalam satu helaan nafas saja![2]

Ai, ai, “kemerdekaan akan datang dalam tahun ‘30!”

Kami dikatakan pernah bilang, bahwa kemerdekaan akan datang dalam tahun ‘30! Sesungguhnya, kalau memang benar begitu, perlu sekalilah kami dengan segera dikirimkan ke rumah sakit gila Ciikeumeuh, bagian “pasien-pasien yang tidak sembuh lagi”, bersama-sama dengan saudara Mr. Sartono, yang juga dikatakan pernah berpidato kemerdekaan akan datang tahun ini.

Dalam Bintang Timur, edisi bahasa Belanda, 4 januari yang lain kami baca:

“Atas pertanyaan Mr. Sartono apakah bukti-bukti pendakwaan, polisi menjawab, bahwa pemerintah mendapat kabar dari seluruh Indonesia, bahwa PNI mau mengadakan revolusi dan juga bahwa –

ini pun berita-berita dari mata-mata juga – Mr. Sartono di dalam suatu rapat terbuka (???) mengatakan, bahwa tahun 1930 negeri ini akan mendapat- kembali kemerdekaannya....Mr. Sartono lantas menjawab dengan tepatnya, bahwa pucuk Pimpinan tidak pernah merancang maksud seperti itu. Sebab jika benar demikian, tentulah Pucuk Pimpinan mengeluarkan suatu keputusan beserta petunjuk-petunjuk! Dan lagi pula, jika sekiranya sungguh-sungguh mereka itu mempunyai maksud jahat itu, tentulah mereka semuanya menyimpan senjata-senjata atau sekurang-kurangnya golok di dalam rumah, sedangkan sekarang, tatkala dilakukan pengeledahan besar-besaran tidak didapati satu pisauupun atau senjata lain pada pemimpin-pemimpinnya. Dia ingat, bahwa di dalam suatu rapat umum dia pernah menerangkan bahwa dalam tahun 1930 saudara-saudara kita bangsa Tionghoa disamakan haknya dengan bangsa Eropa. Berhubung dengan itu ia berkata, bahwa konsekuensi penyamaan hak itu, orang Indonesia juga berhak mendapat hak-hak yang timbul dari undang-undang penyamaan hak itu. Dia selalu menerangkan, bahwa dia ingin sekali Indonesia merdeka. Dalam hampir saban rapat umum dia menerangkan yang demikian itu dengan tidak ada pembatasan. Tapi dia tidak pernah mengatakan, bahwa Indonesia mulai 1 Januari 1930 akan merdeka, dan bahwa menjelang waktu itu, di sini kan meletus revolusi. Jikalau dia pernah berkata begitu, dia merasa heran mengapa dia tidak ditangkap waktu itu juga.

Benar sekali! Kami tak pernah *tedeng aling-aling*, bahwa kami mengejar kemerdekaan. Kami tak pernah *tedeng aling-aling*, bahwa PNI punya idam-idaman ialah Indonesia merdeka! Tetapi kami tidak begitu tolol untuk mengira atau mengatakan bahwa kemerdekaan itu dalam satu helaan nafas saja akan datang!

O, memang, kalau umpamanya kemerdekaan itu bisa jatuh dari langit ini hari, kalau umpamanya bisa datang seorang malaikat manis menghadiahkan kemerdekaan itu ini hari, maka kami, dari Partai Nasional Indonesia, kami tidak akan menolaknya, tetapi sebaliknya akan bersukaria. Kami di dalam hal itu akan mengucap syukur dan alhamdulillah, oleh karena sepanjang keyakinan kami kemerdekaan adalah kunci pintu gerbang surga kebesaran kami. Kami memandang kemerdekaan ini hari itu sebagai suatu cita-cita yang seindah-indahnya, dan oleh karena itu, tidak adalah bagi kami kemerdekaan yang datangnya terlalu pagi.

Kami tidak mau bersikap sebagai kaum setengah sosialis, yang sudah lebih dulu – apriori- menyembunyi-nyembunyikan asasnya sendiri dengan menolak tuntutan merdeka ini hari. Menolak cita-cita merdeka ini hari. Tetapi,.....kemerdekaan tidak akan datang ini hari atau besok pagi! Kemerdekaan hanyalah hasil suatu usaha susunan dan usaha persatuan yang sesuatu rakyat harus kerjakan tak berhenti-hentinya dengan habis-habisan mengeluarkan keringat , membanting tulang, memeras tenaga. Kemerdekaan, menurut perbandingan pemimpin India Surendra nath Banneryee, adalah:

“laksana dewi yang cemburu, yang minta dipuja-puja dengan teliti sekali dan menuntut dari pemuja-pemujanya pembaktian yang rajin dan tiada hentinya.”

Kemerdekaan, begitulah kami sering-sering terangkan di dalam rapat-rapat umum, kemerdekaan tidaklah bagi kami. **Kemerdekaan adalah buat anak-anak kami, buat cucu-cucu kami, buat buyut- buyut kami yang hidup di kelak kemudian hari!**

Tidak! Untuk mencapai kemerdekaan itu, PNI tidak bermaksud pedang-pedangan atau golok-golokan atau bom-boman, tidak pula bermaksud menyindir atau memujikan pengrusakan keamanan umum atau pelanggaran kekuasaan pemerintah atau menjalankan hal-hal lain sebagai yang dituduhkan kepada kami dalam proses ini, tetapi PNI mengerjakan pembentukan kekuasaan yang halal itu, mengerjakan pembentukan kekuasaan itu menurut contoh organisasi modern, dan sebagaimana kaum buruh di Eropa yang juga memandang kekuasaan politik dan lenyapnya kapitalisme sebagai kunci satu-satunya bagi kebahagiaan yang sejati itu, dalam sementara menumpuk-numpuk pembentukan kekuasaan itu sudah mencoba-coba meringankan nasibnya dengan pelbagai aturan dan kemenangan-kemenangan yang bisa tercapai ini hari; sebagaimana kaum uurh Eropa itu dalam sementara mengejar maksud yang tertinggi itu, tak emoh akan keuntungan-keuntungan yang langsung, maka PNI pun dalam sementara mengejar kemerdekaan itu, sudah pula berjuang secara halal bagi keuntungan-keuntungan ini hari yang demikian itu juga adanya. PNI pun dalam sementara mengejar Indonesia merdeka itu, sudah pula berusaha di atas lapangan ekonomi, sosial dan politik sehari-hari, ya malahan memandang keuntungan-keuntungan ini hari itu sebagai syarat-syarat pula bagi kemerdekaan itu.

Ia mencoba mendirikan sekolah-sekolah, membangunkan rumah-rumah sakit, melawan riba, menyokong bank-bank nasional, membuka koperasi-koperasi, memajukan serikat-serikat sekerja dan perserikatan-perserikatan tani. Ia mencobba menghilangkan pasal-pasal pencegah penyebaran kebencian (*haatzaai-artikelen*) beserta pasal-pasal 153 bis-ter dan pasal 161 bis dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menghilangkan hak-hak *exorbitante*[3] dari gubernur jenderal. Ia mencoba jadi penyokong rakyat yang sengsara itu di dalam kebutuhannya sehari-hari. Dan jika PNI pada saat ini belum banyak hasil di atas lapangan itu; jika PNI belum banyak sekolah-sekolahnya, belum banyak poliklinik-polikliniknya, belum banyak koperasi-koperasinya; jika PNI belum dapat menghapuskan ranjau-ranjau politik yang kami sebutkan tadi, maka itu adalah oleh karena PNI baru berumur dua tiga tahun saja!

[1] Troelstra, dalam risalah SDAP “*Wat zij is en Wat zij Will*” Cetakan VIII hal. 54.

[2] Sekitar tahun 1930 ada issue yang mengatakan “Indonesia akan merdeka pada tahun 1930”. Sebagai sumber issue diarahkan oleh pemerintah kolonial, seolah-olah dari Bung Karno.

[3] Hak *exorbitante*, ialah hak istimewa Gubernur Jenderal mengasingkan tokoh pergerakan yang dianggap berbahaya bagi ketertiban umum.

IX

“Aksi Dengan Perbuatan”

Di dalam makna inilah kongres PNI di Jakarta tahun yang lalu mengambil putusan akan mengadakan “aksi dengan perbuatan” dalam tahun 1929-1930.

Di dalam makna “berusaha secara halal mendatangkan perbaikan-perbaikan yang bisa tercapai sekarang”, begitulah perkataan “aksi dengan perbuatan” itu harus diartikan. Sebelum kongres di Jakarta itu, sebelum Mei 1929 itu, maka PNI masih dalam zaman propaganda. Segala rapat-rapat, segala ucapan-ucapan, gerak-bangkitnya, sebelum kongres di Jakarta itu, terutama hanyalah untuk memperkenalkan diri belaka kepada rakyat Indonesia, mempropagandakan azas-azas dan tujuan-tujuannya, agar rakyat Indonesia mengetahui dan menjadi tertarik dengan kebenaran azas-azasnya itu. Hampir ditiap-tiap rapat umum yang diadakan oleh PNI di dalam fase yang pertama ini, kami hanya berpidato menerangkan panjang lebar kami punya keterangan azas belaka, sebagai yang terletak dalam buku anggaran dasar PNI itu. Hampir tiap-tiap rapat umum di dalam fase ini adalah rapat umum mendirikan cabang baru, atau rapat umum buat menambah terkenalnya diri dan azas PNI di tempat cabang yang sudah ada. Di dalam fase propaganda ini, maka PNI belumlah mengadakan “aksi”; ia belum mengusahakan organisasinya untuk mendatangkan perbaikan-perbaikan yang termaktub dalam daftar usahanya. Di dalam fase itu PNI hanyalah mempropagandakan dasar-dasarnya belaka, –belumlah ia “berusaha”, belumlah ia beraksi untuk melaksanakan rencana kerjanya!

Nah, tatkala di dalam permulaan tahun 1929 PNI semakin banyak anggotanya, tatkala pada permulaan tahun 1929 itu PNI sudah semakin banyak mempunyai tenaga, –tatkala pada saat itu PNI sudah cukup agaknya dipropagandakan, –maka pucuk pimpinan memandang perlu mengerjakan apa yang tertulis dalam daftar usahanya, pucuk pimpinan memandang perlu menginjak lapangan perbuatan, lapangan aksi. Azas dasar sudah cukup dipropagandakan, nah, rencana kerja sekarang harus dikerjakan, “aksi dengan perbuatan” sekarang harus dijalankan! Dan atas usul

pucuk pimpinan itu, maka Kongres Jakarta mengambil putusan untuk menjalankan aksi dengan perbuatan itu tentang pasal I d dan III d dari daftar usaha, yakni pasal-pasal “menghapus alangan-alangan yang merintangai kemerdekaan diri, kemerdekaan bergerak, kemerdekaan cetak-mencetak, kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul”, beserta “memajukan serikat-serikat sekerja dan perserikatan-perserikatan tani”. Sejak Kongres Jakarta itu maka fase propaganda sudah tertutup,—mulailah fase baru, mulailah fase pembangunan yang nyata, yakni fase bekerja, fase aksi.

Caranya beraksi? Caranya beraksi dengan perbuatan? Bom, bedil, dinamit? –Tidak, caranya aksi dengan perbuatan tidaklah dengan bom, tidaklah dengan bedil, tidak dengan dinamit, tidak pula dengan apa-apa yang dilarang hukum. Caranya tak lain dari mengadakan rapat-rapat umum di mana-mana untuk mempengaruhi, menggugahkan, membangkitkan pendapat umum, menulis karangan-karangan di dalam surat-surat kabar, mengadakan kursus-kursus kepada anggota-anggota sendiri tentang pasal-pasal itu tadi. Caranya tak lain adalah menggerakkan kekuasaan kami secara halal, membesar-besarkan kekuasaan itu. Caranya tak lain dari menggerakkan kamu punya kekuasaan secara halal, meluaskan kami punya pembentukan kekuasaan itu, tak lain dari sebagaimana SDAP beraksi, sebagaimana partai Sarekat Islam beraksi, **–yakni menggerakkan semangat sendiri dan menggerakkan semangat pendapat umum sehebat-hebatnya,—mengeluarkan tenaga bekerja ke dalam untuk melahirkan badan-badan organisasi yang perlu**, misalnya serikat-serikat sekerja dan tani itu tadi, mengeluarkan tenaga bekerja keluar untuk mengadakan desakan yang sekuat-kuatnya agar supaya tuntutan-tuntutannya bisa terlaksana adanya. Bukan desakan dengan bom, bukan desakan dengan dinamit, bukan desakan dengan apa-apa yang dilarang oleh hukum!—tetapi desakan hahal, desakan yang sebagaimana kami katakana di dalam pemeriksaan, oleh Dr. Ratulangi, tatkala ia masih radikal dan belum lunak seperti sekarang, disebutkan “desakan semangat”, “*moreel geweld*”.

Ah, tuan-tuan hakim, adakah perkataan-perkataan “aksi dengan perbuatan” tentu berarti pemberontakan, *barrikaden*[1], perkosaan,—adakah perkataan-perkataan itu tentu berarti kekerasan, atau setidaknya tidaknya, pelanggaran hukum?

Kaum sosialis Eropa toh sering juga menganjurkan “aksi dengan perbuatan” itu, sering juga menganjurka “aksi langsung”,–dan mereka bukankah juga tidak memaksudkan pelanggaran hukum, perkosaan atau bom-bom dengan “aksi langsung” itu?

“Oleh karena kekuasaan kapital besar justru tidak terutama duduk dalam parlemen, tapi diluarnya, maka kaum buruh tidak bisa membatasi perjuangannya kepada parlemen saja. Sebab itu kaum buruh, disamping senjata aksi di dalam parlemen, harus mempergunakan pula, di saat-saat perjuangannya yang besar, senjata aksi yang langsung, yakni aksi politik dari serikat-serikat sekerja” ...[2]

Begitulah misalnya pemuka SDAP berpidato,–dan semua orang mengetahui, bahwa dengan aksi langsung diluar parlemen itu, tidaklah dimaksudkan pelanggaran hukum atau perkosaan, atau pemberontakan!

Tidak, tuan-tuan Hakim, sekali lagi kami ulangi: tidak dengan maksud membikin huru-hara, tidak dengan maksud membikin *putsch*[3], tidak dengan maksud melanggar pasal 153 bis atau lain-lain hal yang dituduhkan di dalam proses ini, PNI mau menjalankan aksinya mengejar kemerdekaan, –tetapi PNI mau mencapai maksudnya dengan mengorganisasi dan menggerakkan suatu organisasi kekuasaan yang sah, suatu organisasi kekuasaan nasional modern, suatu massa-aksi nasional yang menolak tiap-tiap cara yang tidak nasionalistis adanya.

[1] Di Eropa, kalau kaum pemberontak membikin pemberontakan di kota-kota, maka mereka mendirikan barikade di jalan-jalan di dalam kota itu, yakni rintangan-rintangan dari meja, kursi, lemari, karung berisi tanah, dan lain-lain.

[2] Troelstra dalam bukunya, “*De Soc. Dem . na den oorlog*” 1921 hal. 17

[3] Putsch= pemberontakan kecil.

X

Revolusioner, revolusi

Tetapi perkataan “revolusioner”! Tetapi halnya PNI menyebutkan diri suatu partai “revolusioner”! Tidakkah itu berat bahwa PNI bermaksud mengadakan pemberontakan,, atau setidaknya-tidaknya bermaksud melanggar kekuasaan pemerintah, mengganggu keamanan umum?

O, memang, kami sering mengatakan bahwa kami adalah kaum revolusioner, kami sering menyebut PNI itu suatu partai revolusioner! PNI memang sedari mulanya adalah suatu partai revolusioner! Kalimat di dalam surat pendakwaan, bahwa PNI adalah kemudian menjadi revolusioner, kalimat itu adalah salah sama sekali. PNI tidak kemudian menjadi revolusioner, PNI adalah revolusioner sejak hari lahirnya! Tetapi kata revolusioner dalam makna kami, sama sekali tidak berarti “mau membikin pemberontakan” atau “menjalankan sesuatu pelanggaran hukum”. **Kata revolusioner di dalam makna kami adalah berarti “radikal”, “mau mengadakan perubahan dengan lekas”, “*omvormend in snel tempo*”**. Kata revolusioner di dalam makna kami haruslah diambil sebagai kebalikan kata “sabar”, kebalikan kata “sedang”. Kami, kaum PNI, kami memang bukan kaum sabar, kami memang bukan kaum sedang, kami memang bukan kaum “*uler kambing*”, yang selamanya kami sebut “kapuk”; kami adalah kaum “radikal”, kaum yang ingin mengadakan perubahan selekas-lekasnya, — **kami adalah kaum “Kepala Banteng”**.

Ah, tuan-tuan Hakim, perkataan “revolusioner” toh tidak di dalam makna kami saja berarti “ingin perubahan dengan lekas”, yakni “*omvormend in snel tempo*”. Kalau orang berkata “mesin uap itu mengadakan revolusi di dalam cara produksi”, kalau orang berkata, “Prof. Einstein sudah merevolusikan segenap ilmu alam”, kalau orang menyebutkan “Yesus kristus seorang revolusioner yang terbesar di seluruh riwayat dunia”, kalau pasifis Tolstoyanis[1] Ds. B. de Light menulis buku “*Christen revolutionnair*”, — ya, kalau kaum Marxis, berhubung dengan hukum evolusi di dalam pergaulan hidup (sebagai variasi atas Heraclitus “*panta rei*”) berkata : ”kita hidup di dalam revolusi terus-terusan, yakni di dalam *Revolution im*

Permanenz”, — adalah itu semua mengingatkan akan pedang, akan bedil, akan bom, akan dinamit, *barrikaden*, darah manusia dan hawa maut?

PNI adalah “revolusioner”, oleh karena PNI ingin mengadakan perubahan yang lekas dan radikal. Prof. Bluntschli, ahli hukum kerajaan yang termashur dan yang sama sekali bukan “*kaum merah*”, mengatakan bahwa revolusi umumnya berarti: “*umgestal-tung van Grund aus*”, yakni perubahan yang radikal, perubahan yang sedalam-dalamnya. Sebagaimana tiap-tiap partai yang mau mengadakan perubahan yang radikal adalah suatu partai revolusioner, makas PNI adalah pula suatu partai yang revolusioner, PSI adalah revolusioner, ISDP adalah revolusioner, sebagai Tuan Koch mengakui sendiri, segenap perjuangan kelas dari kaum buruh adalah revolusioner.

“Bukan bentuk-bentuk tertentu dari perjuangan kelas yang revolusioner, tetapi perjuangan kelas itu sendiri yang pada hakikatnya revolusioner, meskipun kebanyakan orang menganggap keributan dan pemogokan, itulah “yang disebut revolusioner,”

begitulah Stenhuis berkata[2]. Dengarkanlah pula bagaimana social democrat Liebknecht yang tersohor itu menerangkan perkataan “revolusioner”:

“kita mengalami “revolusi terus-terusan”, *Revolution im Permanenz*. Sejarah dunia adalah satu revolusi yang terus-menerus. Sejarah dan revolusi adalah sama. Proses perubahan yang revoolutioner dalam masyarakat dan Negara tak pernah terhenti sekejap mata pun, sebab Negara dan masyarakat adalah barang-barang yang hidup,— dan akhir proses perubahan, proses pembaharuan ini, adalah maut. Kami, kaum social democrat, mengerti akan hal itu dan itulah sebabnya kami membentuk suatu partai revolusioner, yakni suatu partai yang bermaksud menghilangkan rintangan-rintangan bagi perkembangan sewajarnya dari masyarakat dan Negara!”

dan dengarkanlah apa sebabnya Karl Marx menyebut kaumnya itu kaum revolusioner:

“Kaum sosialis adalah revolusioner, bukan karena mereka bertingkah laku keras, tapi karena anggapan mereka tentang tumbuhnya cara produksi, yakni: di dalam pertumbuhan itu harus

ditimbulkan pengertian-pengertian dan bentuk-bentuk baru tentang milik dan produksi. Sebaiknya dari anggapan orang sekarang, mereka itu revolusioner karena cita-cita dan usahanya menyusun dan membikin matang untuk itu, kelas yang harus akan melaksanakan system baru itu”.[3]

Sesungguhnya, jika sekalilah perkataan Karl Kautsky: “Sosial-demokrasi adalah suatu partai yang revolusioner, tapi bukan suatu partai yang bikin revolusi-revolusi!”[4]

Tidakkah ternyata sekarang kebenaran perkataan kami, bahwa SDAP adalah revolusioner, bahwa ISDP adalah revolusioner, bahwa Albarda cs. Adalah revolusioner, bahwa Stokvis, bahwa de Dreu, bahwa Middendorp adalah revolusioner? Tidakkah PNI revolusioner juga, tidakkah kami kaum revolusioner juga, — PNI dan kami, yang juga bermaksud “menghilangkan rintangan-rintangan bagi perkembangan sewajarnya dari masyarakat dan Negara”, juga bermaksud “menyusun dan membikin matang rakyat untuk itu”? Oleh karena itu, sekali lagi, memang PNI adalah revolusioner, kami adalah kaum revolusioner,— tetapi tidak karena apa-apa, melainkan hanya karena PNI ingin perubahan yang lekas dan radikal, ingin “*omvorming in snel tempo*”, ingin “*Umgestaltung von Grund aus*” itu. PNI dan kami adalah revolusioner, tidak karena PNI dan kami mau golok-golokan atau bom-boman atau dinamit-dinamitan, tidka karena PNI (dengan perkataan Kautsky) adalah “suatu partai yang bikin revolusi-revolusi”,— tetapi hanya karena PNI ingin menghilangkan segala hal yang merintang dan memundurkan suburnya pergaulan hidup Indonesia dan mengorganisir rakyat untuk menghilangkan rintangan-rintangan itu.

[1] Pasifis Tolstoyanis= orang yang cinta damai, seperti tercermin dari roman Tolstoy “*War and Peace*”

[2] Stenhuis dalam pidato 3 Oktober 1928 di hadapan Development Association di Amsterdam (lihat AID de Preangerbode 4-8-1930)

[3] Fenderik Peter Godfriend Quack dalam “*De Socialisten*” Jilid V, hal. 327.

[4] Karl Kautsky dalam “*Der WEg zur Macht*” hal. 57.

XI

Kekuasaan semangat

Amboi! Golok, bom dan dinamit! Kami dituduh golok-golokan, bom-boman dan dinamit-dinamitan! Seperti tidak ada senjata yang lebih tajam lagi daripada golok, bom dan dinamit! Seperti tidak ada senjata yang lebih kuasa lagi daripada puluhan kapal perang, ratusan kapal udara, ribuan, *ketian*, milyunan serdadu darat! Seperti tidak ada senjata semangat lagi, yang, jikalau sudah sadar dan bangkit dan berkobar-kobar di dalam kalbu rakyat, lebih hebat kekuasaannya dari seribu bedil dan seribu meriam, ya, seribu armada laut dan seribu tentara yang lengkap alat dan lengkap senjata! Seperti kami tak mengetahui akan kekuasaan semangat rakyat yang bisa dibikin mahasakti dan mahaadigjaya itu. Orang menuduh kami mau membikin ramai-ramai dengan Mercon sumet dan mercon banting! Seperti tidak ada ilmu ketimuran lagi, yang dinyanyikan dalam buku Bagawad Gita dan yang mengajarkan kekuatan semangat itu!

“Ketahuilah, senjata tiada menyinggung hidup;
Api tiada membakar, tiada air membasahi,
Tiada angus oleh angin yang panas.
Tiada tertembusi,
Tiada terserang, tiada terpijak dan merdeka
Kekal abadi, di mana-mana, tetap tegak,
tidak nampak, terucapkan tiada,
Tiada terangkum oleh kata, pikiran, senantiasa pribadi tetap
–Begitulah disebut jiwa!”

Tidak, PNI tidak mencari kekuasaan dalam ribut-ribut atau bom-boman atau dinamit-dinamitan, tidak pula mencari tenaga dalam sengaja melanggar undang-undang sebagai dituduhkan disini. PNI mencari kekuasaan pembentukan tenaga dalam organisasi sosial dan organisasi semangat rakyat yang sadar dan bangkit, mencari kekuasaan pembentukan tenaganya dengan lebih lagi menghidup-hidupkan dan menyusun semangat rakyat yang oleh pengaruh imperialisme turun-temurun, kemarin sudah hampir padam, tetapi kini mulai menyala lagi. PNI mengetahui, PNI insaf, PNI yakin, bahwa jika semangat rakyat itu sudah tersusun serta menyala-nyala berkobar-kobar,

tidak ada satu kekuasaan duniawi yang bisa membinasakannya, PNI yakin bahwa, jika ia sudah menggenggam senjata semangat yang sedemikian itu, ia tentu mencapai segala apa yang dimaksudkan, *zonder* pedang, *zonder* bedil, *zonder* bom, *zonder* meriam, ya, *zonder* “kocak-kocakan” sengaja melanggar pasal 153 bis dan 169 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai yang dituduhkan kepada kami dalam proses ini. Dengan senjata semangat yang demikian itu, maka ia dengan sebenar-benarnya menggenggam senjata yang mahasakti, dengan sebenar-benarnya beraji *candrabirawa* dan *pancasona*, – mahhakuasa, kekal abadi, tiada terkalahkan!

**‘Siapa bisa merantai suatu bangsa, kalau semangatnya tak mau dirantai?
Siapa bisa membinasakan sesuatu bangsa, kalau semangatnya tak mau dibinasakan?’**

Begitulah sarojini Naidu, Srikandi India, berpidato tatkala membuka Kongres Nasional India yang ke-40^[1] dan Mac Swiney, pendekar irlandia yang termashur itu, di dalam bukunya “*Principes de la Liberte*” menulis:,

“Sebab seorang yang dirampas senjatanya, tidak bisa melawan orang banyak, satu tentara tak bisa mengalahkan tentara-tentara yang tak terpermanai banyaknya, – tapi semua tentara dari semua negara di seluruh dunia bersama-sama, tidak kuasa menundukkan satu jiwa, yang telah bertekad untuk berjuang mempertahankan hak.”^[2]

Sesungguhnya, buat apa bom-boman atau dinamit-dinamitan, buat apa kocak-kocakan sengaja melanggar pasal 153 bis dan 169 – kalau kami dengan pembentukan kekuasaan organisasi semangat itu saja sudah mempunyai kepastian akan mencapai semua maksud?

[1] Sarojini Naidu (1879-1949) pejuang dan pujangga wanita India, pengikut M.K. Gandhi, dalam buku “Asia”.

[2] Mac Swiney dalam buku. “Principes de la liberte” dikutip dari “Intery, en Irlande”, hal. 40.

XII

Nasionalisme nyawanya pembentukan kekuasaan

PNI oleh karenanya, tak berhenti-hentinya menyubur-nyuburkan semangat rakyat itu. Semangat tiap-tiap rakyat yang disengsarakan oleh suatu keadaan, baik rakyat proletar di negeri-negeri industri, maupun rakyat di tanah-tanah jajahan, adalah semangat ingin merdeka: Nah, **kami menyuburkan semangat ingin merdeka itu pada rakyat Indonesia. Kami menyuburkannya tidak terutama dengan keinsafan kelas sebagai pergerakan kaum buruh umumnya, tetapi terutama dengan keinsafan bangsa, dengan keinsafan nasionaliteit, dengan nasionalisme.** Sebab tiap-tiap rakyat yang dikuasai oleh bangsa lain, tiap-tiap rakyat jajahan, tiap-tiap rakyat yang saban hari, saban jam, merasakan imperialisme bangsa lain, — tiap-tiap rakyat yang diperintahi secara jajahan demikian itu, adalah berbudi akal nasionalistis. Rasa pertentangan, yang di Eropa atau di Amerika, berwujud rasa pertentangan kelas, oleh karena kaum yang berkuasa dan kaum yang dikuasai di sana terdiri dari satu bangsa, satu kulit, satu rasa, — rasa pertentangan itu di suatu negeri jajahan adalah menyatu dengan pertentangan nasionalistis. Bukan terutama rasa pertentangan si buruh terhadap si kapilistis, bukan terutama rasa pertentangan kelas yang kita alami dalam suatu negeri jajahan, tetapi, rasa pertentangan si hitam terhadap si putih, si Timur terhadap si Barat, si terjajah terhadap si penjajah.

PNI mengerti akan hal ini. PNI mengerti, bahwa di dalam kesadaran nasioanlistis, di dalam nasionalisme inilah letaknya daya, yang nanti bisa membuka kenikmatan hari kemudian. PNI oleh karenanya, menyubur-nyuburkan dan memelihara nasionalisme itu, dari nasionalisme yang kurang hidup dibikin jadi nasionalisme yang hidup, dari nasionalisme yang instinktif jadi nasionalisme yang sadar, dari nasionalisme yang statis jadi nasionalisme yang dinamis, — pendek kata: dari nasionalisme yang negatif jadi nasionalisme yang positif. Dibikin jadi nasionalisme positif, Tuan-tuan Hakim, dibikin nasionalisme positif, sebab dengan nasionalisme yang hanya rasa protes atau rasa dendam saja terhadap imperialisme, kami belumlah tertolong. **Kami punya nasionalisme haruslah suatu nasionalisme yang positif, suatu nasionalisme yang positif, suatu nasionalisme**

yang mencipta, suatu nasionalisme yang “mendirikan”, suatu nasionalisme yang “mencipta dan memuja”. Dengan nasionalisme yang positif itu maka rakyat Indonesia bisa mendirikan syarat-syarat hidup merdeka yang bersifat kebendaan dan kebatinan. Dengan sekarang sudah menghidup-hidupkan nasionalisme yang positif itu, maka ia bisa menjaga, jangan sampai nasionalisme itu menjadi nasionalisme yang benci kepada bangsa lain, yakni jangan sampai nasionalisme itu menjadi nasionalisme yang chauvinistis atau jingo- nasionalisme yang agresif, sebagai yang kita alami jahatnya dalam perang dunia yang lalu, – suatu jingo-nasionalisme “*of gain and loss*” – sebagai kata C.R. Das – yang agresif, yakni suatu jingo- nasionalisme yang bersemboyan “untung atau rugi” dan menyerang kian kemari. Dengan nasionalisme yang positif itu, maka rakyat Indonesia merasai kebenaran kalimat-kalimat Arabindo Chose, yang mengatakan bahwa nasionalisme yang demikian itu adalah sebenarnya Allah sendiri.

Dengan nasionalisme yang demikian itu, maka rakyat kami tentulah melihat hari kemudian itu sebagai fajar yang berseri-seri dan terang cuaca, tentulah hatinya penuh dengan pengharapan-pengharapan yang menghidupkan. Tidakkah lagi hari kemudian itu dipandang olehnya sebagai malam yang gelap-gulita, tidakkah lagi hatinya penuh dengan syak dan dendam belaka. Dengan nasionalisme yang demikian itu rakyat kami akan rida dan suka hati menjalankan segala pengorbanan untuk membeli hari kemudian yang indah yang menimbulkan hasrat itu. Pendek kata: dengan nasionalisme yang demikian itu rakyat kami akan bernyawa, akan hidup, dan tidak laksana bangkai sebagai sekarang!

“Oleh karena rasa kebangsaanlah,” begitu pemimpin Mesir yang termashur, Mustafa Kamil, menggambarkan nasionalisme positif itu:

“Oleh karena rasa kebangsaanlah, maka bangsa-bangsa yang terkebelakang lekas mencapai peradaban, kebesaran dari kekuasaan. Rasa kebangsaanlah yang menjadi darah yang mengalir dalam urat-urat bangsa-bangsa yang kuat dan rasa kebangsaanlah yang memberi hidup kepada tiap-tiap manusia yang hidup”.^[1]

Zonder nasionalisme tiada kemajuan, zonder nasionalisme tiada bangsa.

“Nasionalisme adalah-milik yang berharga yang memberi kepada suatu negara tenaga untuk mengejar kemajuan dan memberi kepada suatu bangsa tenaga untuk mempertahankan hidupnya,”[2] begitulah Dr. Sun Yat Sen berkata.

[1] Mustafa Kamil dalam “The New World of Islam” terbitan Lothrop Stoddard, hal. 151.

[2] Sun Yat Sen dalam bukunya “San Min Chu I” (telah ada terjemahan bahasa Indonesia).

XIII

Membangkitkan Nasionalisme: Hari dulu, hari sekarang, hari kemudian

Dan caranya menyuburkan nasionalisme itu? Jalannya menghidupkannya? Jalannya adalah tiga:

Pertama: kami menunjukkan kepada rakyat, bahwa ia punya hari dulu, adalah hari dulu yang indah;

Kedua: kami menambah keinsafan rakyat, bahwa ia punya hari sekarang, adalah hari sekarang yang gelap;

Ketiga: Kami memperlihatkan kepada rakyat sinarnya hari kemudian yang berseri-seri dan terang cuaca, beserta cara-caranya mendatangkan hari kemudian yang penuh dengan janji-janji itu.

Dengan lain perkataan, **PNI membangkitkan dan menghidupkan keinsafan rakyat akan ia punya “masa silam yang indah”, “masa yang gelap gulita” dan; “janji-janji suatu masa depan yang melambai-lambai, berseri-seri”**. PNI mengetahui, bahwa hanya trimurti inilah yang akan bisa menjadikan kembang Jayakusuma yang menghidupkan kembali nasionalisme rakyat yang layu.

Kami punya hari dulu yang indah, kami punya masa silam yang gemilang! Ah, Tuan-tuan Hakim, siapakah orang Indonesia yang tidak mengeluh hatinya, kalau mendengarkan cerita tentang keindahan itu, siapakah yang tidak menyesalkan hilangnya kebesaran-kebesarannya! Siapakah orang Indonesia yang tidak hidup semangat nasionalnya, kalau mendengarkan riwayat tentang kebesaran kerajaan Melayu dan Sriwijaya, tentang kebesaran Mataram yang pertama, kebesaran zaman Sindok dan Erlangga dan Kediri dan Singasari dan Majapahit dan Pajajaran, – kebesaran pula dari Bintara, Banten dan Mataram kedua di bawah Sultan Agung! Siapakah orang Indonesia yang tak mengeluh hatinya kalau ia ingat akan benderanya yang dulu ditemukan dan dihormati orang sampai di Madagaskar, di Persia dan di Tiongkok! Tetapi sebaliknya, siapakah tidak hidup harapannya dan kepercayaannya, bahwa rakyat yang demikian kebesarannya hari dulu itu, pasti cukup kekuatan untuk mendatangkan hari kemudian yang indah pula, pasti masih juga mempunyai kebiasaan-kebiasaan menaik lagi di atas tingkat

kebesaran di kelak kemudian hari? Siapakah yang tidak seolah-olah mendapat nyawa baru dan tenaga baru, kalau ia membaca riwayat zaman dulu itu! Begitulah pula rakyat, dengan mengetahui kebesaran hari dulu itu, lantas hiduplah rasa nasionalnya, lantas menyala lagilah api harapan di dalam hatinya, dan lantas mendapat lagilah rakyat itu nyawa baru dan tenaga baru oleh karenanya.

O, memang, zaman dulu zaman feodal, zaman sekarang zaman modern. Kami bukan mau menghidupkan lagi zaman feodal itu; kami bukan pula mufakat dan cinta kepada aturan-aturan feodal itu. Kami mengetahui kejelekan-kejelekannya bagi rakyat. Kami hanyalah menunjukkan kepada rakyat, bahwa feodalisme kami hari dulu itu adalah feodalisme yang hidup, feodalisme yang tidak sakit-sakitan, feodalisme yang sehat dan bukan feodalisme yang penyakitann, – feodalisme yang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan berkembang dan yang, umpamanya tidak diganggu hidupnya oleh imperialisme asing, niscaya bisa “meneruskan perjalanannya”, bisa “menyelesaikan evolusinya”, yakni niscaya bisa hamil dan akhirnya melahirkan suatu pergaulan hidup modern yang sehat pula![1]

Tetapi bagaimana pergaulan hidup kami hari sekarang ini? Bukan sehat, bukan penuh dengan kemungkinan-kemungkinan berkembang, tetapi sakit-sakitan, “kosong”. Pada permulaan, tatkala kami menggambarkan nasib rakyat Indonesia pada masa ini, tatkala kami menceritakan caranya imperialisme mengobrak-abrik pergaulan hidup kami itu, maka Tuan-tuan sudah mendapat sedikit pemandangan tentang keadaan hari sekarang itu, maka tuan-tuan sudah mendapat sedikit pemandangan tentang keadaan hari sekarang itu. Berhubung dengan sempitnya waktu, cukuplah sekian saja, tak perlulah kami tambah-tambahi. Tetapi perlu sekalilah kami terangkan di sini, bahwa keinsafan akan jeleknya nasib hari sekarang inilah yang paling menghidupkan rasa nasional rakyat.

Memang bukan saja bagi rakyat kami, tetapi bagi tiap-tiap rakyat lain dan tiap-tiap manusia, tiap-tiap makhluk yang bernyawa, pengetahuan akan suatu nasib yang jelek adalah sumber keinginan akan nasib yang lebih nyaman baginya. Tidak ada keinginan, tidak ada harapan, tidak ada nafsu, kalau tidak ada rasa tak puas dengan keadaan yang ada.

Itulah sebabnya, maka tiap-tiap perkumpulan atau tiap-tiap surat kabar di tiap-tiap negeri dan di tiap-tiap zaman, suka sekali “membongkar keadaan”, yakni suka sekali membeber-beberkan keadaan-keadaan yang ia tidak sukai. Jikalau AID de Preangerbode mengamuk perkara politik pemerintah sekarang atau perperkara pergerakan rakyat yang ia takuti, jikalau PEB geger membicarakan bahaya yang mengancam kepentingan imperialisme, jikalau *Vaderlandsche Club* memaki-maki ke kanan dan ke kiri, maka semua itu adalah oleh karena mereka tak senang akan keadaan sekarang dan oleh karena mereka dengan menyiarkan mereka punya ketidakpuasan atau ketidaksenangan itu, bermaksud membangunkan atau mengeraskan lagi keinginan, harapan, nafsu kaumnya akan keadaan yang lebih nyaman baginya. Begitu pula PSI, Budi Utomo, Pasundan dan perkumpulan atau surat kabar Indonesia mana pun juga, dengan mereka punya propaganda atau protes-protes tak lain daripada bermaksud menyebarkan mereka punya ketidaksenangan dan membesarkan lagi keinginan dan nafsu mereka punya kaum.

Nah, kalau PNI lebih menginsafkan lagi rakyat Indonesia akan kepahitan nasibnya hari sekarang itu, maka ia tak lain-pula dari bermaksud memperkeraskan lagi keinginan dan harapan rakyat itu akan keadaan-keadaan yang lebih layak. PNI mengetahui, bahwa keinginan dan harapan inilah yang menjadi pendorong nafsu berusaha, pendorong “nafsu mendirikan”, pendorong “nafsu mengadakan”. PNI mengerti, bahwa makin mendalam keinsafan rakyat akan getirnya nasib hari sekarang itu, membikin pula makin rajin dan makin maunya rakyat berusaha membanting tulang dan memeras tenaga untuk terkabulnya kesanggupan-kesanggupan hari kemudian yang indah itu, – mengerti, bahwa makin merasuk keinsafan akan perihnya hari sekarang itu di dalam daging dan sumsum rakyat, membikin lebih hidupnya rasa nasional, lebih berkobar-kobarnya nasionalisme positif yang memang sudah menyala!

Orang boleh menamakan ini menyebarkan “ketidaksenangan”, orang boleh menamakan ini “membikin pahit hati dan dendam hati pada rakyat”, orang boleh mengatakan kami penghasut, pembakar nafsu, *ophitser, opruier* – kami menjawab: apa bedanya perbuatan kami itu sebagai tadi kami terangkan, dengan perbuatan AID dna VC dan PEB dalam hakikatnya, apa bedanya dengan perbuatan PSI, BU,

Pasundan dan lain-lain? Lagi pula: kami tidak pernah meninggalkan obyektifitas, kami tidak menyebarkan yang dinamakan “ketidaksenangan” itu untuk “ketidaksenangan”, kami tidak “membikin pahit hati dan dendam” untuk membangkitkan rasa kebencian dan rasa kedengkian atau nafsu-nafsu lain yang rendah, – kami menyebarkan yang dinamakan “ketidaksenangan” itu hanyalah untuk lebih menghidupkan dan lebih mengeraskan lagi keinginan rakyat akan keadaan yang lebih nyaman, lebih membesarkan kemuannya berusaha, lebih menyuburkan nasionalisme positif adanya. , ‘

Kami di sini ingat akan pidato Dr. Sun Yat Sen yang berkata: “Jikalau keadaan yang tadi saya gambarkan itu....benar, maka haruslah kita menanam di dalam ingatan kita, bagaimana berbahayanya kedudukan kita sekarang ini dan betapa gentingnya waktu yang sekarang kita jalani, barulah kita bisa mengetahui, bagaimana caranya menghidupkan kembali nasionalisme kita yang telah padam itu.” “jikalau kita mencoba menghidupkan kembali dengan tidak mengerti betul keadaan, maka akan hilangla segala harapan buat selama-lamanya dan bangsa Tionghoa akan binasa.” “kita sendiri harus mengetahui dulu keadaan-keadaan, kita harus mengerti bahwa bencana-bencana ini sangat mengancam, kita harus mendengungkannya ke mana-mana sehingga tiap orang menjadi insaf betapa besar kesedihan kita, jikalau bangsa kita sampai jatuh”.

“Apabila kita hendak mengobarkan nasionalisme, maka haruslah lebih dulu kita insafkan bangsa kita yang 400 juta itu, bahwa saat matinya sudah dekat!”[2]

Artinya: membikin rakyat insaf akan keadaannya yang sengsara itu, agar supaya nasionalismenya bangun dan ia mau bergerak, – itulah pengajaran pemimpin besar ini. Itulah yang kami kerjakan pula.

Ketidaksenangan yang memang ketidaksenangan, bukanlah bikinan kami; ketidaksenangan yang tulen dan asli itu, adalah bikinan imperialisme sendiri!

Tuan-tuan Hakim yang terhormat, begitulah bagian yang pertama dan bagian yang kedua dari usaha PNI menyuburkan semangat nasional itu: membangunkan keinsafan akan hari dulu dan hari sekarang. Tentang bagian yang ketiga, yakni bagian menunjukkan keindahan sinar hari kemudian beserta cara-cara mencapainya, tentang bagian yang ketiga itu, kami, juga oleh sempitnya tempo, tak

usahlah panjang kata: sebab, segenap usaha PNI akan pembentukan kekuasaan, segenap aksi PNI keluar dan ke dalam, segenap gerak-bangkitnya, ya, segenap jiwa raganya PNI, adalah cara-cara mendatangkannya dan melaksanakan kesanggupan-kesanggupan hari kemudian itu. Dan akan bisanya rakyat Indonesia mencapainya, buat kami kaum PNI bukanlah teka-teki lagi: **rakyat Indonesia yang dahulu begitu bersinar-sinar dan tinggi kebesarannya, meskipun sekarang sudah hampir sebagai bangkai, rakyat Indonesia itu pasti cukup kekuatan dan cukup kebisaaan mendirikan gedung kebesaran pula di kelak kemudian hari, pasti bisa menaiki lagi ketinggian tingkat derajatnya yang sediakala, ya, melebihi lagi ketinggian tingkat itu!**

Tetapi wujudnya hari kemudian?
Bagaimana wujudnya hari demikian itu?

Tidak ada satu manusia yang bisa menggambarkan hari kemudian dengan seksama. Tidak ada satu manusia yang bisa menentukan lebih dulu wujud hari kemudian menurut kemauannya. Tidak ada satu manusia yang bisa mendahului riwayat. Kita hanya bisa menetapkan ancer-ancernya saja, kita hanya bisa mempelajari tendensinya. Misalnya kaum Marxis pun tak bisa menunjukkan wujudnya pergaulan hidup sosialis dengan saksama, melainkan juga hanyalah bisa mengetahui garis-garisnya yang besar dan tendensinya belaka. Hari kemudian Indonesia kini hanyalah tampak sinarnya saja yang indah sebagai sinar fajar yang akan menyingsing, hanyalah kedengaran janji-janjinya saja sebagai merdunya gamelan pada malam terang bulan yang kedengaran dari jauh. Sebagai di dalam cerita wayang sebelum ksatria Dananjaya datang, kita lebih dulu sudah melihat sinar tejanya dan sudah mendengar nyanyian burung-burung yang mengantarkan dan mengikutinya, – begitulah pula datangnya hari kemudian yang indah itu kini sudah dialamatkan lebih dulu kepada kita, yang menunggu-nunggunya dengan hati yang mengharap-harap. Kita sudah mendengar janji-janjinya akan rezeki berjuta-juta yang tidak diangkut ke negeri lain, akan peri kehidupan rakyat yang karena itu, senang dan selamat, akan keadaan sosial yang sesuai dan memenuhi kebutuhannya, akan susunan hidup politik yang secara kerakyatan longgar, akan kemajuan seni, ilmu kebudayaan yang tak teraleng-alang. Kita dengar janjinya akan datang suatu Republik Indonesia Serikat, yang hidup di dalam

persobatan dan kehormatan dengan bangsa-bangsa lain, akan suatu bendera Indonesia yang menghiasi angkasa Timur. Kita mendengar janjinya akan suatu bangsa yang teguh dan sehat, ke luar dan ke dalam....

[1] Untuk mengerti kalimat-kalimat ini, orang harus ingat, pergaulan hidup itu “tidak diam”. Tetapi senantiasa hidup, senantiasa maju, senantiasa ber-evolusi.

[2] Dalam buku “*San Min Chu I*”.

XIV

Urut saraf pembentukan kekuasaan : Empat Macam

Tuan-tuan hakim yang terhormat, dengan menggambarkan tiga bagian tentang hari dulu, hari sekarang dan hari kemudian itu, maka kami sudahlah dengan singkat sekali menunjukkan usaha PNI tentang nyawanya pembentukan kekuasaan, yakni nasionalisme, kecintaan pada tanah air dan bangsa, rasa gembira atas kebahagiaannya, rasa mengeluh atas kemalangannya. Marilah kami sekarang menjawab pertanyaan, apakah urat-urat dan saraf-saraf pembentukan kekuasaan PNI itu. Urat-urat dan saraf-saraf pembentukan kekuasaan PNI adalah bertentangan dengan urat-urat dan saraf-saraf sistem imperialisme di sini. Urat-urat dan saraf-saraf sistem imperialisme yang terpenting adalah empat rupa:

Pertama: sistem imperialisme melahirkan politik *divide et impera*, yakni politik memecah-mecah;

Kedua: sistem imperialisme menetapkan rakyat Indonesia di dalam kemuduran;

Ketiga: sistem imperialisme membangunkan kepercayaan di dalam hati dan pikiran rakyat, bahwa bangsa kulit berwarna itu memang bangsa yang kurang “karat”nya, dan bahwa bangsa kulit putih memang “*adhi-adhining*” bangsa;

Keempat: Sistem imperialisme membangunkan kepercayaan di dalam hati dan pikiran rakyat pula, bahwa kepentingan-kepentingan rakyat itu adalah sesuai dan sama dengan kepentingan-kepentingan kaum imperialisme itu, sehingga rakyat itu jangan menjalankan politik *selfhelp* dan politik ingin merdeka, tetapi haruslah memeluk politik bersatu dengan kaum pertuanan, yakni politik asosiasi[1]

Nah, sama sekali bertentangan dengan politik *divide et impera* inilah, sama sekali bertentangan dengan politik yang menetapkan rakyat di dalam kemunduran; sama sekali berhadap-hadapan dengan politik yang bermaksud “memasukkan pikiran tentang kurang harganya bangsa berwarna dan tinggi harganya bangsa kulit putih”, sama

sekali kontra politik asosiasi itulah urat-urat dan saraf-saraf pembentukan kekuasaan PNI.

a. Kontra politik memecah belah

PNI menjawab politik *divide et impera* itu dengan mendengungkan tekad persatuan Indonesia, menjawab politik yang memecah belah itu dengan dayanya mantram nasionalisme Indonesia yang merapatkan barisan. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, beradab-adablah rakyat kami itu kemasukan baji pemecah tak berhenti-hentinya, baik di zaman kompeni maupun di zaman modern. **Memang di dalam perceraian dan di dalam ketidakrukunan itulah letaknya kelemahan kami, di dalam perceraian kami itulah letaknya kemenangan musuh. “Verdeel en heers”, [2] — itulah mantram tiap-tiap rakyat yang mau mengalahkan rakyat lain, mantram imperialisme di mana-mana zaman dan di mana-mana negeri. “Verdeel en heers” adalah mantram bangsa Roma yang memang penemu mantram itu, adalah mantram bangsa Spanyol dan Portugis di zaman dulu yang mengibarkan benderanya di negeri-negeri orang lain, adalah mantram bangsa Inggris mendirikan ia punya kerajaan dunia “British Empire”. Dengarlah bagaimana Prof. Seeley di dalam bukunya yang termashur “The Expansion of England” menceritakan “politik divide et impera” di India:**

“Jikalau Inggris, yang bukan negeri militer itu, dengan sesungguhnya harus menguasai penduduk yang beberapa juta jumlahnya dengan suatu kekuatan militer Inggris, tak perlu dikatakan, bahwa beban yang sebesar itu melebihi kekuatan kami. Tapi tidaklah demikian halnya, oleh karena Inggris menaklukkan India dan tetap menguasainya terutama dengan bantuan pasukan-pasukan India dan dengan uang India.... Jika sekiranya di India bisa timbul suatu gerakan nasional, seperti yang kita lihat di Italia dulu, maka kekuasaan Inggris belum lagi akan bisa memberikan perlawanan sekuat perlawanan Ustria di Italia, tapi segera tentu roboh”. “Suatu kumpulan orang seorang-seorang, yang tidak terikat oleh perasaan-perasaan dan kepentingan-kepentingan yang sama, mudah ditaklukkan, oleh karena mereka bisa diadu-dombakan.” “Seperti Tuan lihat, pemberontakan itu sebagian besar bisa dipadamkan dengan jalan mengadu-dombakan rakyat India yang satu dengan yang lain.” [3]

Dan di Indonesia pun imperialisme-tua dan imperialisme-modern tak lupa akan kemajuan mantram itu; di Indonesia pun baji-pemecah tak berhenti-hentinya bekerja:

“- musuh-musuhnya yang paling berbahaya dilumpuhkannya sehingga hampir-hampir tidak bertenaga apa-apa lagi dengan menjalankan politik “*divide et impera*”; kemenangan-kemenangan yang paling gemilang didapatnya dengan senjata orang yang lemah, perhitungan yang licik dan tipu daya”-

begitulah Prof. Veth menggambarkan politik imperialisme-tua di Indonesia itu dan Clive Day menulis:

“*Divide et impera*”, itulah peribahasa asli yang dituruti apabila berhubungan dengan kerajaan-kerajaan anak negeri dan itulah asas yang dipakai buat sebagian besar oleh orang Belanda untuk mencapai hasil yang baik,”[4]

Imperialisme tua kini sudah mati; tetapi tidak matilah warisan yang diberikannya kepada imperialisme-modern, yakni warisan japa-mantram “*divide et impera*” yang ampuh, yang bertuah itu. Tidak sebagai dulu, dipakai menakluk-naklukkan dan melebar-lebarkan jajahan,—kini semua pulau sudah takluk, “pembulatan batas negara” (staatsafronding) sudah selesai,— tidak sebagai dulu dibarengi dengan gemerincingnya pedang, detusnya bedil dan gunturnya meriam, tetapi dipakai untuk mengekalkan apa yang sudah tercapai dengan melalui (menurut kata Stokvis) “jalan-jalan yang lebih sunyi”, “*Stillere wegen*”.

Memang, semua kepulauan sudah takluk, “pembulatan batas negara” sudah selesai, —lahirnya Indonesia dibikin satu, lahirnya diikat di dalam satu persatuan, tetapi “persatuan” ini, menurut perkataan seorang sosialis adalah suatu:

“persatuan yang ditaklukkan, yang hanya persatuan ketaklukkan belaka,”[5]

dan amboi.....janganlah batinnya menjadi satu, janganlah semangatnya kemasukan nasionalisme dan menjadi semangat bangsa! Sebab kaum imperialisme tahu, bahwa suatu rakyat yang tiada nasionalisme dan tiada semangat bangsa adalah sebagai Dr. Sun Yat Sen mengatakan, hanya “*a sheet of loose sand*” belaka, sebagai pasir yang meluruh dan *ngeprul* dan tiada hubungan satu sama lain,

yang bisa dituiptiupkan ke mana-mana dan bisa dikorek semau-maunya....,

Semangat, semangatlah yang terutama oleh sistem imperialisme-modern itu dijatuhi mantram, di-“pecah-pecah” supaya sistem itu bisa “memerintah” selama-lamanya. Semangatlah yang terutama dimasuki baji-pemecah agar supaya tidak bisa menjadi semangat nasionalisme yang masuk sebagai semen di dalam pasir yang ngeprul itu dan membikin daripada satu blok beton mahabesar yang tak bisa hancur walaupun dimeriam.

Kaum imperialisme-modern tak lupa akan wejangan karuhun-karuhunnya itu. Japamantram “*divide et impera*” tak lupa saban hari, saban jam dikemah-kemihkan. Bilaman India menyatakan diri adalah suatu bangsa yang ditaklukkan, “begitulah Prof. Seeley mengajarkan padanya,[6]

“Bilamana India menyatakan diri adalah....suatu bangsa yang ditaklukkan, kita pun segeralah tahu bahwa kita tidak mungkin akan bisa mempertahankannya”... “Apabila, oleh suatu sebab, penduduk mulai merasa tergolong dalam satu kebangsaan, maka saya tidak akan berkata ada alasan kita khawatir akan keselamatan pemerintahan kita; tidak, saya akan berkata: kita harus segera melepaskan segala harapan!”

[1] Bandingkan dengan pikiran-pikiran kami dengan pikiran-pikiran Moh.Hatta di dalam bukunya “Indonesia Vrij” (menuju Indonesia Merdeka) dan juga pikiran-pikiran Dr. Sun Yat Sen.

[2] *Verdeel en heers*= pecahkanlah, dan kuasai

[3] Sir John Robert Seeley dalam bukunya “The Expansion of England” terjemahan Steinmetz, hal.175, 204.

[4] Clive Day, dalam bukunya yang diterjemahkan ke bahasa Belanda oleh Bosboom dengan judul “Nederlandsch Beheer”, hal.29.

[5] Daan van der Zee dalam buku “De SDAP en Indonesiee” hal. 29.

[6] John R. Seely, *ibid*, hal. 204, 209.

XV

Segera melepaskan segala harapan!” “*Onmiddellijk alle hoop opgeven!*” Sesungguhnya, suatu ajaran yang mendahsyatkan! Tetapi, tidak, tidak usah dahsyat dan kurang tidur!

Sebab tidakkah cukup surat-surat kabar sebagai AID de Preangerbode, Java Bode, Nieuws van den Dag, de Locomotief, Soerabajaasch Hahdelsblad, dan lain-lain yang saban minggu, saban hari, biasa menebar-nebarkan benih pemecahan itu, berisi caci-maki atas tiap usaha persatuan dan atas tiap usaha membangunkan nasionalisme dari pihak “*inlander*” (bumiputra)? Tidakkah bahasa Indonesia, yakni bahasa persatuan akan lekas dihapuskan dari sekolah-sekolah dan tidakkah sistem pendidikan di sekolah-sekolah itu sudah membunuh tiap-tiap rasa kebangsaan?[1] Tidakkah masih ada seorang Colijn, yang dengan bukunya “*Koloniale Vraagstukken van Heden en Morgen*” mencoba mewujudkan asas *divide et impera* itu di dalam suatu susunan administrasi pemerintahan yang bernama “*eilandgouvernementen*”— pemerintahan sepulau-sepulau—, masih ada seorang De Kat Angelino yang membikin tebal yang penuh dengan lafal-lafal pembunuh nasionalisme Indonesia itu? Tidakkah masih ada seorang Couvreur, yang di dalam suatu nota memujikan kepada pemerintah:

“pembukaan Pulau Bali untuk misi dan pengkristenan penduduknya. Dengan begitu di masa depan akan didapat suatu pulau Bali yang beragama Room-Katolik, yang akan merupakan baji antara Jawa dan pulau-pulau di sebelah timur. Baji seperti itu sudah ada antara Aceh dan Minangkabau, yakni: negeri Batak yang sudah dikristenkan”,[2]

—tidakkah masih ada seorang Couvreur yang memujikan baji yang demikian itu, sehingga dari kalangan bangsa Indonesia-Kristen terdengar protes yang berbunyi:

“Astaga, suatu baji Kristen! Haruskah kita, bangsa Indonesia Kristen, yang meskipun berbeda agama dengan orang lain bangsa kita, adalah putra-putra Ibu Indonesia juga, — haruskah kita membiarkan agama kita yang suci itu dipakai buat maksud itu? Haruskah kita membiarkan agama Kristen yang luhur itu dipakai

sebagai alat untuk mencegah persatuan kebangsaan kita dan untuk mengasingkan putra-putra Ibu Indonesia yang satu dari yang lain?”[3]

Pendek kata, tidakkah di mana-mana masih ada sistem, yang menjaminkan padamnya semangat itu dan menjaminkan kekalnya perceraian antara “*Inlander*” dengan “*Inlander*” itu?

Tetapi kami, yang ingin kuasa, kami pun tak usah kurang tidur! Kami pun kini mempunyai japa-mantram yang malahan nantinya tentu lebih ampuh daripada mantram *divide et impera* itu, kami pun tak sia-sia berguru di dalam pertapaan Sanghyang Merdeka, yang mewejangkan pada kami saktinya ilmu “bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh!” Kami pun memperhatikan, pula pengajaran Prof. Seely tadi itu, tetapi di dalam kami punya arti, di dalam kami punya makna!

Persatuan Indonesia, Tuan-Tuan Hakim, persatuan Indonesia, yang menggabungkan segenap rakyat Indonesia itu menjadi satu umat, satu bangsa, itulah urat dan saraf pembentukan kekuasaan PNI yang pertama.

b. Kontra kemunduran, yakni kontra dekadensi akal budi

Dan yang kedua? Urat saraf pembentukan kekuasaan kami yang kedua adalah kontra urat saraf sistem imperialisme yang kedua pula. Sistem imperialisme mau menetapkan rakyat kami di dalam kemunduran,— wahai, kami mau menjunjung rakyat kami daripada kemunduran itu! Kami mengetahui: kemunduran budi-akal rakyat adalah kepentingan sistem imperialisme di sini. Sebab imperialisme di sini bukanlah terutama imperialisme dagang: imperialisme di sini adalah sebagai kami terangkan di muka, yang paling hebat terutama di dalam shaktinya yang keempat, yang paling hebat di dalam mengusahakan Indonesia sebagai daerah perusahaan dari kapital lebih. Ia adalah paling hebat di dalam usahanya sebagai industri-industri pertanian, industri pertambangan, industri biasa dan perusahaan lain-lain, – yakni semua perusahaan yang butuh akan kaum buruh murah, akan penyewaan tanah murah, akan kebutuhan-kebutuhan rakyat yang murah. Untuk kemurahan hal-hal ini, maka rakyat kami dibikin rakyat yang “hidup kecil” dan “nrima”, rendah pengetahuannya, lembek kemaluannya, sedikit nafsu-nafsunya,

padam kegagahannya,— rakyat “kambing” yang bodoh dan mati energinya!

Di muka sudah kami beberkan penyelidikan Prof. Van Gelderen yang membuktikan kepentingan imperialisme ini atas kemunduran sosial-ekonomi rakyat; nah, kemunduran budi-akal pun, adalah kepentingannya!

Di dalam Welvaartsverslag[4] deel IX b 2, halaman 172, kami membaca:

“Rakyat desa dan kepalanya dan kampungnya dari dulu merupakan “si orang kecil”, si rendah bakti,... yang oleh karenanya harus ditetapkan rendah selamanya, — pembayar pajak yang paling setia. Sebaliknya kaum priayi termasuk kaum yang memerintah dan untuk kepentingan umum perbedaan ini harus dibikin seterang-terangnya. Seluruh pergaulan hidup di sini berdiri atas dasar ini....Meskipun untung sekali orang makin baik memelihara kepentingan si kecil,..... ia harus tetap kecil!”

“Ia harus tetap kecil”, Tuan-tuan Hakim, — dia harus tetap “hidup kecil” dan “nrima”, tetap rakyat “kambing” yang harus menurut saja! Berpuluh tahun sistem ini bekerja, ya, berabad-abad sistem ini menjalankan pengaruhnya. Herankah Tuan-tuan, kalau Ny. Augusta de Wit di dalam bukunya “Natuur en Menschen In Indie” menulis:

“Ketidakadilan sudah berjalan terlalu lama; akalbudi orang sudah tumbuh sesuai dengan itu, tumbuh kerut merut. Akal pikiran sudah menjadi bengkok dan kerdil, kemauan lemah terkulai.”[5]

Herankah Tuan-tuan, kalau PNI menuliskan perlawanan kepada dekadensi akal budi ini di atas panji-panjinya? Kami, kaum PNI, kami mencoba memberantas penyakit ini dengan mengadakan lebih banyak pendidikan rakyat, menyokong sekolah-sekolah rakyat, mengurangi buta huruf di kalangan rakyat. Kami mencoba membangkit-bangkitkan dan membesar-besarkan kemauan rakyat akan nasib yang lebih mirip nasib manusia, menyalakan lebih banyak nafsu-nafsu di dalam kalbu rakyat. Kami berusaha menghidup-hidupkan lagi kegagahan rakyat, tenaga kemauan rakyat, energi rakyat sebagai sediaan, —rakyat yang kini “sudah mati kutunya” itu, “rakyat kambing” yang menurut Prof. Veth:

“Semangat harimaunya sudah dijinakkan sampai kutu-kutunya”, karena “tak luput dari bekerjanya obat tidur penjajahan yang lama di bawah bangsa asing yang lebih kuat”![6]

Energi rakyat inilah salah satu urat saraf pembentukan kekuasaan kami, — salah satu urat saraf penolak daya imperialisme, tetapi terutama sekali ialah urat saraf pendorong rakyat ke depan!

[1] Melalui pendidikan pun kaum imperialis berusaha membunuh rasa kebangsaan, seperti usaha mereka di tahun tiga puluhan , setelah Kongres Pemuda 1928. Maka pemerintahan Belanda berusaha melarang penggunaan bahasa Indonesia, termasuk di sekolah swasta.

[2] Untuk memecahkan bangsa Indonesia, kaum imperialis menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, bahkan agama pun mereka peralat.

[3] Suluh Indonesia Muda, terbitan September-Oktober 1929 hal. 274/275.

[4] “Welvaartsverslag” Laporan mengenai Kemakmuran. Bab II b.a, hal. 172. Terbitan Lendgedrukrij 1905-1914, Batavia

[5] August de Wit (Ny) dalam buku *Natuur en Menschen in Indie* hal. 90, terbitan Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam 1914,

[6] Veth dalam “Java” I, hal. 209.

XVI

C. Kontra penamaan kepercayaan, bahwa kami bangsa kelas kambing

Tuan-tuan Hakim, sempitnya tempo memaksa kami membicarakan urat saraf pembentukan kekuasaan PNI yang nomor tiga dengan cara yang sesingkat-singkatnya pula.

Urat saraf yang nomor tiga ini adalah bergandengan sekali dengan urat saraf nomor dua itu, yakni bergandengan sekali dengan urat saraf penolak daya yang mengambang-ngambang itu. Sebab sistem imperialisme di sini tidaklah berkepentingan saja atas kemunduran sosial ekonomi dan kemunduran akal budi rakyat kami itu, — sistem imperialisme di sini adalah pula berkepentingan atas halnya rakyat itu percaya, bahwa ia memang suatu rakyat kelas kambing.

Di atas sudah kami tunjukkan, bahwa kaum imperialisme itu, sebagai kaum imperialisme di mana-mana saja, adalah menutupi-maksudnya yang sebenar-benarnya. Mereka menutupi dengan macam-macam teori yang manis, mereka mengatakan bahwa maksudnya bukanlah urusan rezeki, bukanlah urusan yang begitu “kasar” — tetapi maksudnya adalah “mendidik” kami dari bodoh ke arah kemajuan, dari “tidak matang” dijadikan “matang”, pendek kata, mereka mau memenuhi suatu “suruhan suci”, yakni suatu “*mission sacree*”.

Mereka mengatakan, bahwa mereka itu tidaklah mendapat keuntungan apa-apa, tidaklah mendapat manfaat apa-apa, melainkan malahan mendapat rugi belaka, malahan mendapat beban belaka, — yakni malahan mendapat “*burden*”, “*white man’s burden*”^[1] menjunjung dan memikul kami ke atas kemajuan!

Maka untuk “lakunya” teori “*mission sacree*” ini, untuk “lakunya” teori “*white mans’burden*” itu, perlu sekalilah kaum kulit coklat itu dimasukkan ke dalam kepercayaan, bahwa mereka dalam hakikatnya memang suatu bangsa *inferieur* atau “kurang karatnya”, bahwa sebaliknya bangsa kulit putih adalah bangsa yang memang *superieur*, bangsa yang memang “*adhi adhining*” bangsa, — dan bahwa karena itu sudah semestinya bangsa yang “*inferieur*” ini harus “dituntun” oleh bangsa yang “*superieur*” itu denganimperialismenya!

“itu Tuan-tuan rambut jagung,” – begitulah Karl Kautsky di dalam bukunya tentang suku bangsa dan bangsa Yahudi menggambarkan pendirian bangsa “rambut jagung” itu terhadap bangsa Yahudi:

“itu Tuan-tuan rambut jagung mengunggul-unggulkan diri sendiri sebagai orang yang paling budiman, paling mulia hati dan paling kuat, kepada siapa orang lain harus mengabdikan diri”,^[2]

dan adakah pendiriannya terhadap bangsa-bangsa Asia berbeda, adakah pendiriannya terhadap bangsa kami berlainan? Tidak, tidak berbeda, tidak berlainan, – tidak kurang kerasnya di Indonesia bekerja sistem menanamkan kepercayaan dalam hati kalbu rakyat, bahwa mereka memang superieur, kam memang inferieur, – tidak kurang kerasnya di sini menyala kesombongan si kulit putih, tidak kurang kerasnya di sini merajalela rasa “Iyeu aing uyah kidul!”

Pastor van Lith, orang alim yang tulus hati itu, belum lama berselang di dalam buku kecilnya yang termashur^[3], menulis:

“Tetapi, walaupun mereka itu sama sekali tidak termasuk golongan pencuri-pencuri cengkeh pada waktu dulu, mereka ikut menerima warisannya. Mereka semua menerima bagian dari warisan kompeni yang termashur itu. Mereka itu datang di Hindia sebagai turunan Tuan-tuan yang XVII yang mahakuasa itu, sebagai putra-putra yang memerintah, dengan kesombongan turunan yang memerintah terhadap yang diperintah. Barangkali mereka itu tidak sadar akan kesombongannya, tetapi mereka mempunyai sifat itu. Barangkali mereka tidak sombong tatkala berangkat dari negeri Belanda, mungkin sekali; tapi apabila mereka sudah tiba di Hindia, maka mereka tidak luput dari kesombongan itu. Keadaan di sekitarnya mempengaruhi mereka. Yang seorang banyak, yang lain kurangan, tapi semua mereka terjangkiti sebagian oelh penyakit kesombongan bangsa itu. Pergaulan hidup Belanda seperti yang sekarang hidup terus di....Hindia, adalah penerusan perusahaan dagang kompeni dulu, dan tiap orang Belanda, biarpun dia katolik,hidup dalam suasana kedai rempah-rempah yang besar itu.....dan hidup untuk keperluan perusahaan yang besar itu, hidupnya sendiri dan keselamatannya sendiri tergantung kepada terus hidupnya dan suburnya perusahaan itu.”

Lebih terang sebagai di sini, tidak bisalah dinyatakan, bahwa rasa keunggulan itu adalah salah satu urat saraf dari perusahaan besar “*reuzen-onderneming*” itu. Memang, tidak kurang-kuranglah kita

mendengar cacian “*Inlander* seperti kerbau”, “*inlander* goblok”, “*inlander* bodoh, kalau nggak ada kita modar lu”, beserta lain-lain “pujian” lagi yang “segar”! Tetapi, walaupun begitu, bukan terutama dalam ucapan-ucapan sombong orang Eropa itu letaknya bahaya yang terbesar buat kami, bukan terutama di dalam ketinggian hati suatu bangsa kulit putih itu letaknya bencana batin dari rakyat kami, — bahaya yang paling besar dan bencana yang paling merusak adalah sistem yang tak *pedot-pedot* , yang tak terhambat-hambat menginjeksikan kepada rakyat kami racun kepercayaan “kamu *Inlander* bodoh, kamu modar kalau tidak kita tuntun” itu. Sebab injeksi ini lama-lama “makan”! Berabad-abad kami mendapat cekokan “*inlander* bodoh”, berabad-abad kami diinjeksi rasa kurang karat; turun temurun kami menerima sistem ini, ketambahan lagi kami ditetapkan “rendah” dan ditetapkan “kecil” sebagai laporan tentang kemakmuran itu tadi mengatakan, dipadam-padamkan segenap energi kami, sekarang percayalah kebanyakan bangsa kami, bahwa kami, sesungguhnya , memang adalah bangsa kurang karat yang tak bisa apa-apa! Hilanglah tiap-tiap kepercayaan atas kebisaaan sendiri, hilanglah” tiap-tiap rasa kegagahan, hilanglah tiap-tiap rasa percaya pada diri sendiri dan keperwiraan. **Kami, sediakala adalah bangsa yang ikut menjunjung tinggi obor kebudayaa Timur dan kebesaran Timur, yang dulu begitu insaf akan kebisaaan diri dan kepandaian diri, kami sekarang menjadi rakyat yang sama sekali hilang keinsafan itu. Kami menjadilah kini rakyat yang mengira, ya, percaya, bahwa kami memang adalah rakyat yang “*inferieur*”.** Kini di mana-mana terdengarlah kesah: “yah, kami memang bodoh kalau tidak ada bangsa Eropa, bagaimana kami bisa hidup!”

O, Tuan-tuan Hakim, bagaimana baiknya kalau kami bisa membongkar bencana batin yang demikian ini! Bagaimana baiknya kalau kami bisa menanamkan lagi dengan sekejap mata saja “wahyu Cakraningrat” yang meniadakan rantai roh yang mengikat itu! Tuan-tuan tentu mengerti bahwa perasaan “memang kurang karat” atau perasaan inferioriteit itu adalah racun bagi kemajuan tiap-tiap bangsa, rem yang sejahat-jahatnya bagi gerak suburnya atau evolusi tiap-tiap rakyat.

Herankah Tuan-tuan , kalau Tuan melihat PNI membanting tulang memberantas perasaan *inferioriteit*, memeras keringat dan tenaganya

memberantas segala perasaan “ini tak bisa itu tak bisa” ini, memboongkar teori “*mission sacree*” dan “*white man’s burden*” dengan akar-akarnya, — mengembalikan lagi kepercayaan di dalam kalbu rakyat, bahwa bangsa kami, asal saja diberi kesempatan, mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang tak kalah dengan kebiasaan-kebiasaan bangsa lain? Herankah Tuan-tuan, kalau melihat PNI membongkar-bongkar kebohongan kata, bahwa dunia Timur akan menjadi biadab sama sekali, kalau tidak ada dunia Barat? Tidak, bagi kami kaum Partai Nasional Indonesia bagi kami tidaklah syak wasangka lagi, bahwa “*inferioriteit*” atau “kebodohan” kami itu bukanlah “*inferioriteit*” dan “kebodohan” yang memang sifat hakikat asli bangsa kulit berwarna, tetapi hanyalah “*inferioriteit*” dan “kebodohan” yang terbikin dan terinjeksikan belaka, — tidaklah pula kami syak wasangka lagi atas kebenaran kalimat Karl Kautsky yang memang kami sudah dalilkan itu yakni kalimat:

“tetapi orang yang tidak punya apa-apa dengan sendirinya kekurangan pula alat-alat peradaban, jadi juga kekurangan peradaban,”

dan bahwa teori “*mission sacree*” itu hanyalah benar di dalam lahirnya saja, hanya.

“Seolah-olah saja peradaban berkuasa atas kebiadaban!”[4]

Lahirnya saja, Tuan-tuan Hakim, lahirnya!

Lahirnya saja kami bangsa yang kurang karat, lahirnya saja kaum imperialisme kaum yang lebih superieur di dalam hakikatnya. Memberantas pandangan yang salah ini, memberantas rasa kurang karat, itulah kami punya urat saraf pembentukan kekuasaan yang ketiga. Dengan memberantaas rasa kurang karat itu, maka PNI menaruh salah satu syarat yang terpenting bagi politiknya “percaya pada diri sendiri”, “bekerja sendiri untuk sendiri”, — yakni syarat bagi politiknya “*self-reliance*” atau “*self-help*”!

[1] White man’s burden = beban si kulit putih

[2] Karl Kautsky dalam proses pengadilan Sneevliet tahun 1917.

[3] F. Van Lith dalam bukunya “De Politiek Van Nederland ten opzichte van Nederlandsch-Indie” Ibid hal. 11.

[4] Karl kautsky dalam “Sozialismus und Kolonial-politik” hal. 19.

XVII

D. kontra politik persatuan dengan kaum sana

Marilah kami sekarang membicarakan urat saraf pembentukan kekuasaan kami yang keempat. Juga di sini kami bisa singkat kata. Sebab tadi sudah kami terangkan, bahwa di dalam tiap-tiap negeri jajahan ada pertentangan kepentingan antara kaum imperialisme dan Bumiputra, di atas tiap-tiap lapangan, baik lapangan ekonomi, maupun lapangan sosial, baik lapangan politik maupun lapangan apa saja pun. Tak benarlah ajaran kaum imperialisme bahwa kedua pihak itu mempunyai persamaan kepentingan, dan oleh karenanya, tak benarlah pula ajarannya, bahwa sebab itu, jajahan harus selamanya bersatu dengan “negeri induk” dan bahwa sebab itu, kami harus menjalankan politik bersatu dengan kaum sana, yakni politik asosiasi.

Tidak, PNI tidak mau mengakui persamaan kepentingan itu, tidak mau menjalankan politik asosiasi itu. PNI adalah teguh di dalam keyakinannya, bahwa di sini ada pertentangan kepentingan, ada antitesa kepentingan, sebagaimana pula diakui oleh banyak kaum Eropa yang tulus hati. PNI teguh di dalam keyakinannya, bahwa dengan adanya pertentangan kepentingan itu tidak ada satu jajahan yang bisa membereskan semua pergaulan hidupnya dengan sempurna, kalau pertentangan kepentingan itu belum berhenti adanya,— yakni kalau jajahan itu belum berhenti menjadi jajahan! PNI adalah karena partai kemerdekaan,— partai kemerdekaan nasional. **Dan kemerdekaan tidak akan “dihadiahkan” oleh imperialisme yang sekarang berusaha “mematangkan” kami dulu, sebab kemerdekaan adalah ruginya imperialisme itu. Kemerdekaan adalah hasil yang kami sendiri harus usahakan, yang kami sendiri harus lahirkan, yang kami sendiri harus ciptakan dan pujikan!** Politik asosiasi adalah bertentangan dengan faham kepribadian ini, politik asosiasi adalah mengeruhkan keadaan. Di dalam suatu jajahan ada antitesa kepentingan, — nah, politik kami haruslah berdiri, di atas antitesa itu juga. Siapa orang Indonesia yang tidak berdiri di atas antitesa ini di dalam politiknya, ia adalah ngelamun! PNI tidak mau ngelamun, PNI tidak mau terapung-apung di atas awan angan-angan, — PNI mau berdiri di atas keadaan yang sebenarnya, di atas *realiteit*. Tidak, bukan politik asosiasi, tetapi politik antitesalah yang menjadi urat saraf pembentukan kekuasaan PNI yang keempat. Dengan politik antitesa ini, maka ia menarik garis yang terang antara sini dan sana, memisahkan golongan sini dari golongan sana, — menjernihkan keadaan menjadi sejernih-jernihnya!

Badan Lahirnya Pembentukan Kekuasaan

Tuan-tuan Hakim, kami sekarang tinggal menerangkan satu hal lagi dari pembentukan kekuasaan kami. Kami sudah menerangkan, nyawa pembentukan kekuasaan kami, yakni nasionalisme. Kami sudah menerangkan pula urat-urat dan saraf-saraf pembentukan kekuasaan itu, yakni persatuan Indonesia, memerangi kemunduran akal budi rakyat, memberantas perasaan rendah diri, menjalankan politik antitesa. Kami sekarang harus menerangkan anggota-anggota pembentukan kekuasaan kami itu, – badan lahirnya, badan wadagnya.

Badan lahirnya pembentukan kekuasaan PNI?

Badan lahir pembentukan kekuasaan PNI sebagai yang diinginkannya, adalah massa.[1] Idam-idaman PNI bukanlah satu partai dari puluhan atau ratusan orang saja, bukanlah perkumpulan segundukan kaum “politikus salon” saja yang pekerjaannya sehari-hari hanya menggurutu saja, **-idam-idaman PNI ialah suatu pergerakan massa yang hebat-hebatnya, suatu massa-aksi, yang membangkitkan ribuan, laksana, ketian, ya, milyunan rakyat tua muda, laki-perempuan, pandai-bodoh, menak dan somah! Hanya dengan massa-aksi yang demikian itulah, menurut keyakinannya, pembentukan kekuasaannya bisa menjadi sempurna.** Hanya dengan massa-aksi yang sebagai banjir yang mahakuasa dan tak dapat dicegah majunya., massa-aksi yang sebagai gelombang melimpahi seluruh Indonesia, dari Aceh sampai ke Fak-fak, hanya dengan massa-aksi yang begitu, pembentukan kekuasaannya bisa menjadi kekuasaan yang sebenar-benarnya. Air-air Indonesia yang tenang sejak berwindu-windu, air-air Indonesia itu PNI ingin mengalirkannya, sumber sambung sumber, sungai sambung sungai, samudra sambung samudra, sehingga akhirnya menjadi aliran yang mahalebar dan mahatinggi, bergelombang-gelombang menuju ke satu arah. Dengan badan lahir yang sebagai raksasa itu, dengan urat saraf empat shakti sebagai yang tadi tadi kami terangkan, dengan nyawa nasionalisme yang berkobar-kobar di dalam kalbu maka sepanjang idam-idaman PNI pembentukan kekuasaannya menjadilah sebagai Krishna Tiwikrama, – hebat, tidak teralahkan!

[1] Yang dimaksud massa, yakni rakyat jelata yang berjuta-juta itu.

XVIII

Massa-aksi

Krishna Tiwikrama! Jadi toh revolusi, jadi toh hamuk sebagai “*hamuk Jayabinangun*”, jadi toh huru hara atau setidak-tidaknya menjungkirkan hukum?

Bukan, sekali lagi bukan!

Bukan pelanggaran hukum atau revolusi, — tetapi suatu massa-aksi yang aman tetapi hebat, suatu massa-aksi yang teratur tetapi dahsyat, sebagai misalnya massa-aksi SDAP “tatkala dua puluh tahun yang lalu, berjuang merebut hak pilih umum. Adakah di dalam massa-aksi SDAP pada waktu itu, tatkala puluhan, ratusan ribu manusia bergerak, bom-boman atau dinamit-dinamitan, pengrusakan keamanan umum, pelanggaran kekuasaan pemerintah? Adakah SDAP di dalam massa-aksi untuk hak pilih itu mengalirkan darah, adakah pemimpin-pemimpinnya kena hukuman lantaran melanggar pasal ini atau pasal itu?

Tuan-tuan Hakim, rakyat Belanda sekarang merasa besar hatilah atas kemenangan demokrasi itu; kami pun ikut mengucap syukur atasnya, kami pun ikut berseru: “bahagia, bahagialah kamu dengan hak pilih umum itu, hai, bangsa Belanda!” — Tetapi.....marilah kita ingat sebentar, bagaimana rakyat Belanda itu caranya mendatangkan hak pilih umum itu, bagaimana caranya kemenangan demokrasi itu didatangkan! Tak lain tak bukan,—dengan massa aksi! Dengan massa-aksi yang bergelombang-gelombang melimpah seluruh negeri Belanda, membangkitkan seluruh energinya rakyat, mengelektisasi sekujur badannya bangsa, — massa aksi yang hebat dan kini tertulis dengan huruf emas di dalam buku riwayat bangsa Belanda dan mendatangkan aturan pemerintah yang modern!

Massa-aksi yang demikian hebatnya itulah yang diidam-idamkan oleh PNI, massa-aksi yang hebat dan mahakuasa, yang juga menggetarkan seluruh tubuhnya rakyat dan juga mengelektisasi sekujur badannya bangsa,— massa aksi yang bergelombang- gelombang menuju ke arah maksudnya, tidak dengan bermaksud — iseng-iseng langgar-langgaran undang-undang sebagai yang dituduhkan kepada kami dalam proses ini, tidak pula dengan senjata bom atau bedil atau gas racun atau “ramai-ramaian” apapun juga,

melainkan hanyalah dengan senjata semangat yang berupa nasionalisme beserta empat urat saraf itu tadi saja, sebab senjata semangat ini, asal sudah cukup mengasahnya, sudah bisalah membikin kami mahasaki dan tak dapat ditundukkan, yakni bisa membangkitkan desakan “kekerasan batin”, *moreel geweld*, yang mahabesar, sehingga maksud kami tentu dapat tercapai!

Kami kembali lagi: badan lahirnya pembentukan kekuasaan PNI kami cari di dalam rakyat murba yang berjuta-juta itu, di dalam masa yang berkerumun-kerumun sebagai semut.

Aha! AID sering menulis atau saksi Albregths ala Colijn berkata- jadi, gantinya PKI, jadi, gantinya, Gombinis”!! Satu “logika” lagi yang kocak, Tuan-tuan Hakim!

“Logis”, bukan? PNI didirikan tidak lama sesudah PKI mati PNI sering menunjukkan sikap anti-imperialisme sebagai PKI, PNI mau menggerakkan massa sebagai PKI, jadi PNI sama dengan PKI, jadi, merah putih kepala banteng sama dengan merah martil arit, jadi, nasionalis Indonesia sama dengan “Gombinis”!

Walaupun begitu, – walaupun “logika” yang begitu “logis” itu,– PNI bukan “Gombinis”! PNI memang didirikan di dalam tahun 1927, memang anti-imperialisme, memang suatu partai massa, memang suatu partai yang kromoistis dan marhaenistis, memang dikhawatirkan oleh dr. Cipto akan lekas dituduh dan ditindas sebagai gantinya PKI, tetapi bukan “Gombinis”, PNI bukan “*heimelijke opvolgster*”^[1] dari Partai Komunis Indonesia!

PNI adalah suatu partai nasionalisme revolusioner sebagai yang kami terangkan tadi, dan massaisme, kromoisme, marhaenisme PNI tidakklah karena faham “Gombinis”, melainkan ialah karena susunan pergaulan hidup Indoesia yang memang menyuruh PNI memeluk kromoisme dan marhaenisme itu!

[1] Pemerintah Belanda memang selalu menuduh PNI adalah lanjutan dari PKI, seperti surat pendakwaan terhadap Bung Karno di sana tertulis bahwa PNI adalah “*helmeyke opvolgster*” dari PKI, artinya bahwa PNI adalah gantinya PKI dengan sembunyi-sembunyi.

XIX

Marhaenisme

Menyuruh memeluk kromoisme? Tuan-tuan Hakim, menyuruh memeluk kromoisme, sebagaimana susunan pergaulan hidup Eropa menyuruh kaum sosialis memeluk proletarisme pula! Sebab susunan pergaulan hidup Indonesia sekarang adalah pergaulan merk Kromo, pergaulan hidup merk marhaen,- pergaulan hidup yang sebagian besar sekali adalah terdiri dari kaum tani kecil, kaum buruh kecil, kaum pedagang kecil, kaum pelayar kecil, pendek kata:kaum kromo dan kaum marhaen yang apa-apanya semua kecil! Suatu golongan borjuis nasional[1] yang kuasa sebagai di India, suatu golongan borjuis yang tenaganya bisa dipakai di dalam perjuangan melawan imperialisme itu dengan; politik “selfcontaining”[2]di sini boleh dikatakan tidak ada. Banyak kaum nasionalis bangsa Indonesia, yang mengatakan, bahwa pergerakan Indonesia harus meniru pergerakan India dengan mengadakan pula boikot ekonomi atau swadeshi sebagai di India itu. Kami menjawab: kalau bisa memang bagus, tetapi pergerakan Indonesia tidak bisa meniru pergerakan India, tidak bisa ikut-ikutan mengadakan swadeshi, tidak bisa memakai tenaga suatu golongan borjuis nasional, oleh karena di Indonesia tidak ada golongan borjuis nasional yang kuasa itu. **Pergerakan Indonesia haruslah suatu pergerakan yang mencari tenaganya di dalam kalangan Kang Kromo dan Kang Marhaen saja, oleh karena Indonesia hampir melulu mempunyai kaum kromo dan kaum Marhaen belaka! Di dalam tangan kaum Kromo dan kaum Marhaen itulah terutama letaknya nasib Indonesia, di dalam organisasi kaum kromo dan kaum Marhaen itulah terutama letaknya nasib Indonesia, di dalam organisasi kaum kromo dan kaum Marhaen itu terutama harus dicari tenaganya.** Siapa dari kaum pergerakan Indonesia menjauhi atau tak mau bersatu dengan saudara-saudara “rakyat rendah” yang sengsara dan berkeluh kesah itu, siapa yang menjalankan politik “salon-salonan” atau “menak- menakan”, siapa yang tidak memperusahakan marhaenisme atau kromoisme, – walaupun ia seribu kali sehari berteriak cinta bangsa cinta rakyat, ia hanyalah menjalankan politik yang.....Cuma”politik-politikan” belaka!

Kekromoan dan kemarhaenan!, – itulah kini gambar susunan pergaulan hidup kami. Sebab sistem imperialisme di Indonesia adalah dari sejak semulanya, dari zaman Kompeni sampai ke zaman *Cultuurstelsel*, dari zaman *Cultuurstelsel*, sampai ke zaman modern, merebut dan membasmi tiap-tiap perusahaan besar daripada rakyat kami dengan sulur-sulurnya dan akar-akarnya, mengalang-ngalangi dan membikin tidak bisa lebih hidup suatu perusahaan kerajinan atau industri atau *onderneming* Indonesia apa pun juga. Perdagangan, pelayaran, pertukangan, – semua matilah oleh pengaruh imperialisme-tua dan imperialisme modern yang kedua-keduanya monopolistis itu!

Kini tinggallah perdagangan kecil belaka, pelayaran kecil belaka, pertukangan kecil belaka, pertania kecil belaka, ketambahan lagi milyunan kaum buruh yang sama sekali tiada perusahaan sendiri, -kini pergaulan hidup Indonesia itu hanyalah pergaulan hidup kekromoan dan kemarhaenan saja!

Tuan-tuan Hakim, sempitnya tempo mengalang-alangi kami menguraikan dan membuktikan keadaan yang penting ini lebih luas, tetapi satu dua dalil dari bangsa Eropa yang terpelajar, tak bisa kami tinggalkan, misalnya dari Raffles, Prof. Veth, Prof. Kielstra, Prof. Gonggripj, Prof. V. Gelderen, ataupun Schmalhausen, Rouffaer, dan lain-lain yang semuanya adalah membuktikan kebenaran kata kami itu!

Di dalam buku Raffles yang termashur tentang tanah Jawa, kami membaca tentang imperialisme-tua:

“Begitu sukarnya menggambarkan dengan panjang lebar, luasnya perdagangan di tanah Jawa pada saat orang Belanda mulai berdiam di laut-lau Timur, begitu pula menyedihkan hati membuktikan dengan cara bagaimana perdagangan itu oleh perbuatan bangsa asing dialang-alangi, diubah sama sekali dkecil-kecilkan, oleh kekuasaan monopoli yang bobrok, oleh ketamakan dan keserakahan akan duit dibarengi kekuasaan, dan oleh kelaliman yang picik dari suatu pemerintah saudagar”.....

“Demikianlah pasal-pasal yang terpenting dari tiga puluh satu pasal mengenai pembatasan, yang membelenggu tiap gerak perdagangan dan memadamkan bara yang penghabisan dari semangat berusaha, untuk memuaskan pemandangan-pemandangan picik angkara

murka, yang bisa disebut kefanatikan akan keserakahan kepada harta.[3]

Tuan-tuan Hakim, Raffles adalah terkenal sebagai pembenci bangsa Belanda! Karena itu, marilah kita menyelidiki pendapat pujangga-pujangga Belanda sendiri dan kita akan mendengar pendapat yang tidak berbeda. Tidakkah Prof. Veth tentang imperialisme-tua itu mengatakan, bahwa bangsa kami,

“dalam abad ke-16, seperti juga di zaman Majapahit, terutama terkenal sebagai kaum saudagar yang besar usaha, kaum pelaut yang gagah, kaum perantau yang berani

, dan bahwa mereka umumnya.....telah harus mengalami perubahan yang besar untuk menjadi petani-petani yang diam dan damai seperti sekarang ini”, dan bahwa: “nyata” sekali, bahwa semangat harimaunya sudah dijinakkan sampai kutu-kutunya dan bahwa (mereka) tak luput dari bekerjanya obat tidur penjajahan yang lama di bawah bangsa asing yang lebih kuat”![4]

Tidakkah Prof. Kielstra menulis:

“Politik perdagangan bangsa Belanda menyebabkan banyak sumber-sumber penghidupan menjadi tertutup atau kering sama sekali; tapi perduli apa! Tidakkah orang.....mengajarkan, bahwa orang tak boleh menyimpang dari pendirian, bahwa rakyat yang miskin paling gampang bisa diperintahi!”[5]

Dan haraplah perhatikan perkataan Prof. Gonggrijp yang berbunyi:

“Usaha yang hebat untuk mengekalkan monopoli itu sudah membinasakan kesejahteraan pulau-pulau Maluku dan menindas semangat dagang dan nafsu berusaha yang (masih) ada sedikit pada penduduk bumiputra”![6]

Haraplah memperhatikan pula pendapat Prof. Van Gelderen yang menulis di dalam buku pidato-pidatonya:

“Dengan adanya perpustakaan yang luas, kini tak bisa disangkal lagi, sudah ada permulaan perdagangan yang aktif dan teratur, lalu lintas tukar-menukar dengan seberang laut dengan alat-alat yang ada waktu itu.....oleh adanya system *contingenten* dan *leverantien*! [7]

Kemudian oleh adanya sistem tanaman paksaan, maka produsen Bumiputra didesak dari pasar dunia dan dialang-alangilah tumbuh suburinya suatu kelas majikan dan kelas saudagar bangsa sendiri”!
[8]

Orang bisa membantah, “O, itu keadaan tempo dulu, keadaan sekarang sudah lain!”

O, memang,-itu keadaan tempo dulu, itu jahatnya imperialisme-tua! Tetapi keadaan sekarang, di bawah imperialisme modern, tidak lain halnya! Keadaan sekarang masih tetap mengalang-alangi timbulnya suatu kaum perusahaan besar di Indonesia, tetap “mengkromokan”, tetap, memarhaenkan” di dalam tendensnya, – walau, dengan meminjam lagi perkataan Stokvis, “melalui jalan-jalan yang lebih sunyi”, “*langs stillere wegen*”. Keadaan sekarang tetap menunjukkan suatu pergaulan hidup tani kecil, pedagang kecil, pelayar kecil, segalanya kecil, beserta berjuta-juta kaum yang tak mempunyai suatu milik atau perusahaan sendiri yang bagaimana kecilnya pun, proletar, yang (terbawa oleh tendens imperialisme-modern yang menurut Prof. Van Gelderen membikin kami menjadi “rakyat kaum buruh”, dan “si buruh antara bangsa—bangsa”), makin lama makin bertambah.

Dalil- dalil? Haraplah memperhatikan perkataan bekas Asisten Residen Schmalhausen, yang atas laporan Du Bus yang berbunyi:

“Hal yang sama, dan malahan lebih-lebih lagi, terjadi dengan barang tenunan. Jawa di zaman dulu mengambil kain-kain yang agak halus dari pesisir, tapi yang untuk keperluan sehari-hari dibikinya sendiri untuk kebutuhan tanah Jawa dan buat sebagian besar juga untuk Kepulauan Hindia. Berkapal-kapal kain-kain itu meninggalkan tanah Jawa dan disembarkan ke pulau-pulau sekitarnya. Sekarang kita memasukkan di tanah Jawa dan kepulauan Hindia kita punya kain-kain Belanda.....Di dalam pertengahan ini perusahaan Bumiputra menjadi mundur dan pabrik-pabrik kita di negeri Belanda ada harapan akan bisa menggantikannya sama sekali dalam waktu yang pendek”.

Menulis komentar buat zaman sekarang yang mengatakan:

“sedangkan Du Bus menyebutkan di antara sebab-sebab maka keadaan jelek, ialah hilangnya beberapa banyak barang-barang

ekspor yang lain, di samping tertahan-tahannya pengeluaran beras, maka kita di zaman ini bisa pula mengatakan, bahwa banyak industri-industri Bumiputra binasa atau merana hidupnya![9]

Dan adakah beda tulisan G.P. Rouffaer yang berbunyi:

“Dalam keadaan demikian itu, maka tidak boleh tidak perusahaan kain Bumiputra...makin lama makin tertindas oleh banyaknya impor dari luar negeri.”[10]

Tidak, tidak ada bedanya. Dan tidak bedalah pula nasib perusahaan-perusahaan Indonesia yang lain. Di manakah sekarang kami punya pelayaran? Dimanakah kami punya perusahaan besi dan kuningan, kami punya kaum pedagang? Sesungguhnya, benarlah tulisan Prof. Van Gelderen yang berbunyi:

“.....suburnya industri-industri modern ini, sudah mendesak usaha-usaha industri rumahan yang agak maju. Perdagangan ekspor Bumiputra binasa dan industri setempat-setempat hilang tersapu oleh gelombang barang-barang impor yang murah, hasil bikinan terbanyak-banyak”. [11]

“....Begitulah maka, juga di dalam zaman tanaman merdeka, yang datang sesudah zaman cultuurstelsel, berlaku terus perpisahan antara si tani Jawa, – dan dengan ini sebenarnya segenap penduduk Bumiputra,- dan pasar dunia zaman sekarang.[12]

Tuan-tuan hakim, dengan pergaulan hidup yang demikian ini, dengan pergaulan hidup yang tiada kelas perusahaan besar ini, dengan pergaulan hidup yang hampir penuh dengan kaum kromo dan kaum marhaen saja ini, kami dari Partai Nasional Indonesia, yang selamanya berdiri diatas *realiteit* itu, kami harus menjalankan politik yang Kromoistis dan Marhaenistis pula. Tidak bisalah kami mencoba mengalahkan imperialisme itu dengan mendesaknya ke luar dengan kekuatan persaingan ekonomi, tidak bisalah kami mencoba melemahkan dayanya dengan daya “*selfcontaining*” yang nasional-ekonomis sebagai di India itu. Kami hanya bisa mengalahkannya dengan aksi Kang Kromo dan Kang Marhaen, dengan massa-aksi kebangsaan yang sebesar-besarnya. Kami mencoba menyusun-nyusun energi massa yang berjuta-juta itu, mencoba membelokkan energi segenap kaum intelektual Indonesia ke arah susunan massa ini; kami mencoba, -dan kami yakin akan

bisa-, kami mencoba memberi keinsafan pada kaum intelektual Indonesia itu, bahwa di dalam kalangan massa inilah mereka harus terjun dan berjuang, di dalam kalangan massa inilah mereka harus mencari kekuasaan bangsa, – jangan lebih dulu hanya menjalankan politik “salon-salonan” saja, menggerutu sendiri-sendiri atau marah-marah di dalam kalangan sendiri saja.

Tidak! “Di dalam massa, dengan massa, untuk massa!”,- itulah harus menjadi semboyan kami dan semboyan tiap-tiap orang Indonesia yang mau berjuang untuk keselamatan tanah air dan bangsa!

[1] Golongan borjuis nasional=kaum modal bangsa sendiri.

[2] Politik selfcontaining, ialah politik membikin sendiri kebutuhan rakyat, jadi tidak membeli barang bikinan kaum imperialis, melainkan segala kebutuhan itu dibikin oleh perusahaan bangsa sendiri.

[3] Sir Thomas. S. Raffles, dalam buku “Geschiedenis van Java” terjemahan van de Sturier 1836, hal. 116, 140.

[4] Veth dalam “Java” I hal. 299.

[5] E.B. Kielstra dalam “*De vestiging.....*” hal.19.

[6] George Gonggrijp dalam “*Schets ener economische gescftiedenis*” hal.122

[7] Lihatlah buat maknanya, catatan kaki no. 36, 37.

[8] Prof, van Gelderen, dalam “*Voorlezingen...*”hal.122.

[9] Schmalhausen, dalam buku “*Over Java*” hal. 139.

[10] Gerret Piete Rouffaer, dalam buku “*De Voornaamste Industrieen*” hal. 2

[11] Dr. Schrieke dalam “*Western Influence etc*” hal.99.

[12] Van Gelderen “*Voorlezingen*” hal. 123.